



**LAPORAN AKHIR
ANALISIS
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2013-2017**

KERJASAMA

**BADAN PUSAT STATISTIK
BALAI STATISTIK DAERAH BAPPEDA DIY
TAHUN 2018**

LAPORAN AKHIR

ANALISIS

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2013-2017

KERJA SAMA
BSD BAPPEDA DIY
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DIY
2018

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi provinsi atau di bawahnya, dengan definisi yang sama dan wilayah penghitungan yang disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017” ini merupakan publikasi yang membahas kinerja ekonomi melalui data PDRB beserta indeks turunannya serta berbagai aspek data terkait pada kurun waktu 2013 hingga 2017. Pembahasan analisis selain secara sektoral juga melakukan perbandingan antarprovinsi terdekat dan antarwilayah kabupaten/kota.

Analisis indeks turunan dalam publikasi ini, diantaranya: struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks perkembangan. Sementara analisis lintas sektor dilakukan dengan melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan beberapa indikator makro ekonomi dan indikator sosial ekonomi lainnya, seperti: inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan manusia, dan ketenagakerjaan. Untuk memperkaya pembahasan diantaranya juga melakukan identifikasi potensi ekonomi kabupaten/kota dan mendeteksi tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota. Pada akhir bab disajikan kesimpulan dari pembahasan analisis dan juga mencoba merumuskan rekomendasi kebijakan untuk tindaklanjut perencanaan dan implementasi program pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, April 2018

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

Johanes De Britto Priyono

KATA SAMBUTAN

Perencanaan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan data dan indikator statistik sebagai evaluasi kinerja dari implementasi pembangunan. RPJMD dan RKPD juga merumuskan indikator-indikator sebagai tolok ukur capaian target pencapaian dan juga menjadi pijakan bagi perumusan rencana pembangunan yang akan datang.

Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017”, sebagai produk kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis ini ditunggu-tunggu oleh lembaga eksekutif dan legislatif daerah karena merupakan salah satu bahan untuk menyusun kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun-tahun mendatang. Hasil analisis dalam publikasi ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi realisasi dari target indikator pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Melalui analisis data PDRB dan indikator turunannya, potensi perekonomian daerah terukur dan teridentifikasi. Di samping itu analisis yang mengaitkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketenagakerjaan, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antardaerah serta capaian pembangunan manusia menjadikan publikasi ini layak menjadi acuan baik oleh pemerintah daerah maupun peneliti untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan lebih mendalam. Konteks pembangunan DIY yang unik, yang terpotret di satu sisi indikator-indikator mencerminkan prestasi yang membanggakan namun di sisi lain mencerminkan kondisi yang masih memerlukan kerja keras untuk memperbaiki format perencanaan dan implementasi pembangunan di wilayah D.I. Yogyakarta di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerja sama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu menghasilkan dokumen yang bermanfaat untuk evaluasi dan rumusan perencanaan pembangunan. Dampak lain dari hasil analisis ini adalah bermanfaat mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, April 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

Tavip Agus Rayanto

ABSTRAKSI

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi daerah mempunyai kualitas pertumbuhan yang baik bila pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan berkurangnya angka pengangguran, berkurangnya tingkat kemiskinan, dan berkurangnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk serta berkurangnya ketimpangan antarwilayah.

Situasi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi. Aktivitas berkembangnya perekonomian DIY selama lima tahun terakhir, yaitu 2013 hingga 2017 menarik untuk dicermati. Pada tahun 2017 nilai PDRB Provinsi DIY atas dasar harga berlaku mencapai Rp119,17 triliun, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp92,30 triliun. Selama setahun terakhir perekonomian DIY atas dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 5,26 persen. Sementara bila dikaji selama lima tahun terakhir, perekonomian tumbuh rata-rata sebesar 5,11 persen per tahun. Kategori-kategori usaha yang rata-rata pertumbuhannya di atas 6 persen adalah pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat juga mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2017 struktur ekonomi DIY ditopang oleh tiga kategori dengan pangsa distribusi terbesar, yaitu industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan pertanian masing-masing sebesar 13,12 persen, 10,32 persen, dan 10,01 persen.

Nilai PDRB per kapita riil (atas dasar harga konstan 2010) tahun 2017 sebesar Rp24,53 juta. Selama lima tahun terakhir PDRB per kapita riil meningkat sebesar Rp3,5, atau tumbuh rata-rata sebesar 3,92 persen. PDRB DIY belum terbagi secara merata ke penduduk, hal ini terlihat dari ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota.

Pada tahun 2017 (September 2017) di DIY masih terdapat penduduk miskin sejumlah 466,33 ribu orang, atau 12,36 persen dari jumlah penduduk. Demikian pula distribusi pendapatan antarpenduduk DIY masih terjadi ketimpangan meskipun dalam skala moderat, angka Rasio Gini sebesar 0,44, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan antarwilayah yang diukur dengan Indeks Williamson juga mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar karena kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah semakin kecil menerima bagian distribusi pendapatan.

Ketimpangan pertumbuhan wilayah yang disebabkan potensi sektor-sektor dideteksi dengan analisis *shift share*. Hasil pengukuran analisis *shift share* untuk kurun waktu 2010-2017, Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul masuk dalam kategori daerah yang sedang berkembang (kuadran II). Kota Yogyakarta menempati kategori daerah yang cenderung berpotensi (kuadran III). Sementara, Kulon Progo masih menjadi daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV).

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pengangguran ketimpangan pendapatan, ketimpangan antarwilayah, kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Williamson, dan Analisis Shift Share.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan	iii
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Pelaksanaan	5
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sasaran	6
E. Manfaat.....	6
F. Lokasi Kegiatan.....	6
G. Sumber Pendanaan	7
H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung	7
I. Rencana Kerja	7
J. Lingkup Pekerjaan	7
II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pembangunan	11
1. Konsepsi Pembangunan	11
2. Pembangunan Kewilayahan	12
3. Pembangunan Manusia	13
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	14
1. Definisi PDRB	14
2. Pendekatan Penghitungan	14
3. Metode Penghitungan	15
4. Turunan PDRB	17
5. PDRB menurut Lapangan Usaha.....	17
6. PDRB menurut Pengeluaran.....	18
7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008	20

8. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi	21
C. Potensi dan Kualitas Pertumbuhan PDRB.....	21
1. Pertumbuhan Ekonomi	21
2. Kesenjangan (Disparitas) Antarwilayah.....	23
3. Kesenjangan (Disparitas) Pendapatan dan Kemiskinan	24
4. Ketimpangan Antarwilayah dengan Indeks Williamson.....	25
D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	27
1. Kependudukan	27
2. Ketenagakerjaan	28
III METODOLOGI.....	31
A. Sumber Data	33
B. Kerangka Pikir Analisis	33
C. Indikator Penyajian PDRB	34
1. Distribusi Persentase.....	34
2. PDRB per Kapita	34
3. Indeks Perkembangan	34
4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan)	34
5. Indeks Harga Implisit	35
6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi Harga Produsen) ...	35
7. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi/Deflasi	35
D. Analisis Potensi dan Kualitas Pertumbuhan PDRB	36
1. Pertumbuhan, dan Rata-rata Pertumbuhan, dan Andil Pertumbuhan Ekonomi.....	36
2. Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan	39
3. Indikator Kemiskinan	43
4. Indikator Ketimpangan (Disparitas)	46
IV. PDRB Menurut Lapangan Usaha	53
A. Struktur Perekonomian PDRB	55
B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan	59
1. Pertumbuhan menurut Kategori	59
2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota	62
C. PDRB Per Kapita	64

D. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB.....	65
E. Indeks Perkembangan Kategori	67
F. Perbandingan Nilai PDRB Antarkabupaten/kota	69
G. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi	73
V. PDRB Menurut Pengeluaran	77
A. Struktur PDRB Pengeluaran	81
1. Konsumsi Rumah Tangga	81
2. Konsumsi Pemerintah	83
3. Investasi	83
4. Ekspor dan Impor	85
B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran	86
VI. Potensi dan Kualitas Indikator Pertumbuhan PDRB	89
A. Perkembangan Indikator Utama Ekonomi DIY	91
1. Pertumbuhan Ekonomi	91
2. Pengurangan Angka Pengangguran	94
3. Pengurangan Kemiskinan	95
B. Posisi dan Kualitas Pertumbuhan Kabupaten/Kota	96
1. Sebaran Pertumbuhan	96
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan	98
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM	99
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran	100
5. Potensi Sektorial Kabupaten/Kota	101
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan	104
1. Angka Beban Tanggungan (<i>Dependency Ratio/DR</i>)	104
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	106
3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	107
4. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)	109
5. Produktivitas Tenaga Kerja	111
D. Kemiskinan dan Ketimpangan	114
1. Kemiskinan	115
2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	117
E. Disparitas antar Kabupaten/Kota	119

Daftar Isi

1. Indeks Ketimpangan Regional	119
2. Disparitas Sektoral (<i>Shift Share Analysis</i>)	120
VII. Kesimpulan dan Rekomendasi	127
A. Kesimpulan	129
B. Rekomendasi	133
Daftar Pustaka	135
Lampiran	139

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.	Contoh Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA 1968 dan SNA 2008	32
Tabel 3.2.	Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 dan 2010	34
Tabel 3.3.	Perbandingan Klasifikasi PDB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	35
Tabel 4.1.	Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2013 – 2017	56
Tabel 4.2.	Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori, Rata-rata Pertumbuhan per Tahun, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2017 di DIY (persen), 2013-2017.....	60
Tabel 4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun, dan Andil Pertumbuhan 2017 di DIY (persen), 2013-2017	63
Tabel 4.4.	Perkembangan PDRB Per Kapita DIY, 2011 – 2015	65
Tabel 4.5.	Indeks Perkembangan PDRB DIY menurut Kategori, 2013-2017 (2010=100)	68
Tabel 4.6.	Nilai PDRB Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2013 – 2017	69
Tabel 4.7.	Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2017****)	71
Tabel 4.8.	Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di DIY (persen), 2015, 2016, 2017	72
Tabel 4.9.	Nilai PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2013 - 2017	73
Tabel 4.10.	Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2017	74
Tabel 5.1.	Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2013–2017	81
Tabel 5.2.	Struktur PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2013 – 2017.....	82
Tabel 5.3.	Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2013–2017.....	85
Tabel 5.4.	Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2013–2017..	87

Daftar Isi

Tabel 6.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Penurunan Pengangguran di DIY (persen), 2013-2017	101
Tabel 6.2.	Pangsa dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota dan DIY Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017	102
Tabel 6.3.	Identifikasi Kategori Potensial Perekonomian Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY (persen), 2013-2017	103
Tabel 6.4.	TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2017 *)	109
Tabel 6.5.	Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY (persen), 2013-2017	110
Tabel 6.6.	Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2013-2017	112
Tabel 6.7.	Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2013 – 2017	119
Tabel 6.8.	Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010-2017	121
Tabel 6.9.	Proportional Shift (PS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010-2017	123
Tabel 6.10.	Different Shift (DS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010-2017	124
Tabel 6.11.	Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2010-2017	125
Tabel 6.12.	Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2010-2017	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan DIY (persen), 2011-2016	3
Gambar 1.2. Perkembangan Laju Inflasi Nasional dan Kota Yogyakarta (persen), 2011-2017	3
Gambar 3.1. Kerangka Pikir Analisis	33
Gambar 3.2. Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita	38
Gambar 3.3. Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja	41
Gambar 3.4. Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan	45
Gambar 3.5. Kurva Lorenz	47
Gambar 4.1. Produk Domestik Regional Bruto DIY (triliun rupiah), 2013-2017	55
Gambar 4.2. Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2013- 2017	58
Gambar 4.3. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2017	61
Gambar 4.4. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2015- 2017	62
Gambar 4.5. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB DIY (persen), 2013-2017	66
Gambar 4.6. Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah), 2013 - 2017	70
Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY (persen), 2013-2017	82
Gambar 6.1. Pertumbuhan Kategori-Kategori dengan Pangsa Terbesar dalam PDRB DIY (persen), 2013-2017	92
Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran (persen) 2013-2017	93
Gambar 6.3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY (persen), 2013-2017 (Maret)	95
Gambar 6.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di DIY dan Nasional (persen), 2013-2017	96
Gambar 6.5. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2013	97
Gambar 6.6. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2017	97

Gambar 6.7.	Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di DIY, 2013-2017	98
Gambar 6.8.	Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota di DIY, 2013-2017	99
Gambar 6.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di DIY (persen), 2013-2017	100
Gambar 6.10.	Angka Beban Tanggungan Penduduk Kabupaten/Kota dan DIY, 2010-2017	105
Gambar 6.11.	Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah (persen), 2013-2017	106
Gambar 6.12.	TKK dan TPT Penduduk DIY (persen), 2013-2017	108
Gambar 6.13.	Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2013	113
Gambar 6.14.	Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2017	113
Gambar 6.15.	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2013 – 2017	115
Gambar 6.16.	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di DIY, 2013 – 2017	117
Gambar 6.17.	Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas September 2017	119
Gambar 6.18.	Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY (persen), 2013–2017.....	119
Gambar 6.19.	Indeks Williamson DIY, 2013-2017	120

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Manfaat
- F. Lokasi Kegiatan
- G. Sumber Pendanaan
- H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung
- I. Rencana Kerja
- J. Lingkup Pekerjaan

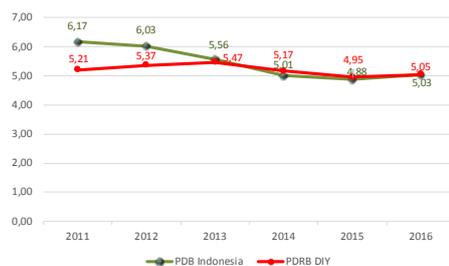


BAB I PENDAHULUAN

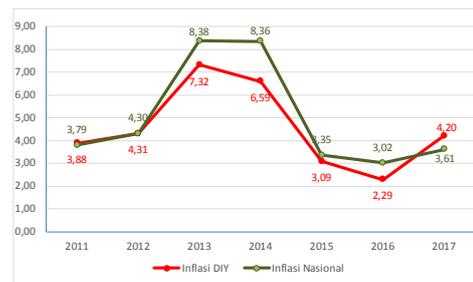
A. Latar Belakang

Selama periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, perekonomian mengalami pertumbuhan yang kurang menggembirakan karena hingga 2015 tren perkembangannya menurun. Baru di tahun 2016 geliat pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan arah meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibanding nasional dalam kurun waktu 2012-2016 terlihat memiliki tren lebih baik (Gambar 1). Untuk itu di tahun 2017 pemerintah memiliki keyakinan bahwa pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan meneruskan tren pertumbuhan yang terus meningkat.

Gambar 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan DIY,
2011-2016 (persen)



Gambar 1.2.
Perkembangan Laju Inflasi Nasional dan
Kota Yogyakarta, 2011-2017 (persen)



Tingkat pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan perubahan harga konsumen atau inflasi menjadi tolok ukur stabilitas harga-harga barang dan jasa berpengaruh besar pada perubahan aktivitas berbagai bidang sektor ekonomi. Selama kurun waktu 2011-2017 perkembangan inflasi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi naik dan turun. Periode 2011-2013 inflasi bergerak terus meningkat, namun setelah itu angka inflasi terus bergerak turun hingga hanya 2,29 persen di tahun 2016, dan baru pada tren meningkat di tahun 2017 dengan angka inflasi 4,20 persen (Gambar 2). Sejak tujuh tahun terakhir untuk pertama kalinya inflasi Kota Yogyakarta berada di atas angka inflasi nasional. Kenaikan inflasi merupakan cerminan adanya pergerakan dan peningkatan permintaan di pasar yang lebih tinggi dari ketersediaan sisi penawaran. Adanya peningkatan inflasi yang terjadi di 2017 secara global adalah sinyal positif bahwa konsumsi masyarakat semakin menguat.

Kinerja perekonomian secara makro membaik di antaranya bila pertumbuhan ekonomi meningkat, daya beli masyarakat naik, inflasi menurun dan terkendali, dan nilai tukar rupiah menguat. Namun inflasi yang rendah belum tentu mencerminkan perekonomian yang kondusif karena bisa jadi kondisi ekonomi sedang lesu dan geliat ekonomi sangat lemah. Oleh karena itu agar perekonomian bisa tumbuh dengan baik maka

fluktuasi inflasi perlu dijaga untuk mendorong perekonomian tumbuh sehat. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2017 fluktuasi inflasi di Kota Yogyakarta lebih terjaga dibanding dengan angka inflasi nasional. Meskipun demikian di tahun 2016 menurut para pengamat ekonomi sedikit meresahkan karena terus melambat sehingga dapat mengancam aktivitas ekonomi.

Indikator makro ekonomi lain, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS relatif terkendali. Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara umum cenderung stabil sepanjang tahun 2017, meskipun nilai tukar rupiah sedikit terdepresiasi. Berbeda dengan tahun 2016 rupiah terapresiasi alias menguat 2,25 persen terhadap dolar AS. Menurut Gubernur BI, Agus Martowardojo, hingga 21 Desember 2017 rupiah terdepresiasi 0,78 persen (Kompas, 28 Desember 2017).

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah sudah seharusnya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai lebih berkualitas bila adanya peningkatan pemerataan distribusi pendapatan kepada penduduknya. Rasio gini pengeluaran per kapita digunakan sebagai indikator pendekatan pengukuran distribusi pendapatan penduduk. Rasio gini DIY tergolong tinggi dibanding dengan provinsi-provinsi lain meskipun masih di level moderat. Bahkan, pada kondisi September 2017 rasio gini DIY sebesar 0,44 menjadi yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Dilihat perkembangan rasio gini DIY selama periode 2011-2017 nilainya bertengger di sekitar angka 0,42 hingga 0,44. Hal ini mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk tergolong tinggi. Hal ini menjadikan permasalahan distribusi pendapatan masih menjadi masalah yang serius bagi pembangunan ekonomi di DIY.

Secara spasial, kondisi perekonomian wilayah di kelima kabupaten/kota DIY memang beragam. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tumbuh sebagai daerah perkotaan yang memiliki sarana dan prasarana ekonomi serta ragam sektor yang lengkap dibanding tiga kabupaten lainnya, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Oleh karena itu sangat tepat bila landasan tonggak pembangunan masa depan bergeser dengan menempatkan megaprojek di ketiga wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah yang hingga tahun 2016 masih terlihat tinggi meskipun masih dalam skala ketimpangan sedang. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota di DIY yang menggunakan ukuran Indeks Williamson perkembangannya cenderung menurun dari 0,476 tahun 2011 menjadi 0,466 di tahun 2016. Untuk itu pengurangan ketimpangan wilayah juga seharusnya menjadi prioritas penanganan permasalahan dalam pembangunan ekonomi di DIY.

Permasalahan kemiskinan penduduk juga masih menjadi permasalahan pelik bagi pemerataan pembangunan di DIY. Sebenarnya perkembangan persentase kemiskinan dari tahun ke tahun sudah menunjukkan adanya tren penurunan. Namun yang menjadi persoalan adalah di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa persentase penduduk miskin DIY masih relatif lebih tinggi. Untuk itu masih perlu menggali informasi yang lebih akurat untuk menemukan karakteristik dan kantong-kantong kemiskinan sehingga selanjutnya dapat memformulasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

Untuk itu berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY dan indikator-indikator ekonomi sosial lain seperti yang telah diuraikan di atas perlu untuk menganalisis potensi ekonomi DIY yang dikaitkan dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi dengan mengoptimalkan peran potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Melalui penyusunan publikasi Analisis PDRB di antaranya diharapkan memberikan manfaat bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di DIY. Selain itu, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dalam analisis PDRB diharapkan searah dengan kerangka penyusunan perencanaan dan tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang memasuki awal periode pelaksanaan pembangunan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pmbangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Kepala BPS Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Standar Belanja;

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA DIY Nomor: .../DPA/2017.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY 2013-2017 adalah memperoleh data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di DIY.

2. Tujuan

Tujuan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Mengetahui struktur dan dinamika ekonomi DIY 2013-2017 berdasarkan PDRB tahun dasar 2010;
2. Menyediakan angka pertumbuhan ekonomi dan indeks turunan PDRB DIY lainnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-DIY periode 2013-2017;
3. Menyediakan analisis pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan capaian indikator makro ekonomi lainnya;
4. Menyediakan hasil analisis sektoral PDRB DIY dan antarwilayah kabupaten/kota periode 2012-2016 menurut kategori dan subkategori lapangan usaha;
5. Menyediakan kesimpulan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan akurasi perencanaan serta validitas implementasi program pembangunan..

D. Sasaran

Data PDRB DIY tahun 2013-2017 menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan dilengkapi data pendukung lain yang terkait, serta indikator ekonomi sosial lainnya.

E. Manfaat

Manfaat hasil Penyusunan Analisis PDRB DIY 2013–2017 adalah sebagai bahan evaluasi program pembangunan dan rekomendasi yang disusun dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan sasaran pembangunan daerah termasuk di kabupaten/kota se-D.I. Yogyakarta ke depan.

F. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengumpulan data, penghitungan, dan analisis adalah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017 seluruhnya dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2018 pada Balai Statistik Daerah Bappeda D.I. Yogyakarta.

H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung

Dalam pelaksanaan Analisis PDRB DIY 2013-2017 ini menggunakan tenaga ahli dan pendukung yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah: 7 orang terdiri dari unsur pimpinan di Bappeda dan BSD DIY dan BPS Provinsi DIY;
2. Tim Pelaksana: 84 orang dari BPS Provinsi DIY dan BPS Kabupaten/Kota se-DIY yang berpendidikan S3, S2, S1/D4, dan SLTA.
3. Konsultan Ahli: 1 orang dari Dosen/Fungsional Tertentu/Eselon II/III.

I. Rencana Kerja

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan Analisis PDRB DIY 2013-2017, urutannya sebagai berikut:

1. Pemrosesan berkas-berkas Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);
2. Penyusunan metodologi pengumpulan data dan analisis;
3. Pengumpulan data sekunder;
4. Kompilasi dan pengolahan data;
5. Penghitungan indikator;
6. Analisis dan penyajian;
7. Penyerahan draft publikasi.

J. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan penyusunan Analisis PDRB DIY 2013-2017 Tahun Anggaran 2018, meliputi:

1. Menyediakan angka PDRB DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY 2013-2017 menurut lapangan usaha dan penggunaan;
2. Menganalisis gambaran dan dinamika struktur perekonomian daerah serta besarnya peranan masing-masing kategori dan subkategori (kelompok) lapangan usaha;
3. Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi DIY menurut lapangan usaha dan juga penggunaan;
4. Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi kabupaten/kota di DIY;
5. Menganalisis tingkat inflasi kategori lapangan usaha atas dasar harga produsen;
6. Menganalisis PDRB perkapita, disparitas pendapatan, dan disparitas regional;

7. Menganalisis tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk di DIY, wilayah perkotaan dan pedesaan termasuk pengangguran menurut tingkat pendidikan;
8. Menganalisis sektor usaha ekonomi unggulan di kabupaten/kota.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pembangunan
- B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- C. Kualitas Pertumbuhan
- D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Konsepsi Pembangunan

Konsep pembangunan di tahun 1970-an yang cukup populer adalah yang didefinisikan oleh Portes (1970), yang mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Situasi lingkungan juga mempengaruhi konsepsi pembangunan yang muncul. Di era tahun 1990-an, Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Konsepsi mengenai pembangunan juga dikemukakan Alexander (1994), yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Menurut Rogers (2011) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, maka makna terpenting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

2. Pembangunan Kewilayahan

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu negara maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga mempunyai kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Pembahasan pembangunan ekonomi secara nasional dititikberatkan pada analisis ekonomi makro, sementara pembahasan pembangunan ekonomi di tingkat wilayah membahas kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ke berbagai lokasi dalam suatu ruang ekonomi (*economic space*) tertentu (Sukirno, 1976).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan atau kesempatan kerja baru serta untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Blakely, 1989 dalam Mudrajat Kuncoro, 2004). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang No 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi lain dari kedua UU tersebut yaitu adanya bagian pemberian kewenangan urusan, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Terkait dengan urusan pembiayaan, makna terpenting adalah daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber daya potensi ekonomi serta sumber daya alamnya tanpa adanya intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah sehingga kemajuan daerah lebih cepat tercapai.

Pembangunan suatu daerah juga mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Hoover dan Fisher (Nurcahyani, 2001) menyebutkan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi regional, meliputi: pertama, ekonomi subsisten. Dalam tahapan ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-hari. Kehidupan penduduk sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian dan pengumpulan hasil-hasil alamnya.

Kedua, pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal. Pada tahap kedua ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana maupun sarana transportasi yang mengakibatkan terjadinya beberapa spesialisasi pada lokasilokasi tertentu. Di kalangan masyarakat petani timbul spesialisasi baru di luar pertanian dimana hasil produksi, bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian bersangkutan.

Ketiga, perdagangan antardaerah. Hal ini terjadi karena telah terdapat perbaikan dalam bidang transportasi dan terjadi perubahan-perubahan di sektor kegiatan dari arah produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititikberatkan ke intensifikasi. Hasil sampingannya juga dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk kegiatan industri pedesaan.

Keempat, industrialisasi. Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi dari peningkatan produksi pertanian dan produksi ekstraktif lainnya, daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja yaitu melalui industrialisasi yang lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri-industri manufaktur serta pertambangan dan galian.

Kelima, spesialisasi daerah. Dalam tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi kegiatan, baik barang dan jasa-jasa untuk keperluan penjualan ke daerah lain yang termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus lainnya.

Keenam, aliran faktor produksi antardaerah. Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya meningkatkan tingkat mobilisasi faktor produksi antardaerah.

Di awal era otonomi daerah, permasalahan pokok pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Bila dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan kurang akurat maka permasalahan ini berlarut-larut dan menyebabkan kemajuan perekonomian daerah berjalan di tempat. Energi sumber daya dan pembiayaan pembangunan yang seharusnya sudah dimanfaatkan untuk implementasi lanjut bagi pengembangan potensi daerah masih berkuat untuk menentukan skala prioritas kebijakan.

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely tersebut di atas pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur besaran nilai tambahnya yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Boediono (1999, 1), faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan kerja di daerah.

3. Pembangunan Manusia

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

Bank Dunia dalam terbitan laporannya menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah...memperbaiki kualitas kehidupan” (*World Development Report-World Bank, 1991*). Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan istitusi-institusi nasional.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme – UNDP*). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- **Umur panjang dan hidup sehat** (*a long and healthy life*)
- **Pengetahuan** (*knowledge*)
- **Standar hidup layak** (*decent standard of living*)

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Definisi PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

2. Pendekatan Penghitungan

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Pengangkutan dan Pergudangan; ; I. Pengangkutan dan Komunikasi; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, dan ekspor neto.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari **ketiga pendekatan** tersebut **secara teoritis akan sama**. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar **harga pasar** karena mencakup **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

3. Metode Penghitungan

a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah

metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan). Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

Ekstrapolasi

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2010. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2010, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

4. Turunan PDRB

a. PDRB atas dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah/ wilayah, termasuk penyusutan dan pajak tak langsung neto.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

c. PDRN atas dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRN atas dasar biaya faktor disebut sebagai **Pendapatan Regional**.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan **jumlah penduduk pada pertengahan tahun**. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil).

5. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan

ekonomi sektoral dibagi dalam 9 (sembilan) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 9 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam **Sektor Primer**. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam **Sektor Sekunder**. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai **Sektor Tersier**.

6. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut penggunaan terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun. Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil pengolahan SUSENAS BPS Provinsi DIY. Sementara untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi (harga konsumen) diperoleh dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS Provinsi DIY.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3 dari BPS. Apabila diteliti lebih jauh maka pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya. Subsidi tidak dimasukkan, karena pengeluarannya merupakan transfer.

Kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah dan tidak termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTDB dibedakan atas pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi, pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan/kendaraan, dan pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTDB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing pelaku usaha (9 sektor). Sementara kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang (*commodity flows*).

Perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke region dan barang modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/ bangunan. Sementara perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga konstan tahun 2010 diperoleh dengan cara mendeflate/ membagi nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga berlaku dengan IHPB barang impor, dan dengan IHPB sektor industri untuk barang modal antar pulau. Data mengenai investasi diperoleh dari BI Yogyakarta dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Pemda DIY.

Pengertian inventori adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Perubahan inventori/stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai inventori/ stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai inventori/stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan).

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008

Selama satu dekade terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan regional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional dan regional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar tersebut dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *2008 System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Table* (SUT).

Implikasi dari perubahan harga tahun dasar memberikan dampak, antara lain: meningkatkan nominal PDB/PDRB yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara/wilayah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi, dan pergeseran struktur perekonomian. Dampak lain adalah merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi, dan juga berdampak pada perubahan input data untuk *modelling* dan *forecasting*.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut: secara umum perekonomian Indonesia relatif stabil; selama 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi perubahan struktur ekonomi terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5

(lima) atau 10 (sepuluh) tahun; teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008; tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan indeks harga produsen (*producer price index/PPI*); dan tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB/PDRB.

8. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

Laju inflasi/deflasi adalah persentase perubahan indeks setiap bulan diperoleh dengan cara mengurangkan indeks (IHK subkelompok/kelompok/umum) suatu bulan dengan indeks (IHK subkelompok/kelompok/ umum) bulan sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan indeks (IHK subkelompok/kelompok/umum) bulan sebelumnya dan dikalikan 100.

C. Potensi dan Kualitas Pertumbuhan PDRB

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah terlalu bermakna. Namun meraih keduanya secara bersamaan bukanlah perkara mudah. Para ekonom pun punya pandangan berbeda mengenai hal ini. Mengorbankan pemerataan seringkali diperlukan guna meraih pertumbuhan, kata para ekonom penganut aliran *capital fundamentalism*. Pertumbuhan hanya bisa berlangsung ketika ketimpangan justru eksis dalam masyarakat, terutama pada fase awal pembangunan, kata ekonom Simon Kuznets, 60 tahun lampau.

Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitman Rostow (1916-1979) yang juga diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru telah menimbulkan permasalahan kesenjangan distribusi pendapatan yang menganga. Di samping itu tahapan pembangunan juga telah menimbulkan kesenjangan sosial dan afiliasi politik yang berujung terjadinya krisis ekonomi dan sosial di tahun 1998.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan

dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (stagnasi). Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Teori pertumbuhan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut Sukirno (1997), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Todaro (2015) mengatakan, ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pendapatan yang diinvestasikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) yang pada akhirnya akan diinvestasikan lagi dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Kondisi demikian akan memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Dimana peningkatan tenaga kerja terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan kerja secara umum. Sedangkan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal secara lebih produktif.

2. Kesenjangan (Disparitas) Antarwilayah

Menurut Arsyad (1997), penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan kebebasan untuk memilih. Uppal dkk, (1986), mengatakan bahwa penurunan kesenjangan antar daerah dapat disebabkan karena adanya alokasi dana pembangunan, antar lain seperti misalnya transfer pemerintah pusat melalui berbagai grant dan pengeluaran pemerintah pusat di masing-masing provinsi melalui daftar isian proyek (DIP).

Pendiri ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo (dalam Lipsey, 1985), sangat memperhatikan distribusi pendapatan di antara tiga kelas sosial yang besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka menentukan tiga faktor produksi : tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas dalam masyarakat. Smith dan Ricardo tertarik pada apa yang menentukan pendapatan masing-masing kelompok dari pendapatan nasional, dan bagaimana suatu pertumbuhan dalam pendapatan nasional mempengaruhi distribusi pendapatan ini. Teori ini meramalkan bahwa kalau masyarakat mengalami perkembangan tuan tanah akan menjadi makmur dan kapitalis akan menjadi semakin melarat.

Disparitas antarwilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada pula yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor infrastruktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah kepada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan wilayah yang seimbang adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/daerah belakang sehingga taraf hidupnya sejajar atau setara dengan taraf hidup penduduk di wilayah perkotaan/maju melalui pembangunan sektor pertanian, industri, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Alam, 2006).

Menurut Yadiansyah (2007), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Indonesia adalah, yang pertama: konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terpusat di Pulau Jawa, sehingga membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi provinsi di luar Jawa, khususnya Indonesia Bagian Timur. Kedua, alokasi investasi. Pola distribusi nilai tambah industri antardaerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Terpusatnya investasi di Pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa (Tambunan, 1996).

Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarpulau. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antardaerah. Keempat, yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran "klasik" sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA-nya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik di banding daerah di luar Jawa yang miskin SDA, tetapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi. Kelima, adalah perbedaan kondisi demografis antardaerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan antardaerah. Ketidاكلancaran ini disebabkan terutama oleh keterbatasan sarana prasarana transportasi dan komunikasi, perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input antara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa jadi terganggu.

3. Kesenjangan (Disparitas) Pendapatan dan Kemiskinan

Menurut Ray (1998) ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antargolongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antardaerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antaradaerah perkotaan dan daerah pedesaan bisa dilihat dari segi perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari dua

indikator, yaitu: perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita di daerah perkotaan dan pedesaan dan disparitas dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan (perbedaan dalam pendapatan rata-rata antar kedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antardaerah adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antardaerah.

Tambunan (2001) mengatakan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis “*development gap*” atau “disparitas” antar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, yaitu:

- a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Konsumsi rumah tangga per kapita.

Asumsi yang digunakan untuk menganalisis konsumsi rumah tangga per kapita adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran tidak berubah.

- c. *Human Development Index*.

Asumsi semakin baik pembangunan di wilayah, maka semakin tinggi HDInya.

- d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB.

Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

- e. Struktur Fiskal.

Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, dilihat dari pendapatan riil perkapita yang tinggi, penerimaan pemerintah daerah tersebut (PAD asli) juga tinggi.

Selain itu, menurut Tambunan (2001), distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan akan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pengsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

4. Ketimpangan Antarwilayah dengan Indeks Williamson

Untuk memahami konvergensi dan divergensi dalam perkembangan suatu wilayah, Williamson mengamati tingkat kesenjangan diberbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka

akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan data PDB perkapita serta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat perkembangan ekonomi (berdasarkan tingkat PDB) negara-negara tersebut dari Kuznets. Berdasarkan penggabungan kedua perhitungan tersebut, Williamson menyatakan bahwa ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional. Tingkat ketidaksamaan regional adalah sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Dapat dikatakan juga bahwa pada waktu tingkat perkembangan perekonomian suatu negara masih rendah, maka tingkat kesenjangan pun semakin rendah (nilai CV rendah). Nilai CV ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan ekonomi negara semakin tinggi maka nilai CV-nya semakin rendah. Bagi negara-negara yang telah maju ternyata nilai CV-nya rendah, seperti negara-negara yang sangat belum berkembang. Apabila hubungan antara Indeks Williamson dengan perkembangan ekonomi digambarkan dengan grafik, maka grafik tersebut akan berbentuk huruf U terbalik (Williamson, 1975).

Menurut Williamson (1975), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antarwilayah, yaitu :

a. *Labor Migration* (Perpindahan Tenaga Kerja)

Perpindahan tenaga kerja antar daerah mungkin sangat selektif karena baik oleh hambatan keuangan dari pada tingkat pendapatan yang rendah atau kelambanan tradisional di masyarakat pedesaan, dan daerah non industri yang miskin. Orang-orang yang pindah mungkin ditandai sebagai orang-orang yang bersemangat dan berjiwa *entrepreneur*, terdidik dan mempunyai keterampilan dan dalam unsur-unsur produktif. Perpindahan penduduk yang selektif semacam ini akan memberikan penekanan terhadap adanya tendensi kearah terpercarnya pendapatan regional, tingkat partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin. Lebih dari itu, *human capital* yang berharga cenderung mengalir keluar dari daerah miskin ke daerah kaya yang membuat sumber-sumber regional perkapita yang dimiliki akan lebih pincang dan ketidaksamaan akan lebih besar.

b. *Capital Migration* (Perpindahan Modal)

Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. Faedah eksternal ekonomis dan faedah umum yang berasal dari aglomerasi dari proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal dari daerah miskin, hal ini cenderung memperjelas ketidaksamaan regional dan memperluas perpecahan antar daerah kaya dan daerah miskin. Resiko yang tinggi, kekurangan kemampuan *entrepreneur*, dan pasar modal yang belum berkembang boleh jadi akan menekan kegiatan investasi dan akumulasi modal di daerah miskin.

c. *Central Government Policy* (Kebijakan Pemerintah Pusat)

Pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menimbulkan peningkatan ketidaksamaan regional. Jika keadaan politik di wilayah yang miskin kurang memuaskan maka pemerintah pusat dapat saja mengalihkan investasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar. Tetapi apabila pemerintah pusat cenderung berlaku adil maka kebijaksanaannya dapat mengurangi kesenjangan ini. Dengan memperhatikan pola investasi regional pemerintah pusat, hendaknya jelas bahwa setelah pembangunan berlangsung, maka investasi pemerintah diharapkan semakin berkurang, dan dalam banyak hal investasi pemerintah akan dibiayai oleh investasi sebelumnya.

d. *Interregional Linkages* (Keterkaitan antar Daerah)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada permulaan pembangunan mungkin efek menyebar dari perubahan teknologi dan perubahan sosial serta pengandaan pendapatan adalah kecil., tetapi selanjutnya diharapkan pada saat pembangunan telah berjalan, peningkatan disuatu daerah akan memberikan efek yang menyebar ke daerah di sekitarnya.

D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Kependudukan

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Dalam proses transisi demografi, periode perubahan dibagi atas empat tahap. *Tahap Pertama*, adalah periode dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sama-sama tinggi. Pada *tahap kedua*, karena adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan, tingkat kematian menurun. Namun penurunan yang terjadi pada tingkat kematian ini tidak disertai dengan penurunan tingkat kelahiran, akibatnya pada tahap ini tingkat pertumbuhan

penduduk sangat tinggi. Pada *tahap ketiga*, penurunan tingkat kematian diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berpikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada tahap akhir proses transisi ini baik tingkat kelahiran maupun tingkat kematian sudah tidak banyak berubah lagi. Angka kelahiran dan kematian yang secara alamiah memang harus terjadi. Akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah (Susanti, 1995).

Apabila proses transisi demografi dikaitkan dengan proses peningkatan pendapatan perkapita, maka pada awal proses pembangunan peningkatan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan penurunan angka kematian yang begitu cepat daripada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kematian yang cepat ini disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat ini juga akan menyebabkan penerimaan pajak pemerintah meningkat, dan hal ini tentu saja memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, akibat lain dari penurunan angka kematian yang lebih cepat daripada penurunan angka kelahiran adalah tingginya jumlah penduduk usia muda dan usia tua pada struktur penduduk menurut umur, akibat dari hal ini adalah jumlah penduduk yang hidupnya ditanggung oleh penduduk usia kerja menjadi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita, perubahan pada aspek sosial-ekonomi dan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kelahiran juga akan turun dengan cepat. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk menurun dan dengan sendirinya jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja akan menurun.

2. Ketenagakerjaan

Menurut konsep BPS, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja (contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat

penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen.

Menurut Tambunan (1996), tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun yang kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Angkatan kerja adalah penduduk yang berdasarkan usia sudah bisa bekerja. Menurut Subri (2003), tenaga kerja adalah usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan itu dapat berupa lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja dan lebih besarnya permintaan di banding penawaran tenaga kerja.

Sedangkan menurut Ananta (1990), tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun ke atas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang dan jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Thomas Robert Malthus dalam Albert WS Kusen (2013), menyebutkan bahwa ukuran pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika Pendapatan Nasional Bruto (PNB) potensialnya meningkat. Sektor yang paling dominan adalah sektor industri dan pertanian. Jika output di kedua sektor itu ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa di tingkatkan. Menurut Thomas Robert Malthus ada dua faktor yang sangat menentukan pertumbuhan yaitu faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi; dan juga faktor nonekonomis seperti keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Tetapi, diantara faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor akumulasi modal.

Meski relasi antara pertumbuhan dan ketimpangan telah memicu debat panjang para ahli, namun tetap ada keinginan kuat untuk "mengawinkan" keduanya. Oleh karena kompleksitasnya permasalahan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ini, dalam dua dekade terakhir telah memunculkan sejumlah gagasan konseptual agar implikasi pembangunan lebih baik, mulai dari *redistribution with growth, the quality of growth*,

broad-based growth, pro-poor growth, hingga inclusive growth. Analisis PDRB ini hanya berfokus membahas tentang konsep kualitas pertumbuhan (*the quality of growth*).

BAB 3

METODOLOGI

- A. Sumber Data
- B. Kerangka Pikir Analisis
- C. Indikator Penyajian PDRB
- D. Analisis Potensi dan Kualitas Indikator
Pertumbuhan PDRB



BAB III METODOLOGI

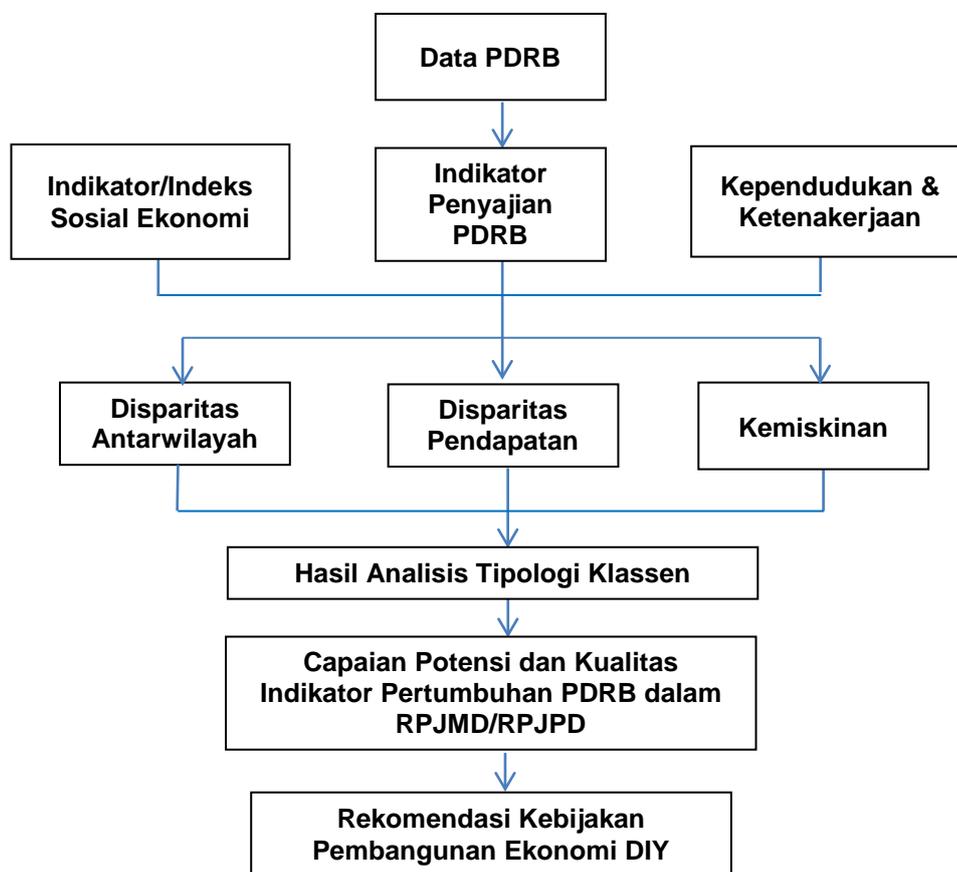
A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Analisis PDRB 2013-2017 ini bersumber dari data PDRB DIY dan PDRB Kabupaten/Kota yang merupakan hasil pengolahan data dari kegiatan Survei Khusus Neraca Produksi dan Neraca Konsumsi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), survei dan kompilasi data keuangan dari Pemerintah Daerah DIY maupun kabupaten/kota, kompilasi data keuangan dari Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, Survei Statistik Harga Konsumen, Survei Statistik Niaga dan Jasa, Survei Statistik Pertanian, Survei Industri Besar Sedang (IBS), Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK), Angka Kemiskinan 2010-2017, dan data-data dari publikasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka (DDA DIY).

B. Kerangka Pikir Analisis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan sumber data, maka kerangka pikir analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Analisis



C. Indikator Penyajian PDRB

Data PDRB yang digunakan dalam buku Analisis PDRB Provinsi DIY ini terdiri dari PDRB menurut sektor/ lapangan usaha dan menurut penggunaan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Nilai PDRB juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu distribusi persentase (kontribusi/peran), PDRB per kapita, indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks harga implisit.

1. Distribusi Persentase

Distribusi persentase diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor/penggunaan dengan total PDRB. Distribusi persentase mengindikasikan struktur PDRB menurut sektor atau menurut penggunaan.

$$Share (\%) = \frac{ntb \text{ sektor / penggunaan}}{PDRB_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.1)$$

2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_t}{\sum \text{penduduk}_t} \dots\dots\dots(3.2)$$

3. Indeks Perkembangan

Indeks perkembangan diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun dasarnya. Formulasi Indeks Perkembangan, sebagai berikut:

$$IP_t = \frac{PDRB_t - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\% \dots\dots\dots(3.3)$$

4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan)

Indeks berantai diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Apabila indeks berantai dikurangi dengan 100, maka diperoleh **angka laju pertumbuhan**.

$$IB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.4)$$

5. Indeks Harga Implisit

Indeks harga implisit diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga di level produsen.

$$II_t = \frac{PDRB_{adhb}_t}{PDRB_{adhk}_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.5)$$

6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi Harga Produsen)

Selanjutnya, apabila dari indeks harga implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga suatu tahun terhadap tahun sebelumnya (laju inflasi).

$$IIB_t = \frac{II_t - II_{t-1}}{II_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.6)$$

7. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi/Deflasi

Metode yang digunakan dalam penghitungan IHK adalah *Formula Laspeyres* yang telah dimodifikasi, yaitu:

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100 \dots\dots\dots(3.7)$$

Keterangan:

- IHK_n = Indeks Harga Konsumen bulan ke-n
- P_{ni} = Harga jenis barang/jasa i pada bulan ke (n)
- P_{(n-1)i} = Harga jenis barang/jasa i pada bulan ke (n-1)
- $\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$ = Relatif Harga (RH) jenis barang/jasa i pada bulan ke (n)
- P_(n-1) · Q_{0i} = Nilai Konsumsi (NK) jenis barang/jasa i pada bulan ke (n-1)
- P_{0i} · Q_{0i} = Nilai Konsumsi (NK) jenis barang/jasa i pada tahun dasar
- K = Jumlah jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas IHK.

Persentase (%) perubahan IHK (laju inflasi/deflasi) bulanan diperoleh dari:

$$\frac{I_n - I_{n-1}}{I_{n-1}} \times 100 \dots\dots\dots(3.8)$$

Keterangan:

- I_n = IHK bulan n
- I_{n-1} = IHK bulan n-1
- Inflasi jika nilainya > 0, dan
- Deflasi jika nilainya < 0.

Persentase perubahan IHK dalam satu tahun dihitung dengan menggunakan metode *point to point*, tetapi sebelum April 1998 menggunakan metode kumulatif bulanan.

D. Analisis Potensi dan Kualitas Pertumbuhan PDRB

1. Pertumbuhan, Rata-rata Pertumbuhan, dan Andil Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi mengacu pada fungsi produksi yang diperkenalkan oleh **Cobb-Douglass** (Mankiw, 2004), yaitu:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta \dots\dots\dots(3.9)$$

keterangan:

- Y_t = tingkat produksi (output) pada periode t
- T_t = tingkat teknologi pada periode t
- K_t = jumlah stok modal pada periode t
- L_t = jumlah tenaga kerja pada periode t
- α = produktivitas modal
- β = produktivitas tenaga kerja

Formula di atas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi berikut:

$$Y = f(T, K, L)$$

Dari rumusan fungsi produksi Cobb-Douglas tampak bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap teknologi, kapital, dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena peningkatan teknologi, kapital atau tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.10)$$

keterangan:

- LPE = Laju pertumbuhan ekonomi
- $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t
- $PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke (t-1)

Jika pertumbuhan ekonomi diamati dalam suatu periode waktu beberapa tahun, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dihitung dengan formula:

$$r = \left(\sqrt[n-1]{\left(\frac{PDRB_{t_n}}{PDRB_{t_0}} \right)} - 1 \right) \times 100 \dots\dots\dots(3.11)$$

keterangan:

- r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun
- n = Jumlah tahun periode (dihitung mulai dari 1 sampai dengan n)
- t_n = Tahun terakhir periode
- t_0 = Tahun awal periode

Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat baik dari sisi lapangan usaha, wilayah (kabupaten/kota), maupun penggunaan. Ukuran andil terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan formula berikut:

$$Andil_{it} = \frac{(LPE_{it} \times DP_{i(t-1)})}{100} \dots\dots\dots(3.12)$$

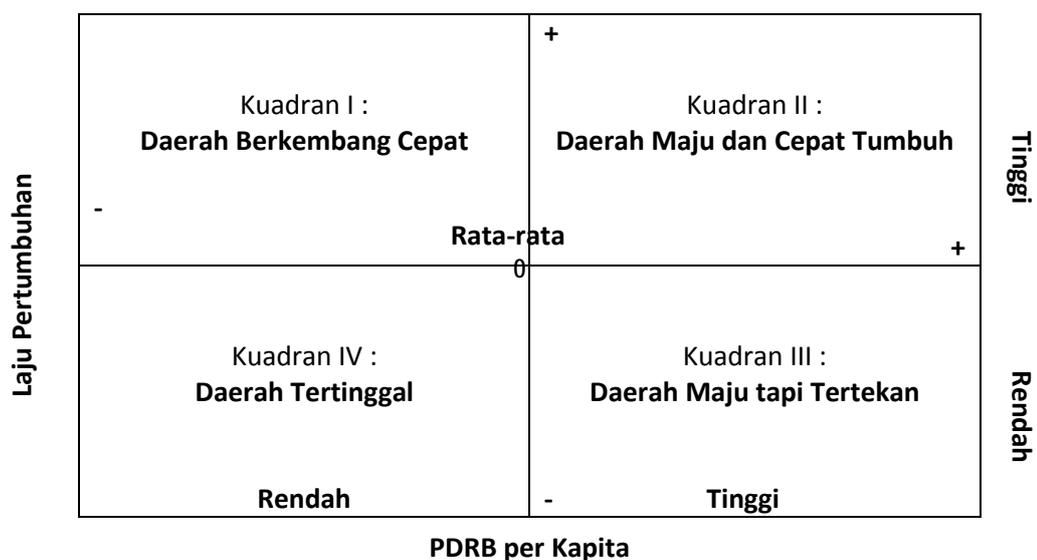
- $Andil_i$ = Andil sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap pertumbuhan ekonomi
- LPE_i = Laju pertumbuhan ekonomi sektor/ wilayah/ komponen ke-i
- $DP_{i(t-1)}$ = Distribusi persentase sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap total PDRB pada tahun sebelumnya
- i = 1, 2, ..., 17.
- t = tahun observasi

Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan secara relatif posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lainnya. Perbandingan absolut antar kabupaten/kota atau menurut Sjafrizal (1997) disebut sebagai **Tipologi Klassen** disajikan pada Gambar 3.2 dalam bentuk **"diagram empat kuadran"**, di mana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horisontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horisontal) digambarkan garis tegak lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horisontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran. Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah).

Apabila suatu kabupaten/kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan DIY. Apabila terletak di kuadran II, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata DIY. Suatu kabupaten/kota terletak di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita DIY, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan DIY. Selanjutnya dengan mudah dapat diinterpretasikan bahwa suatu titik di kuadran IV menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita DIY, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan DIY.

Kabupaten/kota di kuadran I disebut “daerah berkembang cepat”, menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya relatif masih rendah, sehingga Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkannya. Namun demikian, karena tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, kabupaten/kota tersebut masih berpeluang dipacu untuk mengejar daerah lain. Kabupaten/ kota yang terletak di kuadran II disebut “daerah maju dan cepat tumbuh” yang secara relatif menunjukkan daerah-daerah sudah maju perekonomiannya, dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-rata DIY. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran III merupakan “daerah maju tapi tertekan”, secara absolut sudah mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tingkat pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding dengan rata-rata DIY. Sementara kabupaten/kota yang digambarkan di kuadran IV disebut “daerah tertinggal”, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya.

Gambar 3.2
Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita



2. Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

a. Pendidikan Penduduk

Pendidikan mencerminkan kualitas pengetahuan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka kualitas pengetahuan dan ketrampilannya diasumsikan semakin baik. Pendidikan tertinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk.

b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha merupakan mata pencaharian penduduk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Kategori lapangan usaha mengacu pada lapangan usaha 9 (sembilan) sektor seperti yang digunakan dalam uraian PDRB tahun dasar 2000.

c. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio - DR*)

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{Jml\ Penduduk_{0-14} + Jml\ Penduduk_{65+}}{Jml\ Penduduk_{15-64}} \dots\dots\dots(3.13)$$

Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kesempatan memperoleh pekerjaan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD'45) pasal 27 ayat 2. Setiap penduduk yang mampu dan mau bekerja diharapkan akan memperoleh pekerjaan yang sesuai disertai dengan jaminan

perlindungan kerja yang manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh upah yang cukup untuk hidup layak. Namun harapan tersebut masih jauh dari kenyataan yang terjadi.

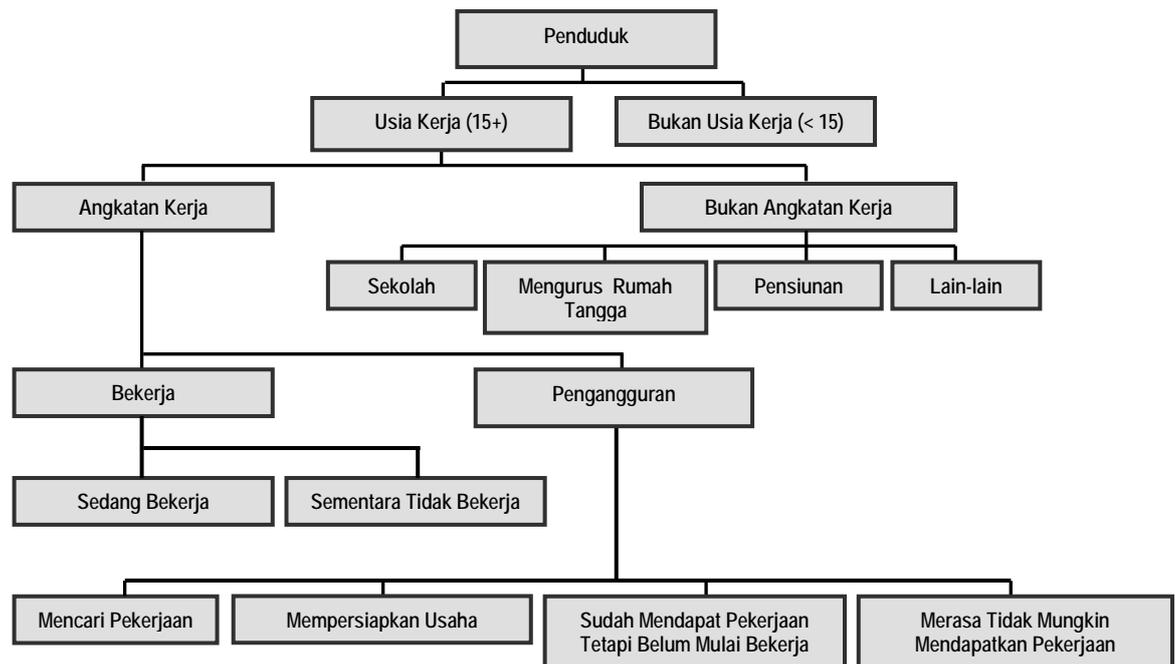
Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *the International Labor Organization (ILO)*, penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

Penduduk **bekerja** adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. **Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. **Pengangguran terbuka** adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep tersebut digambarkan dalam Gambar 3.3.

Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.
- **Penghasilan** mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.
- **Hari kerja** adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- **Jam kerja** adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.

Gambar 3.3
Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja



Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.14)$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

e. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Menurut Simanjutak (2001), kesempatan kerja adalah penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor. Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.15)$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah.

Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung **laju pertumbuhan kesempatan kerja (r_{KK})**, yaitu perbandingan antara selisih jumlah kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(3.16)$$

keterangan:

- B_t = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t
- B_{t-1} = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t-1

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran. Dalam analisis ini indikator pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(3.17)$$

g. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya.

Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Menurut Simanjutak (2001), Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi/ produk domestik bruto (regional bruto (PDB/PDRB). Dengan demikian elastisitas kesempatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{KK} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}} \quad \dots\dots\dots(3.18)$$

keterangan:

- E_{KK} = Elastisitas kesempatan kerja

- r_{KK} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja
- r_{PDRB} = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

h. Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_i = \frac{PDRB_i}{TK_i} \dots\dots\dots(3.19)$$

keterangan:

- PTK_i = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i
- $PDRB_i$ = PDRB sektor ke-i
- TK_i = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

3. Indikator Kemiskinan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai *“inability of the individual to meet basic needs”* (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Amartya Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *“the failure to have certain minimum capabilities”*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan **nilai standar kebutuhan minimum**, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut

digunakan sebagai **garis pembatas** untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. *Uppal (1985)* menyebutkan garis pembatas tersebut sebagai **garis kemiskinan (poverty line)** atau **batas kemiskinan (poverty treshold)**.

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara **2.100 kilo kalori per kapita per hari** dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. **Biaya** untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**. Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. **Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan** merupakan **indikator kemiskinan** yang sering digunakan dan biasa disebut **Head Count Index (HCI)**.

Kajian tentang kemiskinan tidak cukup hanya mempelajari jumlah dan persentase penduduk miskin saja yang diukur dari metode HCI. Salah satu kelemahan metode HCI adalah tidak memperhitungkan kedalaman kemiskinan serta ketimpangan sebaran pada kelompok miskin (*distribution among the poor*). Dua indikator berikut ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam melihat perubahan tingkat hidup penduduk miskin. Indikator tersebut adalah **Indeks Kedalaman Kemiskinan (poverty gap index atau P₁)** dan **Indeks Keparahan Kemiskinan (poverty severity index atau P₂)**.

Penurunan angka pada P₁ mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman dari insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan dari P₂ mengidentifikasi berkurangnya (membaiknya) ketimpangan di antara penduduk miskin.

Pada tahun 1994 **Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT)** memperkenalkan suatu rumusan yang mengandung tiga jenis indikator kemiskinan. Rumusan FGT inilah yang kemudian digunakan sebagai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, dengan formula sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = (I / N) \sum_{j=1}^Q \left(\frac{(Z - Y_j)}{Z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots(3.20)$$

Keterangan:

- P_α = Indeks kemiskinan (α = 0,1,2)
- N = Jumlah penduduk
- Z = Garis kemiskinan
- Y_j = Pengeluaran perkapita penduduk di bawah garis kemiskinan Z

Q = Banyaknya penduduk miskin

Pengeluaran penduduk miskin perkapita dapat langsung dihitung dari hasil SUSENAS yang menggambarkan perbedaan antara pengeluaran si miskin (*proxy* pendapatan) dengan garis kemiskinan. Perbedaan tersebut dinyatakan dengan :

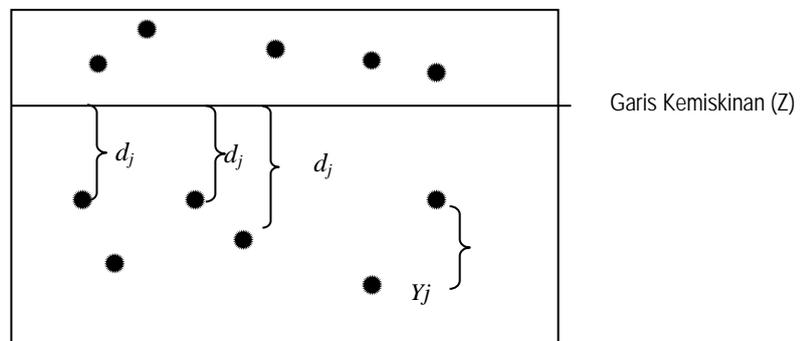
$$d_j = Z - Y_j \quad \dots\dots\dots(3.21)$$

bila persamaan ini dimasukkan ke dalam rumus FGT di atas, maka akan diperoleh :

$$P_\alpha = (1/N) \sum_{j=1}^Q \left(\frac{d_j}{Z} \right)^\alpha \quad \dots\dots\dots(3.22)$$

Keterangan: d_j/Z disebut **rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap ratio*)**.

Gambar 3.4
Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan



Gambar 3.4 adalah *plotting* pengeluaran per kapita (Y_j) dengan garis kemiskinan (Z). Jarak antara pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap batas kemiskinan ditunjukkan oleh setiap titik d_j yang terdistribusikan di bawah garis kemiskinan. **Golongan penduduk sekitar garis miskin** relatif lebih mudah ditanggulangi, tetapi **rentan terhadap perubahan harga**. Jika harga naik menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas, maka mereka yang berada di atas garis kemiskinan akan mudah jatuh ke dalam kategori penduduk miskin. Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke bawah, maka mereka akan masuk ke dalam kategori penduduk tidak miskin. Golongan penduduk seperti inilah yang dikenal sebagai ***the near non-poor*** yang sensitif terhadap perubahan harga.

Dari rumusan FGT diperoleh tiga macam indeks, yaitu :

- i. Jika $\alpha = 0$ maka $P_0 = Q/N$ rasio ini tidak lain adalah **Head Count Index**, dan bila dikalikan dengan 100 menjadi **persentase penduduk miskin**. Jika 20 persen dari total penduduk diklasifikasikan sebagai miskin, maka $P_0 = 0,2$.

- ii. Jika $\alpha = 1$ maka P_1 menunjukkan ukuran **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index*)**. P_1 merupakan persentase rata-rata kesenjangan antar pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah seluruh penduduk (baik yang di bawah atau di atas garis kemiskinan). Misal $P_1 = 0,15$ ini berarti bahwa kesenjangan antara total pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jika dirata-ratakan terhadap seluruh rumahtangga (baik rumahtangga miskin atau tidak miskin) adalah sebesar 15 persen. Karena nilai P_1 belum menggambarkan kesenjangan riil yang dihadapi oleh penduduk miskin, maka nilai P_1 harus dikoreksi dengan jumlah penduduk yang berada di atas GK dengan rumus:

$$\frac{P_1}{P_2} = \sum_{j=1}^Q \left(\frac{Z - Y_j}{Q} \right) \dots\dots\dots(3.23)$$

Rasio P_1/P_2 merupakan persentase rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain rasio tersebut merupakan rata-rata kesenjangan taraf hidup yang diukur dengan pengeluaran.

- iii. Jika $\alpha = 2$ maka P_2 menunjukkan ukuran **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau *distribution sensitive index*)** yang menggambarkan ketimpangan antar penduduk miskin. Tidak seperti dua ukuran terdahulu, ukuran ini sensitif terhadap penyebaran pengeluaran (*proxy* pendapatan) yang terjadi di antara penduduk miskin, dan juga dapat dipakai untuk mengetahui intensitas kemiskinan (*severity*). Ukuran ini dianggap yang paling memenuhi aksioma-aksioma untuk ukuran kemiskinan yang diinginkan oleh berbagai literatur, termasuk *Amartya Sen* (1976) dengan '*transfer axiom*'-nya, yaitu jika terjadi transfer pengeluaran dari penduduk miskin kepada penduduk yang lebih miskin berarti secara rata-rata telah terjadi suatu penurunan kemiskinan (BPS, 1992).

4. Indikator Ketimpangan (Disparitas)

a. Ketimpangan Pendapatan

Para pengamat ekonomi banyak yang menaruh perhatian pada permasalahan distribusi pendapatan atau pembagian pendapatan seperti diawali oleh *Sundrum* (1973) serta *King* dan *Weldon* (1975). Dalam waktu relatif singkat bermunculan para ahli ekonomi yang melakukan penelitian seperti *Hendra Esmara* (1974 dan 1978), kemudian *Parera* (1977) atau *Sam F. Poli* (1978). Tetapi sebagian besar hanya bertujuan mengetahui gambaran ketimpangan/ kesenjangan/ *gap* dalam pembagian pendapatan, yang biasanya dinyatakan dalam ukuran **Gini Ratio**. Sedangkan pengukuran jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka masih jarang dilakukan.

Selama ini, pemerintah di banyak negara berkembang dalam kebijakan politik dan ekonominya lebih menekankan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam upaya terciptanya kemakmuran bagi penduduknya. Terdapat dua pilihan antara:

memperbesar 'kue' terlebih dahulu, baru kemudian dibagi merata, atau dilakukan pembagian secara merata terlebih dahulu berapapun besar 'kue' yang diperoleh. Namun terlepas dari polemik dikhotomi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih berarti jika terjadi pemerataan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas.

a.1. Rasio Gini (Gini Ratio)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (selanjutnya disebut **Kurva Lorenz**) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

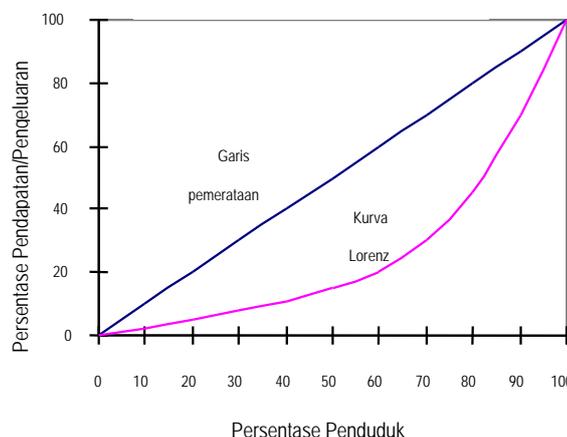
$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots(3.24)$$

Keterangan :

- P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i
- Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i
- k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin **mendekati 1** maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati **ketimpangan sempurna**. Sebaliknya, semakin **mendekati 0** distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati **pemerataan sempurna**. Menurut **Harry T. Oshima**, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan **“rendah”**; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan **“moderat”**; dan jika nilainya **lebih besar dari 0,5** dikatakan berada dalam ketimpangan **“tinggi”**.

Gambar 3.5. Kurva Lorenz



a.2. Ketimpangan Kriteria Bank Dunia (KBD)

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan, yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- Tingkat ketimpangan **rendah**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **moderat**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12 sampai dengan 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **tinggi**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima **kurang dari 12** persen jumlah pendapatan.

b. Ketimpangan Sektoral Antar Kabupaten/Kota

Selain tingkat ketimpangan pendapatan, disparitas ekonomi juga dapat digambarkan dengan disparitas sektoral antar wilayah. Indikator disparitas antar wilayah merupakan ukuran yang menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau kombinasi antara berbagai aspek secara sektoral.

• **Indeks Ketimpangan Regional**

Indeks Williamson adalah salah satu ukuran ketimpangan antar wilayah (region). Pengukuran ini didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar region (yang berupa besaran PDRB). Kriteria pengukuran adalah: semakin besar nilai indeks, semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi masing-masing region dengan rata-ratanya; sebaliknya, **semakin kecil nilai indeks menunjukkan tingkat pemerataan antar region yang semakin baik.**

Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \dots\dots\dots(3.25)$$

keterangan:

- IW* : Indeks Williamson
- y* : Rata-rata pendapatan (PDRB) di Provinsi DIY

- y_i : Rata-rata pendapatan (PDRB) di region ke-i
- f_i/n : Proporsi jumlah penduduk region ke-i terhadap jumlah penduduk Provinsi DIY
- i : 1,2, ..., 5 (Kabupaten/ kota di Provinsi DIY).

• **Analisis Pergeseran (*Shift Share Analysis*)**

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan salah satu metode analisis penting yang umum digunakan dalam studi-studi ekonomi regional. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional, menelusuri jejak kecondongan dan sebab-sebab perubahan dalam lapangan kerja, serta menentukan besar dan arah perubahan industri regional. Disamping itu analisis SS juga digunakan sebagai alat dalam analisis deskriptif untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan.

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan teknik yang relatif sederhana untuk mengevaluasi posisi relatif dan perubahan struktur suatu perekonomian lokal (misalnya kabupaten atau propinsi) dalam hubungannya dengan perekonomian acuan (nasional). Metode analisis ini bertitik tolak pada anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yakni:

- i. **Pertumbuhan nasional (*national growth component*)**, perubahan output atau pendapatan (atau indikator ekonomi lainnya seperti jumlah kesempatan kerja) suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan nasional secara umum, perubahan kebijaksanaan ekonomi nasional, atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian seluruh wilayah dan sektor secara seragam.
- ii. **Pertumbuhan sektoral (*industrial mix component*)**, timbul karena perbedaan permintaan output akhir, ketersediaan bahan baku, kebijaksanaan sektoral, serta perilaku dan kinerja struktur pasar setiap sektor nasional.
- iii. **Pertumbuhan daya saing wilayah (*competitive effect component*)**, terjadi karena peningkatan atau penurunan output atau pendapatan suatu wilayah yang lebih cepat atau lambat dari wilayah lainnya.

Perubahan nilai tambah bruto (NTB) atau PDRB suatu sektor i di suatu wilayah j dalam 2 periode, yaitu periode o dan periode t dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^t - Q_{ij}^o$$

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^o (Y_t/Y_o - 1) + Q_{ij}^o (Q_i^t/Q_i^o - Y_t/Y_o) + Q_{ij}^o (Q_{ij}^t/Q_{ij}^o - Q_i^t/Q_i^o) \dots\dots\dots (3.26)$$

Dari persamaan diatas dapat kita asumsikan bahwa pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah disebabkan oleh 3 komponen pertumbuhan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

keterangan:

- PR_{ij} = Pangsa Regional sektor i pada wilayah j
- PS_{ij} = Proportional Shift (pergeseran proporsional) sektor ke-i pada wilayah j
- DS_{ij} = Different Shift (pergeseran yang berbeda) sektor ke-i pada wilayah j
- Y₀ dan Y_t = Total PDRB Wilayah pada tahun 0 dan pada tahun t
- Q⁰_{ij} dan Q^t_{ij} = PDRB sektor i propinsi j pada tahun 0 dan pada tahun t
- Q⁰_i dan Q^t_i = Total PDRB Wilayah sektor i pada tahun 0 dan pada tahun t

$$PR_{ij} = Q_{ij}^0 \left\{ \frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right\} \dots\dots\dots (3.27)$$

$$PS_{ij} = Q_{ij}^0 \left\{ \frac{Q_i^t}{Q_i^0} - \frac{Y_t}{Y_0} \right\} \dots\dots\dots (3.28)$$

$$DS_{ij} = Q_{ij}^0 \left\{ \frac{Q_{ij}^t}{Q_{ij}^0} - \frac{Q_i^t}{Q_i^0} \right\} \dots\dots\dots (3.29)$$

Analisis SS dapat dibagi ke dalam 2 bagian:

1) Analisis Pangsa Regional (*Share Analysis*)

Untuk melihat struktur atau posisi relatif provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia atau di tingkat propinsi. Sebagai indikator bisa dipergunakan nilai output, nilai tambah, atau jumlah tenaga kerja yang bekerja. *Share analysis* akan mengukur proporsi dari, misalnya, PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi. Oleh sebab itu bila nantinya ditemukan satu atau beberapa kabupaten di suatu propinsi memiliki pangsa yang tinggi maka kabupaten tersebut dikatakan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB propinsi. Disamping itu analisis ini juga digunakan untuk melihat peranan/kontribusi sektor yang signifikan di suatu wilayah.

2) Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)

Dalam analisis pertumbuhan regional komponen pergeseran lebih penting daripada komponen PR. Total pergeseran (total shift) terdiri dari:

- ∞ Perubahan secara proporsional atau Proportionality Shift (PS) mengukur sejauh mana laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah berbeda dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat wilayah. Jadi PS memperlihatkan struktur ekonomi dan perubahannya di suatu wilayah.

- ☞ Perubahan yang berbeda atau Different Shift (DS) terjadi apabila laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pada sektor yang sama di wilayah lain. Perbedaan ini mencerminkan posisi keuntungan lokasi (*locational advantage position*) suatu wilayah yang mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan satu atau beberapa sektor tertentu di wilayah tersebut.

Berdasarkan besaran PS dan DS beberapa wilayah dalam suatu daerah dapat di kelompokkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat (*rapid growth region*),

Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah yang pertumbuhannya tertekan tapi berkembang (*depressed region yang berkembang*),

Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah yang tertekan namun cenderung berpotensi (*depressed region yang berpotensi*)

Kategori IV (PS dan DS negatif) adalah wilayah *depressed region* dengan daya saing lemah dan juga peranan terhadap wilayah rendah.

Keunggulan analisis *shift share* antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *shift share* tergolong sederhana.
2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Kelemahan Analisis *Shift-Share*, yaitu:

1. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*.
2. Masalah *benchmark* berkenaan dengan *homothetic change*, apakah t atau $(t+1)$ tidak dapat dijelaskan dengan baik.
3. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap.
4. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
5. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor.
6. Tidak ada keterkaitan antardaerah.

BAB 4

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

- A. Struktur Perekonomian PDRB
- B. Pertumbuhan Ekonomi
- C. PDRB Per Kapita
- D. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB
- E. Indeks Perkembangan Kategori
- F. Perbandingan Nilai PDRB Antar Kabupaten/Kota
- G. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi



BAB IV

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT LAPANGAN USAHA

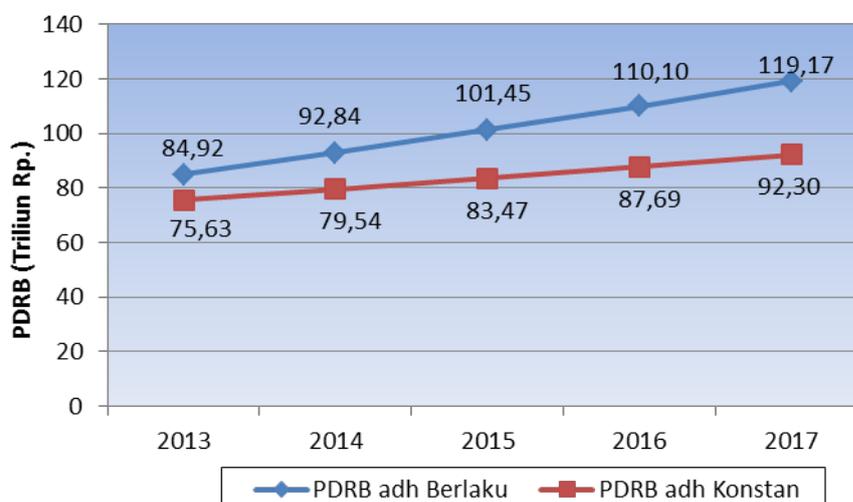
A. Struktur Perekonomian PDRB

Tahun 2017 merupakan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2012-2017 dan sekaligus mulainya periode RPJMD DIY 2017-2022. Dalam kurun waktu 2012-2017 perkembangan ekonomi mengalami anomali krisis ekonomi sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Namun dengan kembalinya tren pertumbuhan ke arah yang positif sejak 2016 memberikan harapan besar bahwa dalam periode RPJMD DIY 2017-2022 perekonomian akan terus tumbuh.

Secara absolut nilai PDRB DIY terus meningkat, baik menurut harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dalam setahun mencapai 9,1 triliun rupiah di tahun 2017 dan merupakan tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara berdasar harga konstan peningkatan nilai PDRB di tahun yang sama mencapai 4,6 triliun rupiah dan juga terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Total PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku sebesar 119,2 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 92,3 triliun rupiah.

Struktur PDB Indonesia dan PDRB provinsi/kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan *System National Accounts*, 2008 (SNA2008) terdiri dari 17 kategori atau

**Gambar 4.1. Produk Domestik Regional Bruto DIY (triliun rupiah),
2013-2017**



lapangan usaha. Struktur perekonomian DIY tahun 2017 atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa komposisi lapangan usaha di DIY beragam dengan tiga lapangan usaha yang kontribusinya terbesar adalah industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing sebesar 13,12 persen, 10,32 persen, dan 10,01 persen. Urutan dari ketiga lapangan usaha tersebut terjadi pergeseran, yaitu pertanian turun pada urutan ketiga, sementara urutan kedua penyediaan akomodasi dan makan minum. Tampaknya pergeseran tersebut sudah bisa diprediksi karena kontribusi lapangan usaha pertanian mengalami tren menurun sementara urutan di bawahnya penyediaan akomodasi dan makan minum yang nilai tambahnya tidak terpaut jauh terus mengalami tren meningkat.

Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan untuk skala industri besar-sedang terutama berasal dari kontribusi golongan pokok industri pengolahan makanan dan minuman. Nilai tambah industri skala besar seperti PT. Srihusada dan PT. Madukismo cukup nyata memberikan sumbangan pada pembentukan PDRB daerah. Di samping itu dari skala industri mikro-kecil aneka jenis industri kecil dan rumah tangga menjadi sumber penghasilan yang diandalkan bagi penduduk DIY selain pertanian. Sementara untuk golongan pokok pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian merupakan penyumbang terbesar pada kategori pertanian pada PDRB.

Tabel 4.1. Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2013 – 2017

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*)	2017 ^{***)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	11,13	10,52	10,64	10,41	10,01
2	Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,58	0,56	0,54	0,52
3	Industri Pengolahan	13,62	13,59	13,11	13,21	13,12
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15
5	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
6	Konstruksi	9,49	9,40	9,36	9,34	9,49
7	Perdag. dan Reparasi Mobil dan Motor	8,17	8,27	8,22	8,48	8,59
8	Pengangkutan dan Pergudangan	5,63	5,72	5,68	5,68	5,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	10,04	10,24	10,22	10,32
10	Informasi dan Komunikasi	8,92	8,51	8,13	8,14	8,21
11	Jasa Keuangan	3,73	3,88	3,97	3,94	3,89
12	Real Estat	6,85	7,00	7,02	7,09	7,03
13	Jasa Perusahaan	1,01	1,03	1,03	1,01	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,89	8,07	8,26	8,37	8,57
15	Jasa Pendidikan	8,03	8,19	8,48	8,25	8,15
16	Jasa Kesehatan	2,47	2,45	2,52	2,51	2,52
17	Jasa-jasa Lainnya	2,53	2,53	2,55	2,57	2,61
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka sementara

***) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor ekonomi andalan DIY. Lapangan usaha ini untuk DIY meliputi sebagian besar kegiatan kepariwisataan, meskipun kegiatan sektor kepariwisataan tersebar di beberapa lapangan usaha. Puncak peningkatan nilai tambah lapangan usaha ini terjadi pada saat musim liburan karena DIY merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Dilihat menurut golongan pokok usaha, penyediaan makan minum menjadi penyumbang utama lapangan usaha ini yaitu sekitar 79 persen dari total nilai tambah lapangan usaha atau kategori ini. Sementara penyediaan akomodasi memberikan sumbangan sekitar 21 dari terhadap nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

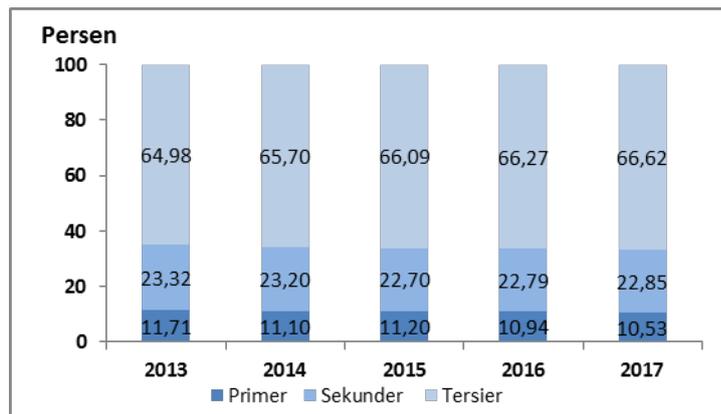
Selain ketiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar tersebut, ada enam kategori usaha ekonomi menjadi pelapis kedua yang cukup kuat juga memberikan kontribusi dalam struktur ekonomi DIY. Kontribusi lapangan usaha tersebut dalam PDRB DIY sekitar 7 hingga 9 persen, yaitu: konstruksi, perdagangan dan reparasi mobil dan motor, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, dan real estat.

Melihat tiga kategori usaha sebagai penyumbang utama dan enam kategori pada kelompok pelapis kedua tersebut memperlihatkan bahwa struktur perekonomian DIY menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Kondisi ini juga selaras dengan Visi DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**. Demikian pula dikaitkan kondisi ekonomi DIY tersebut juga mempunyai keterpaduan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**.

Di sisi lain, berdasarkan sifat output barang yang dihasilkan, dari 17 kategori lapangan usaha PDRB dapat diagregasi lagi dalam tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Disebut sektor primer bila outputnya masih tergantung pada sumber daya alam. Sehingga, yang termasuk dalam sektor primer ini ada dua lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B). Selanjutnya, lapangan usaha yang input utamanya berasal dari sektor primer dikelompokkan menjadi sektor sekunder. Untuk itu ada empat lapangan usaha yang masuk dalam sektor sekunder, yaitu: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Sementara 11 lapangan usaha lainnya dikelompokkan sebagai sektor tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estat, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.

Komposisi distribusi ketiga kelompok sektor primer, sekunder, dan tersier dalam PDRB relatif sama dari tahun ke tahun. Namun demikian sektor primer dan sekunder sumbangan kontribusinya semakin menyusut, sebaliknya sektor tersier terlihat semakin meningkat. Pada tahun 2017 sektor tersier memegang peran 66,62 persen dari total PDRB, meningkat 0,35 poin dibanding tahun sebelumnya dan 1,64 poin bila dibanding tahun 2013. Hal ini berarti pula bahwa kontribusi sektor primer dan sekunder berkurang sebesar itu.

Gambar 4.2 Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen) 2013- 2017



Sektor tersier yang terdiri dari 11 sektor, meliputi aktivitas perdagangan dan jasa-jasa telah menjadi tulang punggung perekonomian DIY. Dua pertiga dari total PDRB disumbangkan oleh sektor tersier. Penguatan kontribusi paling konsisten terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, real estat, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Dilihat lebih rinci pada golongan pokok penguatan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum bersumber pada golongan usaha penyediaan makan minum, seperti restoran, warung makan, kedai makan dan minum, dan sejenisnya. Hal ini jelas nampak oleh semakin menjamurnya usaha kuliner di Jogja, baik untuk jenis usaha makanan berat maupun yang sekedar warung kopi dan angkringan. Menguatnya usaha real estat merupakan *multiplier effect* dari semakin berkembangnya jasa pendidikan tinggi Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang menyandang status sebagai kota pendidikan. Sementara menguatnya peran lapangan usaha jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib lebih disebabkan oleh peningkatan tren porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun porsi terbesar masih bersumber dari pos belanja pegawai. Demikian pula peningkatan jasa pemerintahan juga disumbangkan oleh meningkatnya dana alokasi khusus Dana Keistimewaan (danais) DIY hingga realisasi pelaksanaan tahun 2017.

B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*) menunjukkan tingkat keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari besaran PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, maka laju pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap kurang pas karena dalam PDB/PDRB harga berlaku masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Oleh karena itu agar PDRB dapat mengukur laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya (*the real economic growth*), maka pengaruh perubahan harga-harga dalam PDRB harus dihilangkan, dan kondisi ini diperoleh dengan melakukan penghitungan laju pertumbuhan ekonomi dari PDRB atas dasar harga konstan. Oleh karena itu seperti dijelaskan dalam metodologi, laju pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain untuk menghilangkan faktor kenaikan harga dalam penghitungan laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan capaian keberhasilan pembangunan secara makro atau agregasi dari semua lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan pemerintah menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Selanjutnya, laju dan andil pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB yang dapat diamati dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Bila diterapkan dalam analisis spasial kewilayahan kabupaten/kota maka akan diperoleh posisi relatif kemajuan pembangunan suatu kabupten/kota dalam lingkup wilayah yang lebih besar.

1. Pertumbuhan menurut Kategori

PDRB dengan seri penghitungan 2010 sudah mengaplikasikan SNA2008. Salah satu implikasinya adalah adanya perubahan nomenklatur penggolongan maupun penggunaan istilah dari sektor menjadi industri atau kategori atau masih bisa juga menggunakan istilah lapangan usaha. Namun demikian dalam bahasan tertentu istilah sektor kadang-kadang masih digunakan untuk memudahkan pemahaman substansi makna kalimat yang disampaikan.

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2017 melaju lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi masih sebesar 5,05 persen, sementara tahun 2017 tumbuh menjadi 5,26 persen. Jalur tren laju pertumbuhan ekonomi meningkat sudah dimulai pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa landasan ekonomi untuk pemulihan pasca krisis sudah menemukan jalurnya. Semakin membaiknya kondisi ekonomi

di DIY juga ditunjukkan oleh pertumbuhan semua lapangan usaha yang terus positif selama tiga tahun terakhir.

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori, Rata-rata Pertumbuhan per Tahun, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2017 di DIY (persen), 2013-2017

Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{***)}	Rata-rata 2013-2017	Andil Pertumbuhan 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	2,26	-2,10	2,11	1,46	1,94	0,84	0,17
2. Pertambangan & Penggalian	3,92	2,11	0,13	0,42	3,39	1,50	0,02
3. Industri Pengolahan	6,87	3,82	2,13	5,07	5,74	4,18	0,74
4. Pengadaan Listrik, Gas	6,08	6,83	2,19	14,26	3,96	6,71	0,01
5. Pengadaan Air	0,95	3,91	2,90	2,36	3,46	3,15	0,00
6. Konstruksi	4,94	5,65	4,24	5,42	6,94	5,56	0,65
7. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,26	5,69	6,19	6,09	5,72	5,92	0,48
8. Pengangkutan & Pergudangan	6,10	3,80	3,73	4,61	4,75	4,22	0,26
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	6,79	5,77	5,51	6,21	6,07	0,59
10. Informasi dan Komunikasi	6,22	6,13	5,11	8,32	6,14	6,42	0,67
11. Jasa Keuangan	11,50	8,27	8,27	4,98	2,80	6,06	0,10
12. Real Estat	4,01	7,77	6,05	5,14	4,94	5,97	0,36
13. Jasa Perusahaan	3,27	7,61	7,31	3,43	5,86	6,04	0,07
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,94	5,90	5,57	5,57	4,51	5,39	0,34
15. Jasa Pendidikan	4,58	7,91	7,28	3,07	5,56	5,94	0,49
16. Jasa Kesehatan	7,00	7,65	7,15	4,52	5,84	6,28	0,15
17. Jasa Lainnya	4,86	5,29	8,00	5,70	5,76	6,18	0,16
PDRB	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,11	5,26

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; ***) angka sangat sangat sementara

Secara umum, kategori-kategori yang berada di kelompok sektor tersier menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat di tahun 2017, meskipun laju pertumbuhan tertinggi tahun ini ada di kelompok sektor sekunder yaitu konstruksi. Lapangan usaha di sektor tersier dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, dan jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial.

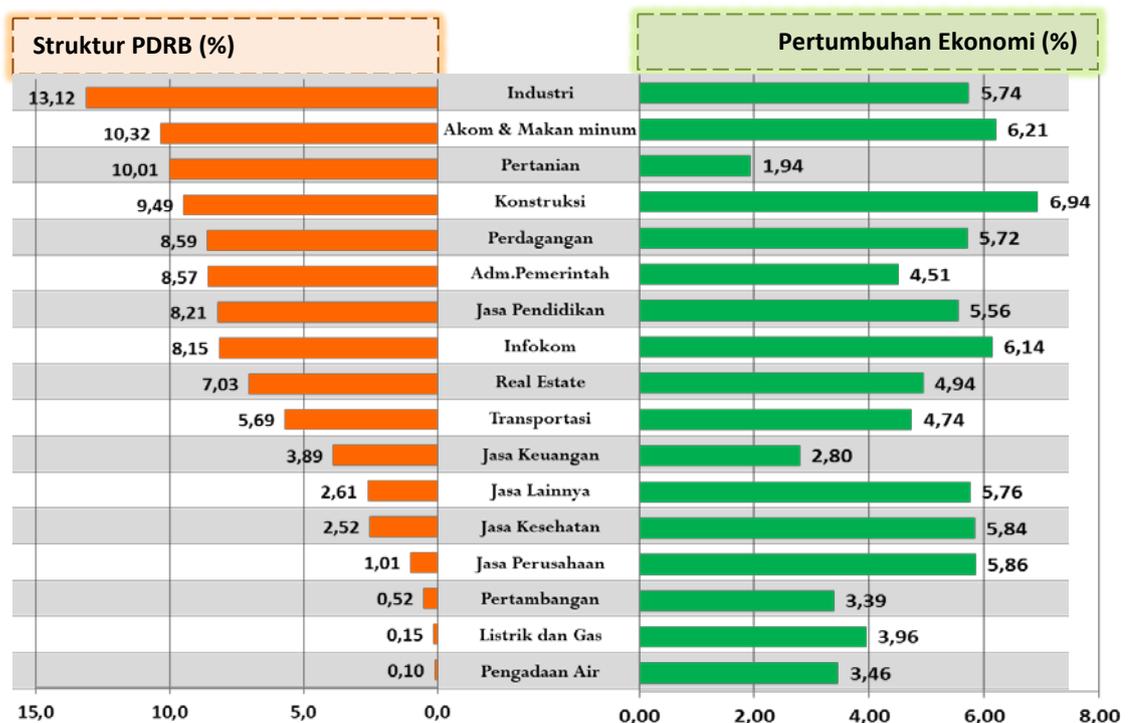
Potensi ekonomi daerah dapat dilihat lebih dekat dari pangsa distribusi yang dikaitkan dengan pertumbuhannya seperti yang terlihat pada Gambar 4.3. Tiga lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, dan pengadaan air, adalah tiga lapangan usaha yang mempunyai pangsa distribusi yang kecil dan pertumbuhannya juga relatif kecil. Sementara itu, lima lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan ekonomi terbesar adalah industri pengolahan, informasi dan

komunikasi, konstruksi, penyediaan makan dan minum, serta jasa pendidikan. Kelima lapangan usaha tersebut pangsa distribusi dan pertumbuhannya memang menonjol dibanding kategori usaha yang lain.

Lapangan usaha pertanian meskipun pertumbuhannya kecil, namun pangsa kontribusinya menempati urutan tertinggi ketiga. Pertanian di DIY masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk DIY. Oleh karena hasil pertanian untuk mencukupi hajat konsumsi masyarakat maka lapangan usaha ini harus tetap dipertahankan dan juga dikembangkan dalam struktur ekonomi DIY. Kendala utama dalam menjaga peran dan mengembangkan potensi lapangan usaha pertanian adalah banyaknya alih fungsi lahan dan keterbatasan luas area pertanian.

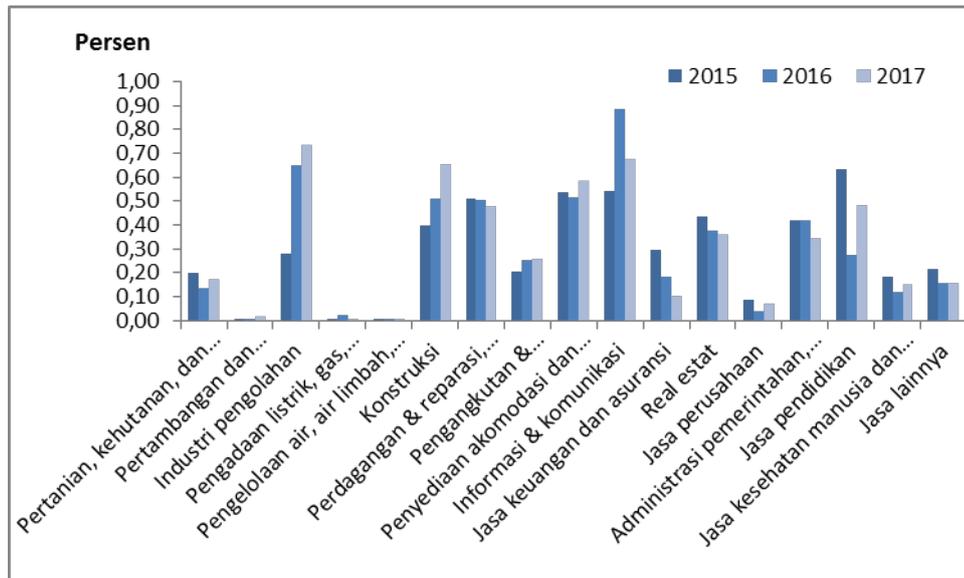
Kategori usaha yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri pengolahan (kategori C) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (kategori I). Jumlah usaha industri pengolahan menurut skala usaha didominasi oleh usaha mikro dan kecil, yaitu 99,5 persen dari total usaha kategori industri pengolahan (BPS, SE2016). Demikian pula di lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga didominasi usaha skala mikro dan kecil, yaitu 99,4 persen. Oleh karena skala usahanya dominan mikro dan kecil maka pengembangan dua lapangan usaha tersebut menghadapi kendala keterbatasan kemampuan berproduksi.

Gambar 4.3. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2017



Informasi dan komunikasi meskipun sudah melewati masa puncak *booming*-nya, namun prospek peningkatan PDRB dari lapangan usaha ini masih menjanjikan karena teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat. Untuk memberikan kesejahteraan masyarakat lebih luas, maka pengembangan usaha harus didistribusikan merata secara proporsional ke kabupaten/kota sehingga pertumbuhan ekonomi juga menyebar secara kewilayahan bukan hanya dari sisi sektoral saja.

Gambar 4.4. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen) 2015-2017



Diamati lebih lanjut peran masing-masing kategori terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dapat dilihat dari andil pertumbuhannya. Masing-masing lapangan usaha memberikan andil yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2017. Berbeda dengan potensi yang dimiliki, kategori yang memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2017 yang sebesar 5,26 persen adalah kategori industri pengolahan dengan andil sebesar 0,74 persen. Selanjutnya diikuti oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 0,67 persen dan kategori konstruksi dengan andil sebesar 0,65 persen. Urutan keempat dan kelima andil terbesar berikutnya adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan andil sebesar 0,59 persen dan jasa pendidikan dengan andil sebesar 0,49 persen. Kategori pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk hanya mampu memberikan andil bagi pertumbuhan tahun 2017 sebesar 0,17 persen.

2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota

Wilayah DIY yang secara administrasi terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Luas wilayah DIY dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia relatif kecil. Kelima kabupaten/kota memiliki nilai PDRB yang berbeda-beda,

namun pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2017 berada pada kisaran 5,00-5,97 persen. Dibanding tahun sebelumnya, level pertumbuhan juga meningkat dan kesenjangan pertumbuhan antarkabupaten/kota semakin menyempit. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Kabupaten Kulon Progo, yakni sebesar 5,97 persen, kemudian diikuti oleh Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing-masing tumbuh sebesar 5,35 persen dan 5,24 persen. Urutan keempat dan kelima adalah Bantul dan Gunungkidul yang tumbuh masing-masing sebesar 5,14 persen dan 5,00 persen. Terjadi loncatan yang luar biasa untuk urutan pertumbuhan kabupaten/kota tahun 2017 ini, karena pada tahun-tahun sebelumnya Sleman menempati urutan tertinggi sedangkan Kulon Progo pada urutan keempat.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun, dan Andil Pertumbuhan 2017 di DIY (persen), 2013-2017

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	2013	2014	2015	2016*	2017***	Rata-rata 2013-2017	Andil Pertumbuhan 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kulonprogo	4,87	4,57	4,62	4,76	5,97	4,98	0,45
2. Bantul	5,46	5,04	4,97	5,06	5,10	5,04	0,95
3. Gunungkidul	4,97	4,54	4,82	4,89	5,00	4,81	0,66
4. Sleman	5,89	5,30	5,18	5,25	5,35	5,27	1,80
5. Yogyakarta	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24	5,18	1,40
Jumlah	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,11	5,26

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: * angka sementara; *** angka sangat sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi Kulon Progo yang melesat tinggi didasari oleh laju pertumbuhan di lapangan usaha pertambangan dan penggalan dan konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesar 13,7 persen dan 12,1 persen (lihat Lampiran 15). Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan didorong oleh aktivitas penggalan batu dan tanah yang tinggi karena adanya permintaan untuk persiapan lahan bandara baru maupun relokasi pemukiman baru bagi warga yang terkena dampak pembangunan bandara tersebut. Di samping itu, peningkatan nilai tambah konstruksi juga ditunjukkan oleh adanya perbaikan sarana dan prasarana serta pelebaran jalan dan jembatan, terutama di sepanjang jalan negara yang melintas di wilayah Kulon Progo.

Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah mencapai 46,63 persen dari luas wilayah DIY, nilai total PDRB yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 16,2 triliun rupiah atau 13,53 persen dari total PDRB DIY. Kulon Progo yang luas wilayahnya sebesar 18,40 persen dari luas wilayah DIY dapat menggali total PDRB sebesar 9 triliun rupiah, dengan persentase terhadap total PDRB DIY terendah yaitu 7,57 persen.

Kabupaten Sleman yang luasnya 18,04 persen dari luas wilayah DIY menghasilkan total PDRB sebesar 40,1 triliun rupiah atau sekitar 33,47 persen dari total PDRB DIY. Kabupaten Bantul pada tahun 2017 memberikan sumbangan terhadap PDRB DIY sebesar 19,30 persen atau dengan nilai PDRB sebesar 23,1 triliun rupiah. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen dari luas wilayah DIY, karena merupakan pusat kegiatan ekonomi selain pertanian dan pertambangan, memberikan sumbangan sebesar 31,3 triliun rupiah atau sekitar 26,14 persen terhadap total PDRB DIY. Kontribusi PDRB Kulon Progo dan Bantul secara persentase meningkat, sedangkan Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta sebaliknya yaitu menurun.

Pertumbuhan ekonomi di Sleman memberikan andil pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,80 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2017 yang sebesar 5,26 persen. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya dari Kota Yogyakarta yaitu 1,40 persen, dan diikuti oleh Bantul sebesar 0,95 persen. Meskipun andil pertumbuhan Kulon Progo dan Gunungkidul masih relatif kecil, namun aktivitas ekonomi di kedua wilayah ini sudah mulai menggeliat dan memberikan peran terhadap pertumbuhan ekonomi DIY masing-masing sebesar 0,45 dan 0,66 persen. Diharapkan dengan hadirnya mega proyek di kedua wilayah ini akan terus memperkecil kesenjangan ekonomi wilayah di DIY.

C. PDRB per Kapita

PDRB per kapita diturunkan dari data total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Data penduduk yang digunakan adalah hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota berdasarkan SP2010. Data PDRB per kapita mencerminkan rata-rata dari nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada setiap penduduk wilayah tersebut. Jadi PDRB per kapita tidak langsung mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera.

Nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku tahun 2017 sebesar 31,68 juta rupiah (Tabel 4.4). Sementara bila dihitung berdasarkan harga konstan 2010, maka PDRB per kapita DIY sebesar 24,53 juta rupiah. Atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB per kapita riil mencerminkan bahwa terciptanya PDRB DIY sebesar 92,3 triliun rupiah jika dibagi rata untuk setiap penduduk maka setiap bulannya setiap penduduk memperoleh bagian

sekitar 2,04 juta rupiah. Namun demikian dalam konteks kehidupan sosial ekonomi distribusi pendapatan realitanya tidaklah terbagi merata seperti dalam hitungan matematis. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antarpenduduk.

Tabel 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita DIY, 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh. berlaku (juta rupiah)	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341	119.172.906
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	75.627.450	79.536.082	83.474.441	87.687.927	92.300.660
Penduduk pertengahan tahun (orang) ¹⁾	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.167
PDRB per kapita adh. Berlaku:(rupiah)	23.623.920	25.526.402	27.573.470	29.589.074	31.676.665
PDRB per kapita adh. konstan 2010 (rupiah)	21.037.697	21.867.898	22.688.352	23.566.246	24.533.908
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	8,64	8,05	8,02	7,31	7,06
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	4,11	4,23	3,95	3,75	3,87

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Keterangan : 1) Hasil Backcasting dan Proyeksi SP 2010

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

D. Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) dan Inflasi PDRB (Indeks Harga Implisit)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang fluktuasinya berdampak luas terhadap aktivitas berbagai sektor ekonomi yang melingkupinya. Indeks harga secara sederhana adalah perbandingan antara harga dari suatu paket komoditas dalam suatu kelompok barang atau jasa (*market basket*) pada suatu periode waktu terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan. Persentase perubahan IHK yang diamati dari periode ke periode inilah yang dikenal sebagai inflasi. Inflasi ini merupakan gambaran perkembangan harga yang dibeli di tingkat konsumen.

Satu jenis inflasi yang lain adalah inflasi yang diturunkan dari indeks harga implisit PDRB (selanjutnya disebut inflasi PDRB), yaitu ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai rasio PDRB nominal terhadap PDRB riil dikali dengan 100. Inflasi PDRB ini dapat dipandang sebagai gambaran perkembangan harga di tingkat produsen.

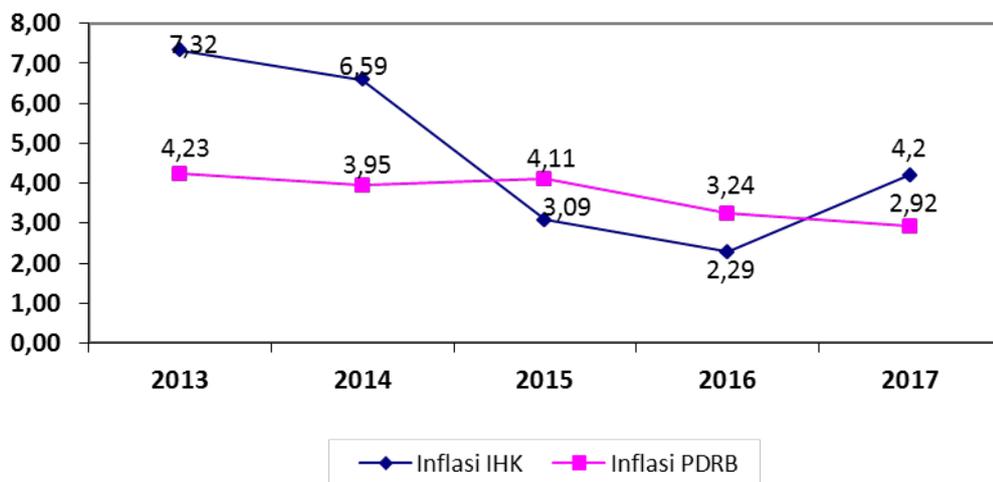
Meskipun kedua inflasi mencerminkan perkembangan harga, namun antara inflasi IHK dan inflasi PDRB terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, terutama dalam hal metode penghitungannya. Perbedaan pertama adalah inflasi PDRB mencerminkan harga semua barang dan jasa **yang diproduksi di wilayah domestik**, sedangkan inflasi IHK

menghitung harga berbagai barang dan jasa baik produk domestik maupun impor **yang dibeli** oleh konsumen.

Inflasi IHK dihitung dari perubahan harga sekeranjang belanjaan barang dan jasa (398 komoditas) yang **tetap** di wilayah perkotaan (Yogyakarta) pada suatu periode/tahun dengan harga di tahun dasar (2012). Barang dan jasa tersebut masing-masing mempunyai bobot yang telah ditentukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) mengenai komposisi komoditas yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Survei terakhir yang dilaksanakan BPS pada tahun 2012 sehingga harga pada tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun dasar penghitungan. Inflasi PDRB membandingkan harga berbagai barang dan jasa yang **diproduksi saat ini** di wilayah perkotaan dan pedesaan dengan harga barang dan jasa yang sama pada tahun dasar 2010. Dengan demikian, jumlah barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung inflasi PDRB dapat berubah atau menyesuaikan diri secara otomatis dari waktu ke waktu.

Inflasi IHK tahun kalender 2017 merupakan tingkat perubahan IHK Umum pada posisi bulan Desember tahun 2017 dibandingkan dengan IHK Umum bulan Desember tahun 2016. Inflasi PDRB tahun 2017 merupakan perubahan harga rata-rata di tingkat produsen pada tahun 2017 dibandingkan dengan rata-rata harga produsen pada tahun 2016. Analogi ini digunakan untuk penghitungan periode-periode yang lain.

Gambar 4.5 Inflasi IHK dan Inflasi PDRB D.I.Yogyakarta (persen), 2013-2017



Secara umum, perubahan harga di tingkat konsumen mempunyai besaran dan fluktuasi yang lebih besar dibanding perubahan harga di tingkat produsen. Gejolak harga konsumen lebih mudah berfluktuasi karena gejolak harga di tingkat konsumen dipengaruhi oleh faktor, seperti jalur distribusi komoditas dari produsen hingga ke konsumen, perubahan harga bahan bakar yang sangat rentan mempengaruhi margin transportasi barang-banang dan jasa, permintaan pasar, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Fluktuasi yang terjadi pada angka inflasi IHK juga dipengaruhi oleh kondisi stok barang dan jasa. Untuk komoditas barang dan jasa kebutuhan masyarakat yang berasal dari hasil

pertanian stok juga dipengaruhi oleh penyediaan pada musim panen. Stok komoditas kebutuhan pangan pada musim panen mungkin melimpah sehingga mengakibatkan harga barang di tingkat produsen dan konsumen akan turun karena permintaan relatif tidak berubah banyak. Kondisi sebaliknya bisa terjadi, yaitu bila tidak ada pasokan dari produsen maka stok barang menipis sementara permintaan tidak berkurang atau bahkan bertambah sehingga mengakibatkan naiknya harga barang-barang atau jasa. Faktor lain bisa terjadi bila muncul gangguan pada jalur distribusi barang dan jasa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi naik turunnya harga barang dan jasa terutama kebutuhan pokok pangan, seperti: beras, minyak goreng, dan sayur-sayuran. Komoditas kebutuhan pokok sehari-hari tersebut mempunyai bobot yang tinggi dalam penghitungan inflasi sehingga fluktuasi harga sangat berpengaruh terhadap naik-turunnya angka inflasi. Nilai tukar rupiah mempengaruhi inflasi karena beberapa komoditas tertentu berasal dari impor yang harga dasarnya menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah tersebut.

E. Indeks Perkembangan Kategori

Indeks perkembangan merupakan gambaran perkembangan nilai tambah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks perkembangan sektoral dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui sektor-sektor mana yang berkembang cepat, lambat atau bahkan menurun sejak tahun dasar (2010). Selanjutnya, dengan menelusuri besaran indeks ini akan dapat diketahui sektor yang prospektif pada masa yang akan datang.

Sampai dengan tahun 2017 kategori jasa keuangan di DIY memiliki indeks perkembangan atas dasar harga berlaku terbesar, yaitu 227,79. Indeks ini menunjukkan bahwa sejak 2010 hingga 2017 lapangan usaha jasa keuangan mampu telah berkembang lebih dari dua kali lipat. Indeks perkembangan ini belum terbebas dari pengaruh kenaikan harga. Dilihat indeks perkembangan atas dasar harga konstan yang telah terbebas dari pengaruh inflasi, maka perkembangan kategori jasa keuangan menempati posisi tertinggi kedua, dengan indeks 162,13. Lapangan usaha informasi dan komunikasi berkembang lebih cepat bila dinilai atas dasar harga konstan dengan indeks perkembangannya 165,29 (Tabel 4.5). Perkembangan tercepat berikutnya dicapai oleh kategori pengadaan listrik dan gas, dan jasa kesehatan manusia masing-masing mempunyai indeks perkembangan sebesar 160,1 dan 158,8.

Lapangan usaha informasi dan komunikasi serta jasa keuangan menjadi lapangan usaha dengan perkembangan nilai tambah yang besar di DIY. Ini ciri ekonomi DIY sudah menjadi ekonomi yang moderen karena kegiatan ekonominya didasari teknologi maju. Lapangan usaha ini termasuk *capital intensive* sehingga perlu juga perhatian pemerintah dari sisi penggunaan tenaga kerja, baik jumlah ataupun pendidikannya.

Bab 4 | PDRB menurut Lapangan Usaha

Tabel 4.5. Indeks Perkembangan PDRB DIY menurut Kategori, 2013-2017 (2010=100)

Lapangan Usaha	PDRB Berlaku					PDRB Konstan				
	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{***)}	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{***)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	130,28	134,70	148,83	157,96	164,54	105,76	103,54	105,72	107,27	109,35
Pertambangan dan Pengecilan	121,72	132,18	140,92	145,84	151,44	113,35	115,74	115,89	116,37	120,32
Industri Pengolahan	125,48	136,89	144,36	157,86	169,68	109,43	113,61	116,03	121,91	128,91
Pengadaan Listrik, Gas	91,20	107,62	124,58	149,68	183,35	123,48	131,91	134,81	154,03	160,12
Pengadaan Air	117,78	134,90	144,13	150,79	159,34	104,77	108,86	112,02	114,66	118,63
Konstruksi	130,36	141,07	153,63	166,36	182,80	114,93	121,43	126,58	133,43	142,69
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	134,82	149,25	162,10	181,33	199,00	120,24	127,08	134,95	143,16	151,34
Pengangkutan & Pergudangan	130,98	145,50	157,87	171,24	185,77	115,49	119,89	124,36	130,09	136,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144,32	162,44	180,89	196,08	214,35	120,95	129,16	136,62	144,15	153,11
Informasi dan Komunikasi	122,44	127,70	133,30	144,84	158,29	128,87	136,77	143,76	155,72	165,29
Jasa Keuangan	155,64	176,82	197,72	213,12	227,79	128,15	138,75	150,23	157,71	162,13
Real Estat	129,28	144,44	158,21	173,58	186,35	118,31	127,50	135,22	142,17	149,20
Jasa Perusahaan	118,40	132,37	145,10	154,35	167,19	118,86	127,90	137,24	141,95	150,26
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	140,29	156,82	175,38	192,92	213,77	118,04	125,00	131,97	139,32	145,61
Jasa Pendidikan	125,57	140,03	158,41	167,43	178,91	118,47	127,83	137,14	141,36	149,21
Jasa Kesehatan	136,01	147,81	165,80	179,47	195,06	124,43	133,95	143,52	150,01	158,78
Jasa Lainnya	124,60	136,50	150,26	163,95	180,43	116,82	123,00	132,84	140,42	148,51
PDRB	131,30	143,54	156,85	170,22	184,25	116,93	122,97	129,06	135,57	142,71

Keterangan: *) Angka sementara

***) Angka sangat sangat sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY

Setelah lapangan usaha jasa keuangan, berdasar harga berlaku DIY juga mengalami perkembangan cepat di penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan juga perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor. Ketiga kategori usaha ini masing-masing mempunyai indeks perkembangan sebesar 214,4, 213,8, dan 199,0. Sementara itu, atas dasar harga konstan 2010 perkembangan tercepat berikutnya dicapai oleh kategori pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan manusia masing-masing mempunyai indeks perkembangan sebesar 160,1 dan 158,8. Dengan kata lain, urutan laju perkembangan riil nilai tambah barang dan jasa berbeda dengan laju perkembangan atas dasar harga berlaku yang dipengaruhi fluktuasi harga.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY laju perkembangannya termasuk lambat baik atas dasar

harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Bahkan, indeks perkembangan riil lapangan usaha pertanian ini paling lambat di antara semua lapangan usaha. Hal ini menunjukkan belum banyak inovasi untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi dalam lingkup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu perlu ada terobosan teknologi dalam pengelolaan usaha pertanian agar produktivitas output meningkat.

F. Perbandingan Nilai PDRB Antarkabupaten/Kota

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota mempunyai hak dalam hal mengatur kebijakan fiskal dan menentukan arah pembangunan. Hal ini menyebabkan perkembangan kinerja perekonomian daerah/wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pembuat kebijakan (*decision maker*) di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 4.6. Nilai PDRB Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) 2013–2017

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{***)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	6.489.594	7.056.572	7.671.548	8.312.455	9.063.335
Bantul	16.138.755	17.682.925	19.325.203	20.919.336	22.633.737
Gunungkidul	11.530.341	12.557.371	13.798.657	14.982.055	16.207.042
Sleman	28.295.363	30.912.239	33.826.505	36.939.696	40.087.445
Kota Yogyakarta	22.537.792	24.664.285	26.791.936	28.895.813	31.308.655
DIY	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341	119.172.906

Keterangan: *) Angka sementara ***) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

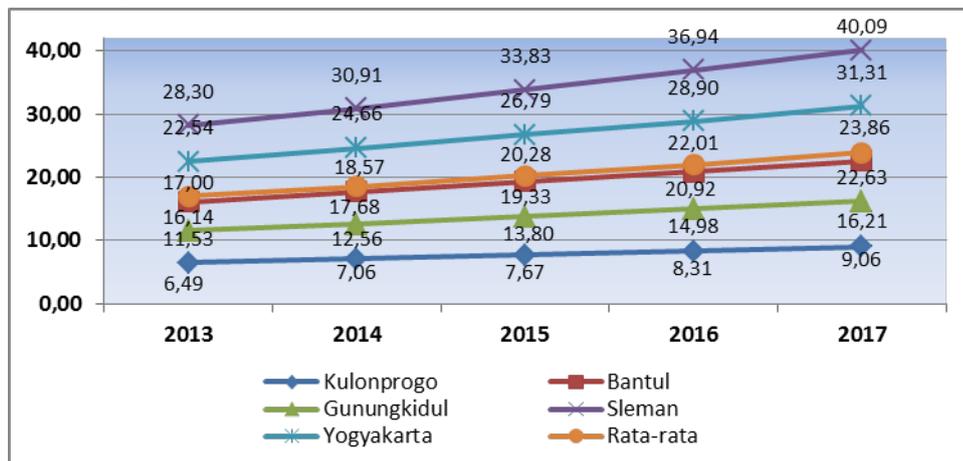
Dalam melakukan analisis makro ekonomi suatu daerah dapat mengacu pada beberapa indikator yang digunakan analisis perekonomian nasional sehingga hasilnya bisa dibandingkan secara nasional. Meskipun demikian perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan prinsip yang menyebabkan analisis perekonomian nasional tidak dapat diterapkan secara mutlak di tingkat regional. Satu hal yang secara nyata membedakan *region* dengan *nation* adalah bahwa *region* tidak mempunyai kedaulatan sebagaimana *nation*. Hal ini menyebabkan adanya **keterbukaan hubungan antar-region**, sehingga arus barang dan jasa antardaerah sangat bebas, tidak seperti *nation* di mana arus barang dan jasa dari dan ke luar negeri harus melalui pihak bea dan cukai. Keterbukaan antar-*region* ini menyebabkan teori ekonomi tertutup sangat muskil diterapkan pada tingkat regional. Di satu sisi, adanya keterbukaan antar-*region* memungkinkan hubungan spasial yang sangat kuat antar *region*. Adanya hubungan spasial tersebut menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah di sekitarnya baik positif maupun negatif. Korelasi spasial tersebut sebenarnya

dapat lebih akurat bila dilihat dari hasil analisis *spillover effect*, namun dalam analisis PDRB tidak melakukan analisis tersebut.

Kelima wilayah administratif kabupaten/kota di DIY mempunyai keterkaitan erat secara sosial demografis. Untuk itu dalam melakukan analisis kinerja perekonomian kelima kabupaten/kota tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari **analisis spasial (tata ruang/geografis)**. Di tingkat provinsi, untuk membandingkan perkembangan perekonomian makro secara relatif antardaerah, dapat dilakukan dengan melihat besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota sebagai salah satu indikator makro.

Sebagai daerah penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sleman masih memiliki potensi terus berkembang lebih cepat, sementara Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah ke titik jenuh. Bantul sebagai penyanggah kedua wilayah perkotaan juga berkembang relatif cepat. Kulon Progo yang digadang-gadang perkembangan ekonominya akan meroket seiring dengan pembangunan bandara baru *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*, laju pertumbuhan memang sudah melaju paling tinggi meskipun nilai absolutnya masih yang terkecil. Sementara Gunungkidul masih mempercayakan sektor pertanian dan kepariwisataan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Gunungkidul 2017 meskipun sudah menembus angka 5 persen namun masih memerlukan suntikan investasi yang lebih besar lagi untuk memacu perkembangan ekonominya.

Gambar 4.6 Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah), 2013 - 2017



Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2013-2017 kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata DIY. Sementara untuk Kabupaten Bantul berada pada level dekat dengan nilai rata-rata DIY. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan penopang utama perekonomian di DIY. Kinerja ekonomi Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masih di bawah rata-rata DIY dan jarak dengan rata-rata DIY juga masih relatif besar.

Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2017 masih menempati urutan keempat dari nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian. Oleh karena kondisi tanahnya, lapangan usaha pertanian yang diusahakan masih di lahan pertanian pegunungan berbatu. Sulit untuk memacu produktivitas pertanian terutama untuk komoditas padi dan sayuran yang memerlukan tanah yang subur dan banyak air. Kota Yogyakarta dengan luas wilayah dan juga jumlah penduduk terkecil mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar (urutan kedua). Sebagai ibu kota DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih maju, sehingga semua aktivitas ekonomi tersedia, kecuali pertanian dan penggalian.

Tabel 4.7. Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2017^{***)}

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	1.715.661	3.148.389	3.968.200	3.085.181	47.959
Pertambangan dan Penggalian	132.102	129.076	201.918	154.658	1.126
Industri Pengolahan	1.122.792	3.449.821	1.535.319	5.319.570	4.217.234
Pengadaan Listrik, Gas	8.345	32.303	15.436	47.254	70.351
Pengadaan Air	11.966	17.976	26.248	19.091	45.993
Konstruksi	825.886	2.118.975	1.563.747	4.376.659	2.417.778
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.271.959	1.945.840	1.519.918	3.160.225	2.345.123
Pengangkutan & Pergudangan	708.680	1.070.507	805.655	2.973.830	1.238.719
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.565	2.656.392	958.922	4.144.322	4.243.793
Informasi dan Komunikasi	451.136	1.667.177	1.156.955	3.244.700	3.269.520
Jasa Keuangan	286.018	626.065	361.954	1.280.250	2.084.850
Real Estat	310.732	1.486.180	578.583	3.142.737	2.850.161
Jasa Perusahaan	25.128	107.585	70.298	670.737	338.220
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	846.924	1.756.873	1.564.517	2.782.811	3.255.324
Jasa Pendidikan	532.473	1.547.114	997.909	3.815.059	2.857.879
Jasa Kesehatan	130.305	419.294	324.943	947.352	1.181.954
Jasa Lainnya	332.663	454.170	556.518	923.008	842.671
PDRB	9.063.335	22.633.737	16.207.042	40.087.445	31.308.655

Keterangan : ***) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS DIY.

Komposisi struktur ekonomi masing-masing daerah menurut kategori menarik untuk dicermati karena dapat mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi antar kabupaten/kota. Struktur dan kontribusi kategori PDRB menurut lapangan usaha di kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 4.7. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten

Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Beberapa produk komoditas pertanian unggulan DIY berasal dari tiga kabupaten ini, seperti: padi, pisang, cabai, bawang merah, kelapa, kakao, dan lain-lain. Sementara di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Ketiga wilayah ini selain merupakan pusat bisnis seperti supermarket, *hipermart*, rumah pertokoan, hotel, dan bisnis hiburan, juga menjadi sentra industri baik usaha mikro-kecil maupun usaha menengah-besar.

Pencapaian PDRB yang tinggi idealnya disertai pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Bila tidak maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Walaupun indikator pemerataan pendapatan yang akurat sangat sulit diperoleh, namun indeks gini dan PDRB per kapita dapat digunakan untuk melihat pendekatan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi pendapatan daerah kepada penduduknya. Konsep dan makna angka PDRB per kapita telah dijelaskan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan indeks gini akan dibahas lebih jauh di Bab 6.

Tabel 4.8. Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di DIY (persen), 2015, 2016, 2017

Kabupaten/kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2015	2016 ^{*)}	2017 ^{***)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian	20,42	19,96	18,93
	2. Perdagangan	13,15	13,61	14,03
	3. Industri Pengolahan	12,07	12,23	12,39
Bantul	1. Industri Pengolahan	15,06	15,18	15,24
	2. Pertanian	14,60	14,39	13,91
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,59	11,67	11,74
Gunungkidul	1. Pertanian	25,62	25,28	24,48
	2. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9,34	9,42	9,65
	3. Konstruksi	9,41	9,40	9,65
Sleman	1. Industri Pengolahan	13,43	13,38	13,27
	2. Konstruksi	10,85	10,72	10,92
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,20	10,27	10,34
Yogyakarta	1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,22	13,37	13,55
	2. Industri Pengolahan	13,66	13,69	13,47
	3. Informasi dan Komunikasi	10,33	10,38	10,44

Keterangan: ^{***)} Angka sangat sangat sementara

Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

Hasil hitungan PDRB per kapita kabupaten/kota di DIY menunjukkan kesenjangan pendapatan antarwilayah cukup besar. Sampai dengan tahun 2017 Kota Yogyakarta masih

menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu 74,1 juta rupiah (Tabel 4.9). Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai total PDRB-nya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya relatif sedikit. Sementara itu Sleman yang mempunyai nilai total PDRB tertinggi, angka PDRB per kapita Sleman sebesar 33,6 juta rupiah jauh di bawah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Sleman cukup besar yaitu 2,8 kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. PDRB per kapita terendah adalah Kulon Progo yaitu 21,5 juta rupiah. Sementara itu, Bantul dan Gunungkidul mempunyai angka PDRB per kapita yang tidak besar selisihnya, yaitu masing-masing 22,7 juta rupiah dan 22,2 juta rupiah. Kulon Progo mempunyai peluang cukup besar untuk melampaui Gunungkidul dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Tabel 4.9. Nilai PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2013 - 2017

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{***)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	16.096.061	17.307.864	18.611.318	19.949.109	21.513.038
Bantul	17.040.684	18.430.369	19.891.904	21.269.712	22.741.440
Gunungkidul	16.467.422	17.741.562	19.291.212	20.737.011	22.220.787
Sleman	24.782.819	26.775.411	28.973.924	31.292.125	33.587.802
Yogyakarta	55.969.623	60.501.060	64.918.044	69.171.102	74.062.657
DIY	23.623.920	25.526.402	27.573.470	29.589.074	31.676.665

Keterangan: **) Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

G. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi

Peran ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa terhadap ekonomi nasional cukup besar. Pada Tabel 4.10 terlihat bahwa provinsi-provinsi yang menduduki peringkat 4 besar adalah provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta (17,4 persen), Jawa Timur (14,6 persen), Jawa Barat (12,9 persen), dan Jawa Tengah (8,6 persen). Secara keseluruhan Pulau Jawa mempunyai andil dalam pembentukan PDB sebesar 58,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masih dominan di Pulau Jawa. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih banyak didominasi oleh aktivitas industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Selanjutnya, sebagai pemegang kontribusi ekonomi terbesar ke 5 diduduki oleh Provinsi Riau (5,10 persen). Dibanding tahun sebelumnya kontribusi kelima provinsi tersebut lebih rendah. Artinya, provinsi-provinsi lain kontribusinya bergerak melaju naik.

Tabel 4.10. Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2017

PROPINSI	2017				
	ADHB (Juta Rp)	ADHK (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	
				Thd Pulau	Thd 34 Prov
Sumatera	2.994.516.990,82	2.133.222.907,85	4,30	100,00	21,66
01. Aceh	146.483.352,87	121.263.186,14	4,19	4,89	1,06
02. Sumatra Utara	684.069.489,47	487.531.231,87	5,12	22,84	4,95
03. Sumatra Barat	214.585.229,26	155.963.985,42	5,29	7,17	1,55
04. Riau	705.678.594,41	471.419.903,33	2,71	23,57	5,10
05. Jambi	191.098.712,03	136.556.706,07	4,64	6,38	1,38
06. Sumatra Selatan	383.758.602,31	281.544.365,22	5,51	12,82	2,78
07. Bengkulu	60.675.678,07	42.080.012,61	4,99	2,03	0,44
08. Lampung	308.450.983,01	220.657.348,58	5,17	10,30	2,23
09. Kep. Bangka Belitung	69.973.232,48	50.007.750,91	4,51	2,34	0,51
10. Kepulauan Riau	229.743.116,90	166.198.417,70	2,01	7,67	1,66
Jawa	8.086.316.313,11	5.857.267.539,29	5,61	100,00	58,49
11. DKI Jakarta	2.410.373.403,77	1.635.855.749,58	6,22	29,81	17,43
12. Jawa Barat	1.786.092.377,04	1.342.953.376,17	5,29	22,09	12,92
13. Jawa Tengah	1.187.048.814,68	894.050.472,53	5,27	14,68	8,59
14. DI Yogyakarta	119.172.905,56	92.300.659,82	5,26	1,47	0,86
15. Jawa Timur	2.019.199.655,80	1.482.147.587,10	5,45	24,97	14,61
16. Banten	564.429.156,26	409.959.694,09	5,71	6,98	4,08
Bali dan Nusa Tenggara	430.447.557,26	302.397.274,35	3,73	100,00	3,11
17. Bali	215.360.919,21	144.964.204,09	5,59	50,03	1,56
18. Nusa Tenggara Barat	123.926.898,04	94.644.993,20	0,11	28,79	0,90
19. Nusa Tenggara Timur	91.159.740,01	62.788.077,06	5,16	21,18	0,66
Kalimantan	1.133.147.496,59	843.117.673,75	4,33	100,00	8,20
20. Kalimantan Barat	177.468.594,08	124.306.736,88	5,17	15,66	1,28
21. Kalimantan Tengah	126.176.067,16	89.565.102,30	6,74	11,14	0,91
22. Kalimantan Selatan	159.593.851,23	121.863.847,88	5,29	14,08	1,15
23. Kalimantan Timur	592.502.522,93	452.847.479,45	3,13	52,29	4,29
24. Kalimantan Utara	77.406.461,18	54.534.507,24	6,59	6,83	0,56
Sulawesi	844.970.203,44	603.448.790,69	6,99	100,00	6,11
25. Sulawesi Utara	110.164.481,13	79.495.341,13	6,32	13,04	0,80
26. Sulawesi Tengah	134.243.408,55	97.551.643,51	7,14	15,89	0,97
27. Sulawesi Selatan	418.931.582,29	288.908.616,10	7,23	49,58	3,03
28. Sulawesi Tenggara	107.465.199,33	83.038.496,86	6,81	12,72	0,78
29. Gorontalo	34.547.561,42	25.092.733,75	6,74	4,09	0,25
30. Sulawesi Barat	39.617.970,72	29.361.959,35	6,67	4,69	0,29
Maluku dan Papua	335.555.319,54	256.752.944,85	4,89	100,00	2,43
31. Maluku	39.878.784,83	27.811.629,60	5,81	11,88	0,29
32. Maluku Utara	32.272.571,55	23.210.864,65	7,67	9,62	0,23
33. Papua Barat	71.788.556,20	56.906.821,54	4,01	21,39	0,52
34. Papua	191.615.406,96	148.823.629,06	4,64	57,10	1,39

Kontribusi PDRB DIY tahun 2017 terhadap PDB nasional maupun terhadap PDRB Pulau Jawa mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi DIY terhadap Pulau Jawa turun 0,1 poin, yaitu dari 1,48 persen menjadi 1,47 persen, dan peringkatnya terendah di antara enam provinsi. Kontribusi terhadap 34 provinsi di Indonesia juga sedikit turun, yaitu dari 0,87 persen menjadi 0,86 persen. Kontribusi DIY yang tidak beranjak naik

tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi DIY meskipun di atas pertumbuhan nasional namun masih belum mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDB Indonesia karena banyak provinsi lain yang pertumbuhannya melaju lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi DIY juga yang paling rendah di antara enam provinsi di Pulau Jawa. Hal ini memberikan tantangan terhadap perencanaan pembangunan DIY untuk dapat lebih mendorong peningkatan pertumbuhan terutama untuk lapangan usaha potensial atau komoditas unggulan.

Di tingkat regional Kawasan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), posisi PDRB DIY berada di atas NTT, tetapi di bawah NTB, Bali, dan semua provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini berarti pula bahwa DIY berada pada peringkat ke-8 di antara sejumlah 9 provinsi di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra).

BAB 5

PDRB MENURUT PENGELUARAN

- A. Struktur PDRB Pengeluaran
- B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran



BAB V

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Seperti telah dijelaskan dalam Bab 2, penghitungan PDRB dapat diperoleh dari 3 sisi, yaitu menurut lapangan usaha atau produksi, menurut pengeluaran, dan dari sisi pendapatan. Bab 4 telah membahas mengenai PDRB dari sisi lapangan usaha atau produksi, dan pada bab ini akan dibahas mengenai PDRB dari sisi pengeluaran (*expenditure*). PDRB menurut pengeluaran menjelaskan alokasi pengeluaran nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor produksi dari masing-masing pelaku ekonomi dalam bentuk barang konsumsi akhir (*final goods*). Komponen yang dihitung dalam PDRB menurut pengeluaran meliputi pengeluaran untuk konsumsi akhir baik rumah tangga, pemerintah, maupun lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), ekspor luar negeri, impor luar negeri, ekspor antardaerah, dan impor antardaerah, serta perubahan inventori. Sesuai kebutuhan, ekspor-impor kadang disajikan menjadi satu yaitu ekspor neto baik ekspor-impor luar negeri maupun ekspor-impor antardaerah.

Untuk mengkaji sisi pengeluaran PDRB, akan dibahas terlebih dahulu mengenai konsep dan peranan pelaku ekonomi dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam sistem perekonomian sebagai satu kesatuan, pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok/institusi (Nellis dan Parker, 2003), yaitu:

1. Rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba);
2. Pemerintah (*government*);
3. Korporasi (*firm*);
4. Jasa keuangan (*financial services*);
5. Kelompok luar daerah/luar negeri (*rest of the world/ROW*).

Masing-masing institusi tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi yang dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan perilakunya dalam sistem perekonomian.

Pada tingkat paling dasar, sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain. Rumah tangga menyediakan sumber daya yang merupakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh korporasi. Faktor produksi tersebut berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang akan dipergunakan oleh korporasi untuk memproduksi barang dan jasa. Sebagai imbalan atas penyediaan faktor produksi, rumah tangga akan menerima

pembayaran dari korporasi berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan (*profit* dan *dividen*).

Selanjutnya, korporasi berperan untuk memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Barang dan jasa tersebut akan dikonsumsi lagi oleh rumah tangga, pemerintah, dan korporasi lain. Selain itu, produk dari korporasi tersebut juga dapat dipasarkan ke luar daerah maupun luar negeri. Pendapatan yang diperoleh korporasi tersebut kemudian akan dikembalikan lagi kepada rumah tangga dalam bentuk balas jasa atas faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Di samping mempekerjakan dan memberi balas jasa atas faktor produksi, korporasi juga memainkan peran vital dalam pembentukan investasi berupa pengadaan mesin dan peralatan, tanah dan bangunan, serta kapasitas produksi lainnya.

Pelaku ekonomi selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah berperan dalam menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti: melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur kebijakan perekonomian negara, dan lainnya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun demikian, pemerintah juga memberikan balas jasa berupa upah dan gaji kepada pegawainya yang merupakan bagian dari kelompok rumah tangga. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah juga akan memanfaatkan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Selain peran-peran tersebut, pemerintah juga akan melakukan pembentukan modal dengan cara membangun infrastruktur jalan baru, jembatan, dan bangunan untuk sarana umum, seperti: rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Pada akhirnya, pemerintah memungut pajak dari individu dan perusahaan untuk mendanai konsumsi pemerintah, termasuk pembayaran transfer kepada penduduk yang memerlukan berupa subsidi baik langsung maupun tidak langsung.

Meskipun jasa keuangan juga merupakan pelaku ekonomi namun kegiatan institusi ini biasanya dikelompokkan terpisah dari korporasi. Hal ini karena jasa keuangan tidak memproduksi output secara fisik tetapi berperan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Peranan kelompok ini adalah menyediakan layanan untuk menjembatani kepentingan antara penyedia dana/penabung (kreditor) dan peminjam (debitor). Penyedia dana tersebut bisa berasal dari rumah tangga, korporasi, pihak asing, dan badan-badan lainnya yang melayani publik. Sebagai pihak penyelenggara dan penyedia dana, institusi jasa keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun kelompok luar daerah/luar negeri memberikan sumbangan langsung dalam hal kegiatan transaksi ekspor dan impor, baik untuk transaksi dengan daerah lain maupun dengan pihak luar negeri. Meningkatnya ketergantungan antardaerah/negara karena dampak globalisasi (pasar bebas) menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan arus investasi yang masuk. Arus modal ini akan sangat berperan dalam menutup kekurangan tabungan domestik yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun untuk mencukupi belanja konsumsi yang diperlukan rumah tangga, pemerintah, atau korporasi.

A. Struktur PDRB Pengeluaran

1. Konsumsi Rumah Tangga

Secara umum dan mencari ciri khas perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama roda perekonomian dari sisi pengeluaran. Demikian pula dengan perekonomian DIY, sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2017, nilai konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp 81,7 triliun dari total nilai PDRB DIY yang sebesar Rp119,2 triliun atau mencapai sekitar 68,6 persen. Pangsa konsumsi rumah tangga ini meningkat dibanding dengan pangsa 2016 yang sebesar 67,7 persen. Porsi konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi dalam pengeluaran PDRB di satu sisi menguntungkan karena mencerminkan aktivitas ekonomi bergairah dan permintaan domestik biasanya lebih stabil. Namun, di sisi lain perlu disadari bahwa komponen ini bersifat konsumtif sehingga dalam jangka panjang tidak akan menggerakkan investasi sebagai penggerak ekonomi yang ideal. Oleh karena itu harus ada kesesuaian dengan komponen lainnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dari sisi pengeluaran (Tabel 5.1 dan Gambar 5.1).

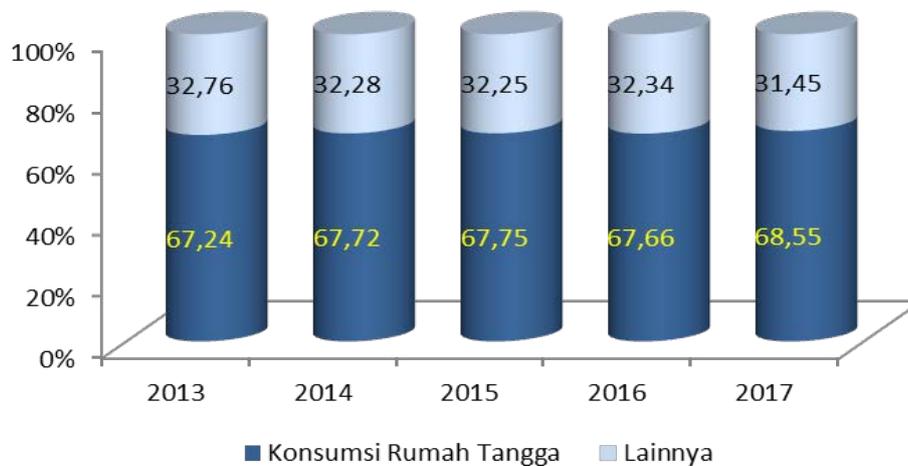
Tabel 5.1. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah) 2013–2017

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	57.101.887	62.875.141	68.730.528	74.429.796	81.688.214
a. Makanan dan Minuman	24.497.671	26.694.388	28.969.375	31.378.592	34.174.255
b. Bukan Makanan	32.604.216	36.180.753	39.761.153	43.051.203	47.513.959
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	2.457.182	2.948.427	3.171.193	3.225.070	3.756.395
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	13.629.834	15.347.428	17.214.154	18.441.761	20.063.072
4. Pembentukan modal tetap bruto	24.250.704	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.147.936
5. Perubahan Inventori	967.150	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184
6. Ekspor Luar Negeri	4.224.512	5.465.423	6.266.264	6.495.282	7.436.959
7. Impor Luar Negeri	2.514.540	4.085.245	5.066.145	5.922.732	6.540.719
8. Net Ekspor Antardaerah	-15.192.186	-18.433.682	-20.826.153	-21.384.456	-25.747.135
P D R B	84.924.543	92.842.484	101.440.518	110.009.487	119.172.906

Sumber : BPS Provinsi DIY

Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara

Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY (persen), 2013-2017



Bila dilihat lebih jauh menurut jenis barang yang dikonsumsi rumah tangga, selama periode 2013-2017 persentase konsumsi nonmakanan selalu lebih besar dibandingkan konsumsi makanan. Porsi antara konsumsi makanan dan nonmakanan sebesar 28,8 persen dan 39,4 persen terhadap total PDRB tahun 2013. Pada tahun 2017, porsi konsumsi makanan dan nonmakanan menjadi sebesar 28,7 persen dan 39,9 persen terhadap total PDRB (Tabel 5.2). Kontribusi komponen terhadap total PDRB, terlihat semua komponen cenderung meningkat, kecuali ekspor antardaerah neto.

Tabel 5.2. Struktur PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2013 – 2017

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	67,24	67,72	67,75	67,66	68,55
a. Makanan dan Minuman	28,85	28,75	28,56	28,52	28,68
b. Bukan Makanan	38,39	38,97	39,20	39,13	39,87
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	2,89	3,18	3,13	2,93	3,15
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	16,05	16,53	16,97	16,76	16,84
4. Pembentukan modal tetap bruto	28,56	29,88	30,36	30,39	31,17
5. Perubahan Inventori	1,14	1,06	1,14	1,18	1,15
6. Ekspor Luar Negeri	4,97	5,89	6,18	5,90	6,24
7. Impor Luar Negeri	2,96	4,40	4,99	5,38	5,49
8. Net Ekspor Antardaerah	-17,89	-19,85	-20,53	-19,44	-21,60
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi DIY

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Kecenderungan meningkatnya impor luar negeri di satu sisi mengurangi cadangan devisa yang tersedia, namun di sisi lain peningkatan impor berupa barang modal mencerminkan adanya geliat peningkatan permintaan produksi. Hal ini juga akan

mendorong peningkatan investasi dan output bila dilihat dari sisi produksi. Net ekspor antardaerah cenderung menurun, artinya nilai arus barang dan jasa yang masuk lebih besar dibandingkan dengan yang keluar. Sisi positifnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan untuk konsumsi akhir maupun konsumsi antara meningkat karena menggeliatnya ekonomi DIY. Namun menurunnya porsi net ekspor antardaerah juga bisa bermakna terbatasnya penyediaan untuk memenuhi konsumsi internal daerah. Oleh karena itu kondisi ini dapat menjadi pendorong bagi unit-unit produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas produksi sehingga memiliki daya saing lebih terhadap produk luar daerah. Demikian pula seharusnya juga menjadi ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dengan akurasi kebijakan perencanaan maupun terobosan implementasinya.

2. Konsumsi Pemerintah

Menurut tatanan kehidupan bernegara, lembaga eksekutif pemerintah bukan hanya sebagai penyusun regulasi atau pembuat kebijakan dalam mengatur kehidupan bernegara, namun juga sebagai pelaksana kegiatan ekonomi melalui instrumen belanja pemerintah. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan, seperti sebagai penyelenggara pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran pemerintah juga bisa hadir dalam bentuk intervensi program yang diperuntukkan membantu penduduk yang berpenghasilan rendah berupa subsidi atau dalam bentuk hibah. Kegiatan-kegiatan tersebut selain membutuhkan anggaran yang tertuang dalam RAPBN/RAPBD, juga memerlukan biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau disingkat Konsumsi Pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (*Government-G*) dalam pembentukan PDRB DIY atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp20,1 triliun pada tahun 2017 atau memberikan kontribusi sebesar 16,84 persen terhadap PDRB. Selama periode 2013-2017, kontribusi konsumsi pemerintah cenderung meningkat meskipun relatif datar (Tabel 5.2). Indikasi ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian DIY cukup stabil, baik melalui kebijakan perencanaan maupun dalam tahapan implementasi pembangunan tahun demi tahun. Konsumsi pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang, nilai tambah belanja modal, output Bank Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

3. Investasi

Kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memerlukan penanaman modal atau investasi untuk menggerakkannya. Investasi dipenuhi dari penanaman modal domestik maupun asing. Investasi digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya peningkatan investasi baru sudah seharusnya akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat memberi

peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan investasi selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peluang kerja yang diciptakan dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Dalam buku *A System of National Accounts (SNA)* yang diterbitkan oleh PBB (*United Nations*), dijelaskan bahwa realisasi investasi di suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan nilai pembentukan modal tetap (domestik) bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif, sedangkan inventori (stok) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, berbentuk barang setengah jadi, barang input yang belum digunakan, atau juga berbentuk barang jadi yang belum terjual. **Untuk selanjutnya, jika disebut investasi fisik maka sudah merupakan gabungan/penjumlahan antara PMTB dan perubahan inventori.**

Pada tahun 2017 nilai PMTB di DIY mencapai Rp37,1 triliun atau naik sekitar Rp3,7 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp33,4 triliun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang naik sekitar Rp2,6 triliun. Sementara secara total investasi fisik 2017 sebesar Rp38,5 triliun. Selama lima tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di DIY cukup pesat, nilai investasi naik 52,7 persen. Naiknya investasi tersebut sebagai dampak dan berkaitan dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan jasa-jasa. Pertumbuhan komponen PMTB tahun 2017 mencapai sebesar 4,97 persen. Namun pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,97 persen, dan juga lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir yang sebesar 5,27 persen.

Peran investasi terhadap perekonomian daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sumbangan investasi fisik terhadap PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 sebesar 29,7 persen naik menjadi 31,3 persen di tahun 2017 (Tabel 5.3). Peningkatan kontribusi tersebut didominasi oleh komponen PMTB yang naik dari 28,6 persen menjadi 31,2 persen.

Dalam menggerakkan roda perekonomian, investasi tidak hanya dinilai dari besarnya investasi yang masuk namun perlu dilihat seberapa efektif investasi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat efisiensi penanaman modal adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan pertambahan output dalam periode tertentu. Dalam pembahasan ini, ICOR yang digunakan adalah konsep ICOR yang dihitung dengan *time-lag 0*. Artinya, investasi yang ditanam pada tahun tertentu akan menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga. Untuk memudahkan perhitungan karena

keterbatasan data yang tersedia, maka sebagai pendekatan ICOR digunakan ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*).

Dilihat dari angka sementara ICVAR DIY dalam periode tahun 2013–2017, dapat dimaknai bahwa produktivitas dari investasi yang ditanamkan belum menunjukkan kecenderungan membaik, bahkan cenderung sedikit kurang efisien. Pada tahun 2013 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 5,36 persen. Di tahun 2017 pertumbuhan kebutuhan investasi yang diperlukan menjadi lebih tinggi, yaitu 5,61 persen. Angka ini dimaknai bahwa untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi satu persen pertumbuhan investasi yang diperlukan menjadi sebesar 5,61 persen. Namun perlu diperhatikan bahwa ICVAR (ICOR) ini hasil penghitungan dengan *time-lag* 0, artinya hanya dilihat dampak investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Padahal, dilihat dari sifat investasi yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian adalah investasi jangka panjang. Sehingga, manfaat investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru akan dirasakan pada tahun-tahun mendatang. Pembahasan lebih rinci tentang ICOR selanjutnya akan diuraikan pada publikasi Analisis ICOR DIY.

Tabel 5.3. Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PMTB (juta rupiah)	24.250.704	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.147.936
<i>Share</i> thd. PDRB (persen)	28,56	29,88	30,36	30,39	31,17
2. Perubahan Inventori (juta rupiah)	967.150	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184
<i>Share</i> thd. PDRB (persen)	1,14	1,06	1,14	1,18	1,15
3. PMTB + Perubahan Inventori (juta rp)	25.217.854	28.724.991	31.950.678	34.724.766	38.516.120
(persen)	29,69	30,94	31,50	31,57	32,32
4. ICOR, Investasi = PMTB (lag 0)	5,14	5,46	5,66	5,60	5,37
5. ICOR, Investasi = PMTB + Perubahan Inventori (lag 0)	5,36	5,70	5,91	5,85	5,61

Sumber : BPS Provinsi DIY, data diolah

Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

4. Ekspor dan Impor

Tahun 2017 merupakan akhir masa pelaksanaan RPJMD 2012-2017. Salah satu misi perencanaan pembangunan daerah lima tahunan tersebut adalah mewujudkan pendidikan berkualitas dan mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. Kinerja pemerintah dalam mendorong pembangunan kepariwisataan serta industri kreatif dan inovatif ditunjukkan dengan makin berkembangnya industri kerajinan khas DIY baik industri makanan/minuman maupun industri barang dan jasa lain. Sebagian produk industri tersebut menjadi komoditas ekspor. Sebaliknya, oleh karena Yogyakarta menjadi destinasi

utama kegiatan wisata dan pendidikan, dampak kegiatan ekonomi yang timbul adalah DIY menjadi pusat pemasaran bagi produk-produk dari daerah lain atau dari impor luar negeri.

Nilai ekspor luar negeri Provinsi DIY tahun 2017 tercatat sebesar 7,4 triliun rupiah. Pada periode 2013-2017, DIY mengalami surplus perdagangan luar negeri dengan nilai tertinggi dicapai justru di awal periode tahun 2013 yaitu sebesar 1,7 triliun rupiah. Di tahun 2017 surplus perdagangan luar negeri DIY sebesar 896,2 milyar rupiah lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 572,6 miliar rupiah.

Terjadinya aktivitas ekspor-impor tidak selalu berawal dari komunikasi formal pemerintah namun bisa bermula dari komunikasi atau transaksi perdagangan yang terjadi antara wisatawan dan pedagang. Aktivitas ekonomi lebih lanjut dari proses tersebut dapat berpeluang membentuk jaringan pemasaran produk-produk domestik lebih luas bahkan juga ke daerah-daerah lain. Produk sektor industri mempunyai pangsa transaksi komoditas yang cukup dominan dalam kegiatan ekspor antarprovinsi, sedangkan jasa hotel, restoran, jasa angkutan, dan jasa informasi dan komunikasi yang dinikmati oleh wisatawan merupakan bentuk transaksi ekspor jasa.

Selama kurun waktu 2013-2017 nilai komponen ekspor neto antarprovinsi DIY bernilai negatif. Artinya, nilai impor barang dan jasa yang masuk DIY melebihi nilai ekspor barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan barang dan jasa dari luar provinsi jauh lebih besar. Barang dan jasa impor tersebut dapat berkaitan dengan kegiatan sektor pertanian maupun sektor ekonomi lainnya. Tingginya konsumsi impor ini, untuk DIY lebih banyak bernilai positif karena menggerakkan sektor produksi yang ada. Namun perkembangan ekspor antarprovinsi perlu dipantau karena menjadi beban bagi perencanaan bila hanya menjadi pasar ekspor barang/jasa dari luar DIY. Kekurangan pasokan kebutuhan barang dan jasa seharusnya menjadi peluang bagi produsen/penyedia dari lokal DIY dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada.

Dalam kurun waktu 2013-2017, rata-rata pertumbuhan ekspor 7,94 persen sedangkan impor 21,63 persen. Rata-rata pertumbuhan ekspor antardaerah masih tumbuh -4,67 persen yang dipicu di antaranya oleh terjadinya kontraksi sebesar 15,94 persen di tahun 2016. Pada tahun 2017 net ekspor antardaerah tumbuh positif sebesar 2,39 persen. Ini menunjukkan bahwa Pemda DIY serius memperbaiki kinerja ekonominya, khususnya ekspor dan impor luar negeri dan juga antardaerah.

B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

Kebijakan pertumbuhan ekonomi merupakan aspek terpenting dalam setiap perumusan kebijakan makro yang disusun oleh pemerintah, selain upaya untuk menekan laju inflasi, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, maupun untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta defisit neraca pembayaran (Nellis dan Parker, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil merupakan target yang ingin dicapai

oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Sebagai bagian dari sisi pengeluaran PDRB, komponen konsumsi rumah tangga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2017 yang sebesar 5,52 persen berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,26 persen. Menurut jenis pengeluaran, antara kelompok makanan dan nonmakanan juga tumbuh cukup baik, yaitu masing-masing sebesar 5,21 persen dan 5,74 persen. Kelompok makanan juga tumbuh lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya tumbuh di bawah empat persen. Sementara itu, kelompok nonmakanan memang tidak setinggi pertumbuhan tahun 2013 dan 2014, namun lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita dan juga membaiknya pendapatan rumah tangga. Di samping itu, meningkatnya jumlah penduduk juga menuntut pengeluaran yang lebih besar baik untuk konsumsi makanan maupun konsumsi nonmakanan. Demikian pula membaiknya pendapatan rumah tangga memberikan dampak pada peningkatan permintaan dan konsumsi yang lebih tinggi untuk barang dan jasa, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Tabel 5.4. Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2013–2017

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017***	Rata-rata 2013-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	4,85	4,94	4,74	4,83	5,54	5,01
a. Makanan dan Minuman	2,36	3,01	3,80	3,77	5,21	3,94
b. Bukan Makanan	6,52	6,18	5,32	5,49	5,74	5,68
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	10,42	10,58	2,90	-0,92	9,61	5,43
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	5,90	4,35	5,50	2,11	3,06	3,75
4. Pembentukan modal tetap bruto	5,12	5,78	4,34	5,97	4,97	5,27
5. Perubahan Inventori	3,44	11,78	4,73	7,24	2,02	6,38
6. Ekspor Luar Negeri	20,71	20,80	3,23	-0,35	9,26	7,94
7. Impor Luar Negeri	17,87	44,03	15,49	20,48	9,19	21,63
8. Net Ekspor Antardaerah	5,35	1,42	-5,39	-15,94	2,39	-4,67
P D R B	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,11

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; ***) angka sangat sangat sementara

BAB 6

ANALISIS POTENSI DAN KUALITAS PERTUMBUHAN PDRB

- A. Perkembangan Indikator Utama Ekonomi DIY
- B. Posisi Dan Kualitas Pertumbuhan Kabupaten/Kota
- C. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
- D. Kemiskinan Dan Ketimpangan
- E. Disparitas Antar Kabupaten/Kota



BAB VI

ANALISIS POTENSI DAN KUALITAS PERTUMBUHAN PDRB

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas PDRB dan turunannya, baik menurut lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran. Salah satu indikator turunan dari PDRB adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk merepresentasikan fenomena ekonomi makro suatu negara maupun wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bermakna perkembangan kesejahteraan suatu negara atau wilayah, yang tercermin pada peningkatan output per kapita sehingga mendorong atau memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, atau dalam bahasa lain meningkatkan daya beli masyarakat.

Saat ini indikator strategis yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan mendatang di antaranya adalah inflasi, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, gini ratio (rasio gini), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai salah satu indikator strategis, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi sasaran target dalam perencanaan pembangunan. Namun perlu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup bila ternyata belum mampu menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, serta berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi seharusnya juga diperhatikan, yaitu: pertumbuhan yang diiringi oleh pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran.

A. Perkembangan Indikator Utama Ekonomi DIY

1. Pertumbuhan Ekonomi

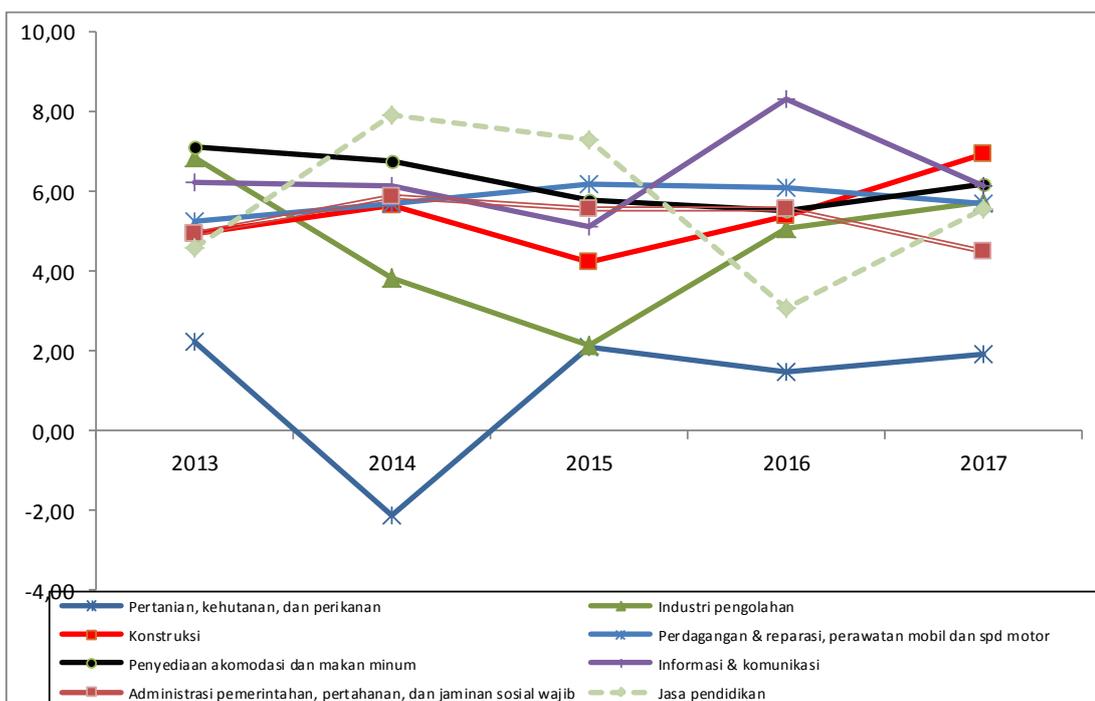
a. Tren Pertumbuhan Kategori

Selama kurun waktu 2015-2017 pertumbuhan ekonomi sudah pada kondisi tren yang menggembirakan, baik pada di tingkat nasional maupun lingkup DIY. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi baru mencapai 5,11 persen per tahun, tetapi arah perkembangan pertumbuhan dalam dua tahun terakhir sudah pada tren meningkat.

Arah kecenderungan pertumbuhan menurut kategori sampai dengan tahun 2014 tampak masih terjadi fluktuasi yang relatif tinggi dan bahkan pertanian mengalami kontraksi pada tahun 2014. Kondisi ekonomi mulai ke arah pertumbuhan yang kondusif sejak tahun 2015, ini ditunjukkan oleh perkembangan semua lapangan usaha yang tumbuh

positif dan berlanjut hingga tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam *recovery* ekonomi menunjukkan hasilnya, meskipun belum sepenuhnya membaik. Hal ini terlihat pada sebagian besar lapangan usaha yang meskipun tumbuh positif namun kecepatan pertumbuhannya masih cenderung melambat.

Gambar 6.1. Pertumbuhan Kategori-Kategori dengan Pangsa Terbesar dalam PDRB DIY (persen), 2013-2017



Kondisi ekonomi DIY dari sudut pandang pertumbuhan produksi lapangan usaha atau kategori ekonomi cukup membanggakan. Tahun 2017 landasan ekonomi DIY cukup mantap, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB DIY, antara lain yaitu pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan informasi dan komunikasi. Dilihat tren pertumbuhan, tampaknya kategori untuk kelompok usaha perdagangan mempunyai prospek semakin membaik. Sementara yang perlu menjadi perhatian dari pergerakan laju pertumbuhan kategorial adalah di kategori jasa keuangan dan asuransi. Setelah menjadi kategori usaha dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2013, di tahun-tahun selanjutnya lapangan usaha ini masih tertahan pertumbuhannya. Bahkan, peringkat pertumbuhan di tahun 2016 dan 2017 merosot cukup jauh.

b. Tren Pertumbuhan Konsumsi

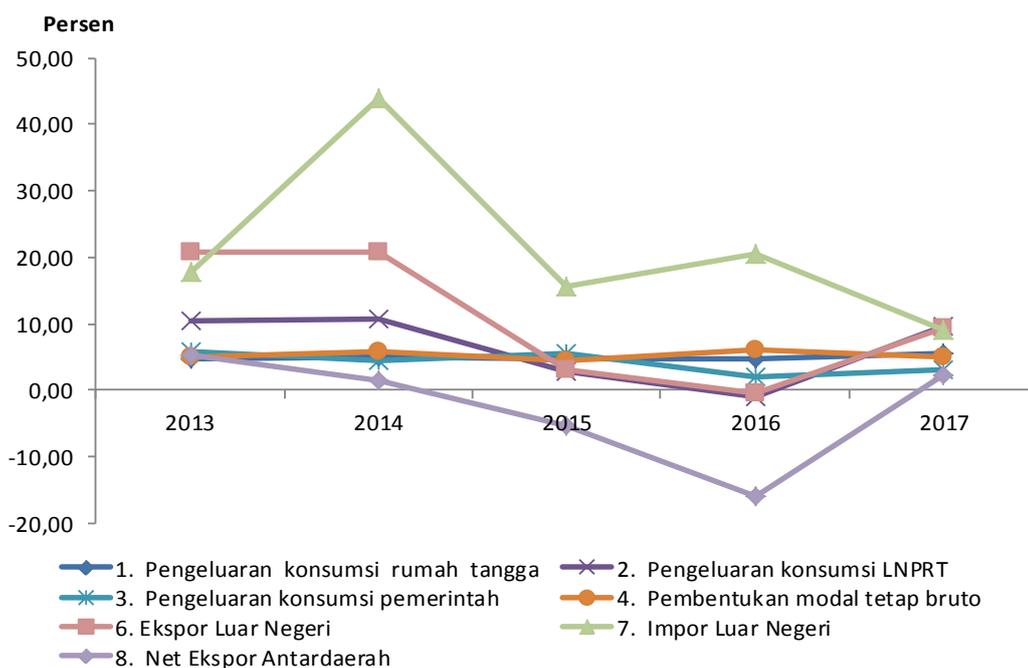
Pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran dibangun oleh 9 (sembilan) komponen utama, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan ekspor antardaerah

netto. Menurut Eachern (2000: 149) untuk memahami pendekatan PDRB sisi pengeluaran, agregat sembilan komponen tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran/pembelian pemerintah, dan ekspor netto. Oleh karena itu dalam pembahasan ini pengamatan tren pertumbuhan PDRB sisi pengeluaran difokuskan pada empat komponen tersebut.

Pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2013-2017 terlihat masih menunjukkan arah perkembangan yang belum baik. Dalam kurun waktu ini pertumbuhan masih lebih banyak dikendalikan oleh kegiatan impor luar negeri, konsumsi rumah tangga, dan pembentukan modal tetap bruto. Impor luar negeri merupakan faktor pengurang dalam PDRB. Bila impor luar negeri tidak dikondisikan dengan baik dalam jangka panjang akan mempengaruhi cadangan devisa DIY. Ekspor luar negeri yang diharapkan menjadi andalan perdagangan DIY ternyata belum mampu mengimbangi kebutuhan arus masuk barang dan jasa dari luar negeri. Seharusnya impor luar negeri dapat diimbangi oleh kinerja ekspor luar negeri. Setelah mengalami kontraksi di 2016 ekspor luar negeri DIY tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 9,26 persen. Kinerja pertumbuhan ekspor antardaerah DIY sering mengalami kontraksi. Pada tahun 2017, komponen ekspor antardaerah netto kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi di dua tahun sebelumnya. Hal ini memberikan harapan yang baik karena nilai produk barang dan jasa DIY yang keluar DIY tinggi dari nilai produk barang dan jasa yang masuk DIY.

Dengan demikian, dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi DIY digerakkan oleh semua komponen. Selama kurun waktu 2013-2017 pertumbuhan ekonomi pada kisaran angka 4,95 hingga 5,47 persen per tahun. Meskipun pertumbuhannya tidak tinggi namun

Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran (persen) 2013-2017



relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,11 persen. Rata-rata pertumbuhan ini masih sedikit lebih rendah dibanding dengan rata-rata pertumbuhan periode 2012-2016 yang sebesar 5,16 persen.

Tren pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran juga mencatat bahwa DIY ternyata masih menjadi ladang pemasaran produk luar provinsi baik dari hasil produk pertanian maupun industri pengolahan. Hal ini menyangkut kebutuhan komoditas dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain yang harus disuplai dari luar provinsi karena produksi lokal tidak mencukupi. Sementara dari industri pengolahan penyebab tingginya impor ditengarai dari bahan baku industri besar-sedang dan juga industri mikro-kecil DIY yang didatangkan dari luar provinsi bahkan harus impor dari luar negeri, seperti bahan kerajinan perak.

2. Pengurangan Angka Pengangguran

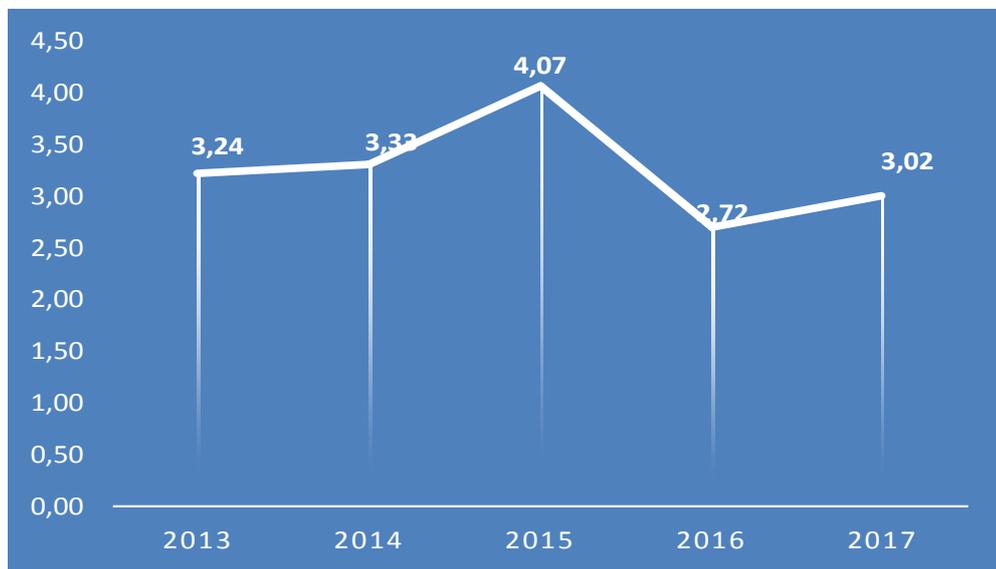
Pengangguran tidak semata masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindakan kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan, dan bahkan lebih luas merambah *chaos* politik bagi pemerintahan.

Setiap manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk bertahan hidup. Manusia juga butuh biaya untuk interaksi sosial dengan lingkungannya agar diterima di masyarakat. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup bila tidak bekerja, karena Tuhan juga mewajibkan manusia untuk mencari nafkah untuk kehidupan dirinya. Demikain pula berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar semua penduduknya bekerja. Melalui bekerja berarti seseorang memiliki produksi. Oleh karena itu seberapa pun hasil yang didapat dari bekerja akan lebih baik dari pada tidak memiliki produksi sama sekali.

Pengangguran muncul antara lain disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja. Penyebab lain adalah kompetensi kerja tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia. Kurang efektifnya akses informasi pasar kerja bagi para pencari kerja juga mendukung meningkatnya jumlah pengangguran. Fenomena lain dari masalah pengangguran adalah berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan antara lain perusahaan menutup/mengurangi aktivitas produksi akibat internal perusahaan maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, dan sebagainya. Untuk membatasi konsep yang ada, BPS mendefinisikan pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pada tahun 2013 di DIY masih terdapat sekitar 63,2 ribu orang yang menganggur dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bukan karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Mereka yang menganggur ini adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran 2013 yang sebesar 3,24 persen meskipun tergolong rendah namun pemerintah mempunyai komitmen program untuk tersebut dikurangi. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional, dengan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah DIY dalam mengatasi pengangguran. Pada tahun 2017 angka pengangguran mampu ditekan hingga menjadi 3,02 persen, meskipun secara absolut jumlah pengangguran masih lebih besar yaitu 64 ribu orang.

Gambar 6.3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY (persen), 2013-2017 (Maret)



3. Pengurangan Kemiskinan

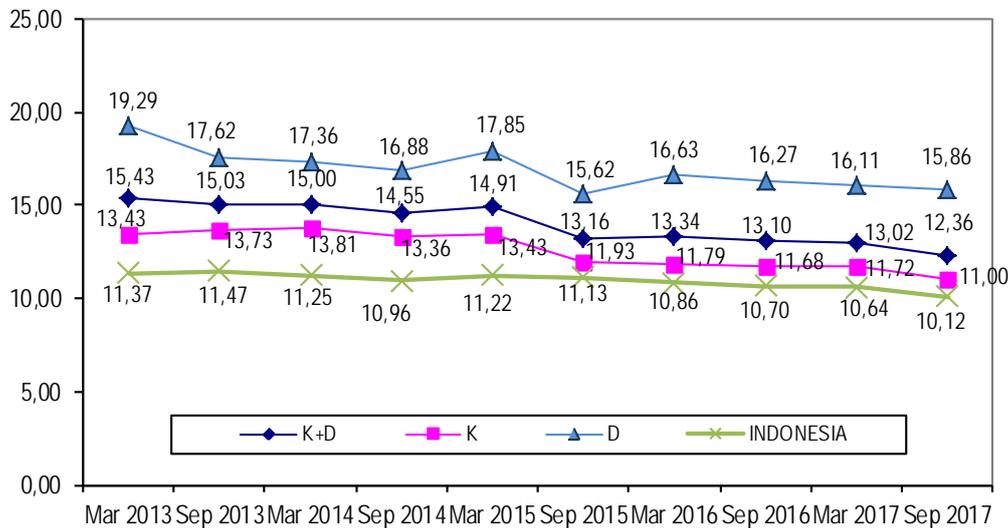
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah.

Tingkat kemiskinan di DIY pada periode 2013 sampai dengan September 2017 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin 2013 sebesar 15,43 persen,

turun menjadi 12,36 persen pada September 2017. Kemiskinan di wilayah perdesaan terlihat masih lebih tinggi, namun laju penurunan jauh lebih cepat yaitu 5,43 persen per tahun. Selama kurun waktu 2013-2017 jumlah penduduk miskin DIY mampu ditekan dengan tingkat penurunan rata-rata 2,73 persen per tahun, penurunan.

Dibanding tingkat kemiskinan nasional, DIY memang masih lebih tinggi, tetapi gap persentasenya terlihat semakin kecil. Hal ini juga mengindikasikan bahwa akselerasi penurunan tingkat kemiskinan di DIY lebih cepat. Dibanding provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tingkat kemiskinan DIY masih tergolong tinggi jauh di atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Posisi DIY tertinggi di antara enam provinsi di Pulau Jawa, padahal tahun sebelumnya angka kemiskinan DIY masih di bawah Jawa Tengah.

Gambar 6.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Nasional (persen) 2013-2017



B. Posisi dan Kualitas Pertumbuhan Kabupaten/Kota

Mencermati angka pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa lepas dari membicarakan kualitas pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi disebut berkualitas bila hasil pertumbuhan mensejahterakan masyarakat. Kualitas pertumbuhan ekonomi juga bisa dideteksi bila diikuti oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

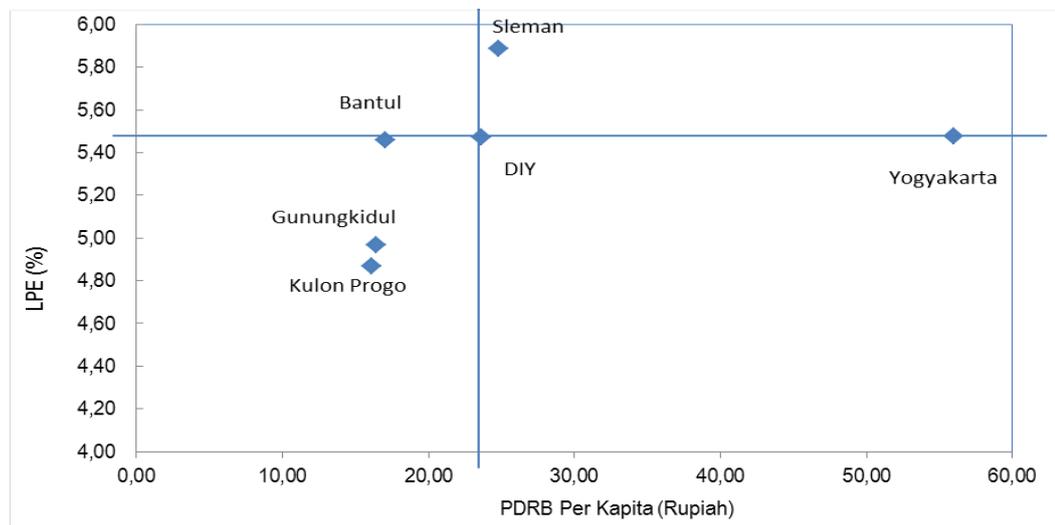
1. Sebaran Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran wilayahnya. Perlu ditinjau lebih jauh sebaran dan tingkat kesenjangan sebaran pertumbuhannya. Salah satu ciri disebut mempunyai pertumbuhan ekonomi berkualitas bila sebaran pertumbuhan relatif merata di wilayah

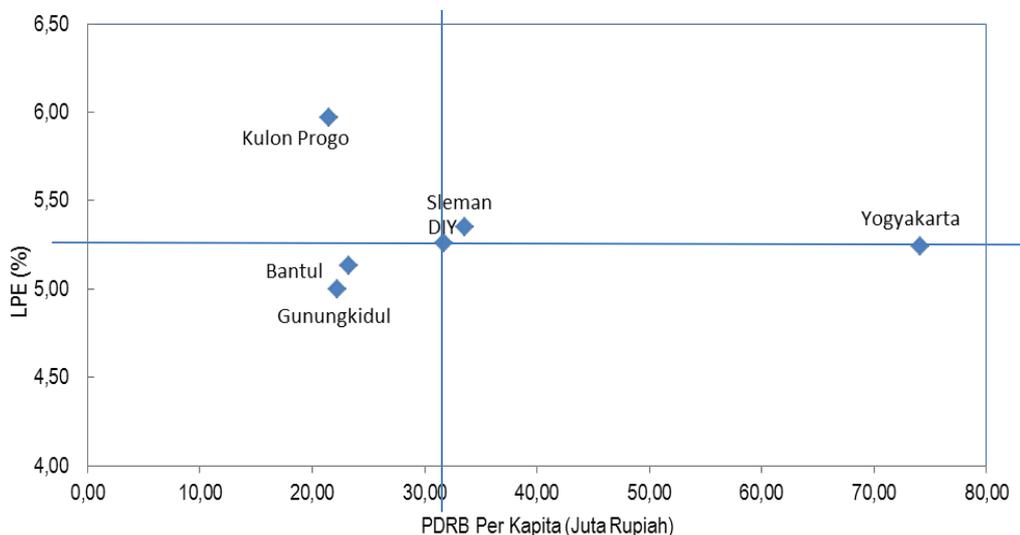
cakupannya dan tidak ada perbedaan yang mencolok tingkat pendapatan penduduknya. Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah pada periode 2013–2017 dapat dilihat dari posisi masing-masing kabupaten/kota terhadap DIY pada **bidang pencaran (scattered plot)** yang semula diperkenalkan oleh Klassen dengan sebutan **Tipologi Klassen**. Berdasar pada metode Tipologi Klassen ini, laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita kabupaten/kota dapat dipetakan dan hasilnya seperti yang terlihat pada Gambar 6.5 dan Gambar 6.6.

Pada tahun 2013, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadi daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo berada pada kuadran IV yang merupakan daerah tertinggal dalam lingkup perbandingan lokal DIY. Meskipun Sleman berada di kuadran II bersama Kota Yogyakarta sebagai daerah yang maju

Gambar 6.5. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2013



Gambar 6.6. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2017



dan cepat tumbuh, namun posisi Sleman masih rentan karena di ambang batas bawah (Gambar 6.5).

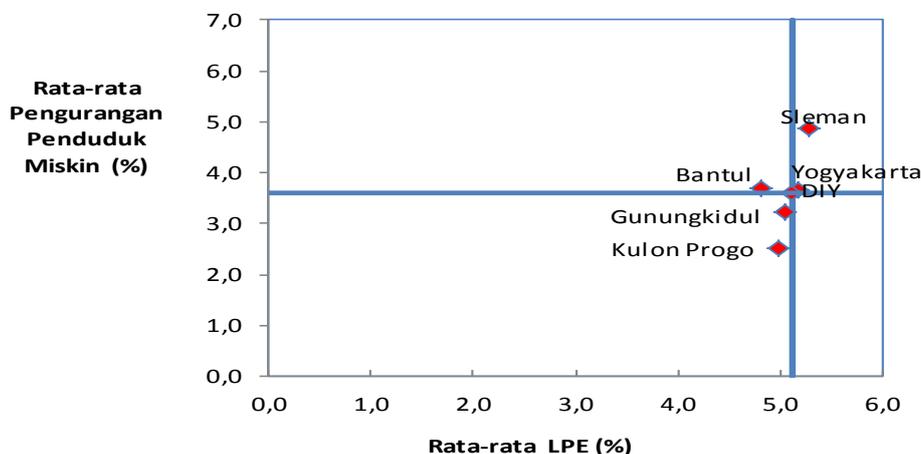
Pada tahun 2017 Kulon Progo melesat naik di kuadran I yaitu menjadi daerah yang berkembang cepat karena laju pertumbuhannya meloncat melampaui rata-rata provinsi meskipun PDRB per kapita Kulon Progo masih di bawah rata-rata provinsi. Sementara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta posisinya tetap di Kuadran II yaitu daerah yang maju dan cepat tumbuh. Posisi Gunungkidul dan Bantul dalam kurun waktu lima tahun stagnan pada kategori daerah tertinggal namun level pertumbuhan ekonominya bergerak ke atas mendekati rata-rata provinsi (Gambar 6.6).

Skema Tipologi Klassen menurut kabupaten/kota wilayah DIY di atas menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Beberapa mega proyek sudah dalam proses berjalan, seperti pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo melesat di atas pertumbuhan semua kabupaten/kota di DIY. Pergerakan dari tahun 2013 ke 2017 tersebut mengindikasikan kesenjangan antarwilayah mulai dapat ditekan, dengan menggerakkan sumber pertumbuhan untuk Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Hanya saja, untuk PDRB per kapita masih terdapat ketimpangan yang lebar terutama dengan Kota Yogyakarta. Dengan demikian hingga tahun 2017 ini pembangunan sudah dapat berhasil meningkatkan level ekonomi karena laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota makin tinggi namun masih menyisakan kesenjangan pendapatan penduduk antarwilayah.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6.7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut. **Pertama**, Kabupaten Kulon Progo dan Gunung

Gambar 6.7. Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di DIY, 2013-2017



Kidul terletak di kuadran IV, merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan pengurangan kemiskinan juga di bawah rata-rata provinsi DIY (*low-growth, less pro-poor*). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah mempercepat program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang.

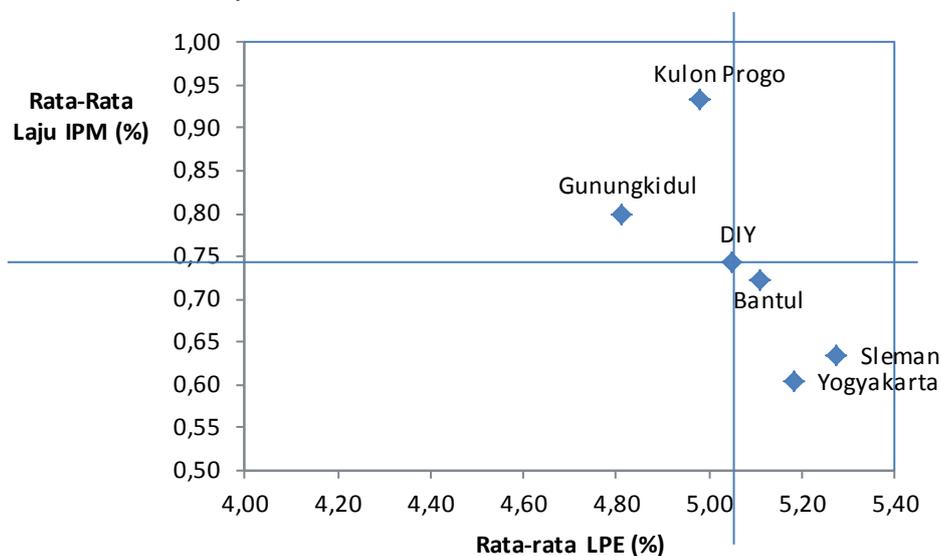
Kedua, Kabupaten Bantul berada di kuadran I, rata-rata pengurangan penduduk lebih cepat dibanding rata-rata provinsi, tetapi rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata provinsi (*low growth, pro-poor*).

Ketiga, Kabupaten Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terletak di kuadran II, merupakan kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan pengurangan kemiskinan juga di atas rata-rata provinsi (*pro-growth, pro-poor*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut perlu dijaga dan selalu diupayakan untuk memberikan dampak penurunan angka kemiskinan. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pemerataan pengembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6.8 menunjukkan plot kabupaten/kota di DIY berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama kurun waktu 2013-2017 dengan penjelasan sebagai berikut. **Pertama**, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi, tetapi peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi (*low-growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program

Gambar 6.8. Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota di DIY, 2013-2017



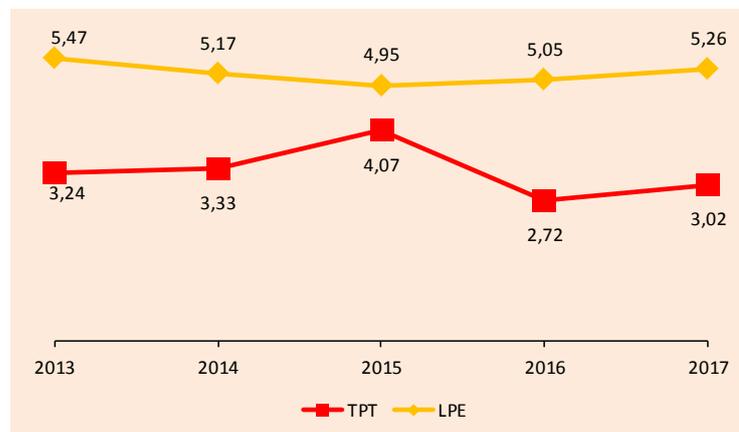
pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi untuk Kulon Progo dan Gunungkidul adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi berkembang. Potensi sumber daya lokal yang dimiliki harus diberdayakan secara optimal. Dalam jangka waktu pendek kedua daerah tersebut berpotensi untuk mengembangkan sektor industri manufaktur, perdagangan, pertanian, perikanan, dan kelautan, serta jasa-jasa.

Kedua, Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta berada di kuadran III, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas rata-rata, tetapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Pada tahun 2016, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dirancang untuk data estimasi kabupaten/kota. Oleh karena itu data tingkat pengangguran terbuka tidak tersedia sampai dengan level kabupaten/kota. Untuk itu dalam bahasan ini akan dilihat hubungan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran di level provinsi.

Gambar 6.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di DIY (persen), 2013-2017



Gambar 6.9 memperlihatkan hubungan pergerakan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) DIY untuk tahun 2013 hingga 2017. Ada kecenderungan yang dapat dijelaskan bahwa bila laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka persentase tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, bila pertumbuhan ekonomi melambat maka akan diiringi meningkatnya persentase tingkat pengangguran, seperti kondisi tahun 2015.

Sisi lain untuk melihat hubungan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran adalah menggunakan elastisitas dari laju penurunan pengangguran terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Tabel 6.1 menunjukkan laju dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi DIY dan laju pertumbuhan dan rata-rata laju pertumbuhan tingkat pengangguran. Berdasarkan dua indikator ini maka dihitung elastisitas pengurangan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi (EPP).

EPP dihitung berdasarkan rata-rata penurunan persentase pengangguran dan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2013-2017. Makna EPP dalam Tabel 6.1 adalah seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka akan diikuti oleh pengurangan persentase pengangguran sebesar 0,34 persen. Pada kurun waktu ini pertumbuhan ekonomi elastis dengan pengurangan persentase pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut mampu mempengaruhi penurunan angka pengangguran. Pada tahun 2013 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 63,17 ribu orang, maka angka EPP tersebut dapat diartikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen pada periode 2013-2017 akan mengurangi jumlah pengangguran rata-rata hanya sebanyak 213 orang, atau bisa juga bermakna setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menarik kesempatan kerja sebanyak 213 orang penganggur. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang dipacu kurang efektif untuk menekan jumlah pengangguran di DIY.

Tabel 6.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Penurunan Pengangguran di DIY (persen), 2013-2017

Rincian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan/ Penurunan	Elastisitas Pertumbuhan Pengangguran (EPP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,11	
Laju Pertumbuhan Jumlah Pengangguran	-16,11	2,75	22,23	-33,26	11,30	-1,72	-0,34

Sumber: BPS Provinsi DIY, data diolah.

5. Potensi Sektoral Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah membutuhkan hasil analisis ekonomi dengan menggunakan data dasar PDRB yang bermanfaat untuk membuat prioritas kebijakan agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini terkait dengan kebijakan anggaran, yaitu penentuan prioritas kebijakan tentang pengeluaran daerah sehingga optimalisasi anggaran untuk pembangunan dapat diwujudkan. Penentuan prioritas kebijakan dapat diwujudkan salah satunya dengan menentukan sektor-sektor prioritas atau unggulan. Di sisi lain, prioritas kebijakan juga dapat dilakukan dengan menentukan prioritas wilayah pelaksanaan.

Untuk menentukan sektor, subsektor, komoditas, atau wilayah pelaksanaan dapat digunakan beberapa alat analisis. Salah satu alat analisis yang relatif sering digunakan dan mudah dipahami adalah alat analisis Tipologi Klassen. Dalam pembahasan berikut analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, serta membandingkan pangsa suatu sektor (kategori) dengan nilai rata-ratanya provinsi.

Analisis Tipologi Klassen berikut diaplikasikan untuk memadukan alat analisis hasil bagi lokasi atau *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sektoral maupun daerah. Analisis ditujukan untuk melihat posisi 17 kategori PDRB terhadap perekonomian DIY selama periode 2013-2017. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data PDRB atas dasar harga konstan 2010 DIY dan juga kabupaten/kota menurut lapangan usaha tahun 2013-2017.

Tabel 6.2. Pangsa dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota dan DIY Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017

Kategori	Kategori/Lapangan Usaha	Kulon Progo		Bantul		Gunung-kidul		Sleman		Yogyakarta	
		RPS	RPT	RPS	RPT	RPS	RPT	RPS	RPT	RPS	RPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,92	0,15	1,26	0,07	9,90	0,51	-3,27	-0,77	-9,14	-0,58
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	2,40	-0,02	-1,00	0,64	0,03	-0,23	-1,07	-0,57	-1,07
C	Industri Pengolahan	-0,47	1,87	-0,57	0,26	-5,11	0,74	-2,15	-0,61	-1,69	-0,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,06	0,21	-0,02	0,72	-0,07	0,83	-0,05	-0,21	0,04	-0,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	-0,42	-0,03	-0,09	0,03	0,12	-0,06	0,05	0,02	0,06
F	Konstruksi	-0,90	1,36	-1,46	-0,15	-1,70	0,30	-0,26	0,22	-3,07	-0,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	5,28	0,26	-1,25	0,13	-0,51	0,28	-1,95	-0,07	-2,42	-0,34
H	Transportasi dan Pergudangan	2,96	-1,63	-1,30	-0,52	-1,10	-0,99	-0,13	1,58	-2,22	-1,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,70	-0,60	-0,60	0,32	-4,68	0,60	-1,26	-0,03	0,28	-0,25
J	Informasi dan Komunikasi	-4,39	0,09	-2,48	0,18	-3,13	0,60	-2,06	0,69	0,72	-0,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,67	0,47	-1,41	0,28	-1,86	0,20	-1,14	0,53	1,44	-0,48
L	Real Estate	-3,62	-0,14	-1,63	0,50	-4,30	0,58	-0,37	0,40	0,45	-0,78
M,N	Jasa Perusahaan	-0,84	-0,29	-0,71	-0,17	-0,75	0,11	0,43	0,27	-0,15	-0,47
O	Administrasi Pemerintahan	0,64	0,12	-1,82	0,22	-0,16	-0,24	-2,49	0,01	-0,01	-0,04
P	Jasa Pendidikan	-2,38	0,11	-2,68	0,07	-3,28	0,30	-0,33	0,32	-0,55	-0,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,07	0,04	-1,01	0,03	-0,84	0,22	-0,59	0,32	0,62	-0,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,34	-0,35	-0,91	0,42	0,26	0,85	-0,76	-0,08	-0,42	-0,53

Laju pertumbuhan PDRB masing-masing kategori dan pangsa (distribusi persentase) masing-masing kategori terhadap PDRB kabupaten/kota tahun 2013-2017 dihitung kemudian dicari rata-ratanya. Setelah itu laju pertumbuhan PDRB masing-masing kategori dan pangsa masing-masing kategori terhadap PDRB kabupaten/kota dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan masing-masing kategori PDRB dan rata-rata pangsa masing-masing kategori PDRB menurut lapangan usaha tahun 2013-2017 di level provinsi.

Data PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha tahun 2013-2017 secara lengkap disajikan di Tabel Lampiran. Selama kurun waktu 2013-2017 terdapat kategori-kategori yang secara kontinyu memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian kabupaten/kota di DIY. Kategori-kategori tersebut adalah pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 6.2 menyajikan rata-rata pangsa dan pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota dan jumlah kabupaten/kota untuk merepresentasikan kondisi provinsi pada periode 2013-2017. Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan Tipologi Klassen dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Identifikasi Kategori Potensial Perekonomian Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY (persen), 2013-2017

Kategori	Uraian	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya-karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	I	I	I	IV	IV
B	Pertambangan dan Penggalian	I	IV	I	IV	IV
C	Industri Pengolahan	III	III	III	IV	IV
D	Pengadaan Listrik dan Gas	III	III	III	IV	II
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	II	IV	I	III	I
F	Konstruksi	III	IV	III	III	IV
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	I	III	III	IV	IV
H	Transportasi dan Pergudangan	II	IV	IV	III	IV
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	IV	III	III	IV	II
J	Informasi dan Komunikasi	III	III	III	III	II
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	III	III	III	III	II
L	Real Estate	IV	III	III	III	II
M,N	Jasa Perusahaan	IV	IV	III	I	IV
O	Administrasi Pemerintahan	I	III	IV	III	IV
P	Jasa Pendidikan	III	III	III	III	IV
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	III	III	III	III	II
R,S,T,U	Jasa lainnya	II	III	I	IV	IV

Keterangan: I Kuadaran I = Maju dan tumbuh pesat
 II Kuadaran II = Sektor maju tapi tertekan
 III Kuadaran III = Potensial untuk berkembang
 IV Kuadaran IV = Relatif tertinggal.

Kulon Progo mempunyai potensi untuk mengembangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, dan perdagangan, dan jasa administrasi pemerintahan karena kategori-kategori tersebut yang maju dan cepat tumbuh. Kategori-kategori usaha inilah yang layak menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kulon Progo. Seyogyanya analisis lebih lanjut memang menganalisis hingga ke tingkat subsektor, komoditas, atau jenis usaha, namun lebih akurat bila analisis ini dilakukan oleh instansi teknis supaya terintegrasi dengan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang

disusun. Bantul pada periode 2013-2017 hanya lapangan usaha pertanian yang maju dan tumbuh pesat. Gunungkidul mempunyai kategori yang maju dan tumbuh pesat yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, dan jasa lainnya. Kategori yang maju dan tumbuh pesat di Sleman, yaitu jasa perusahaan. Sementara Kota Yogyakarta, mempunyai potensi maju dan cepat tumbuh untuk kategori pengadaan air, dan pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Dengan demikian Kulon Progo dan Gunungkidul merupakan kabupaten yang paling potensial karena mempunyai jumlah kategori yang paling banyak terkategori maju dan tumbuh pesat.

C. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk adalah subyek terpenting dalam pembangunan pembangunan setiap sektor dalam sebuah negara atau wilayah, mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga ke sektor politik. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaan baik masalah pekerjaan itu sendiri, tenaga kerjanya, upah, hingga masalah yang ada pada sektor.

Permasalahan yang selalu dihadapi dalam pembangunan terkait kependudukan, antara lain: tingginya angka kelahiran atau kematian, eksodus migrasi, persebaran yang tidak merata, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan, pemukiman kumuh, rendahnya tingkat kesehatan, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang muncul di ketenagakerjaan di antaranya adalah pengangguran, upah minimum, dan minimnya lapangan atau kesempatan kerja.

Sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan ekonomi permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan, perumusan program, dan implikasi pembangunan. Oleh karena itu dalam pembahasan berikut mengurai permasalahan-permasalahan penting yang dapat menjadi penyebab berbagai simpul permasalahan yang mempengaruhi hasil akhir pembangunan yang diukur dengan PDRB.

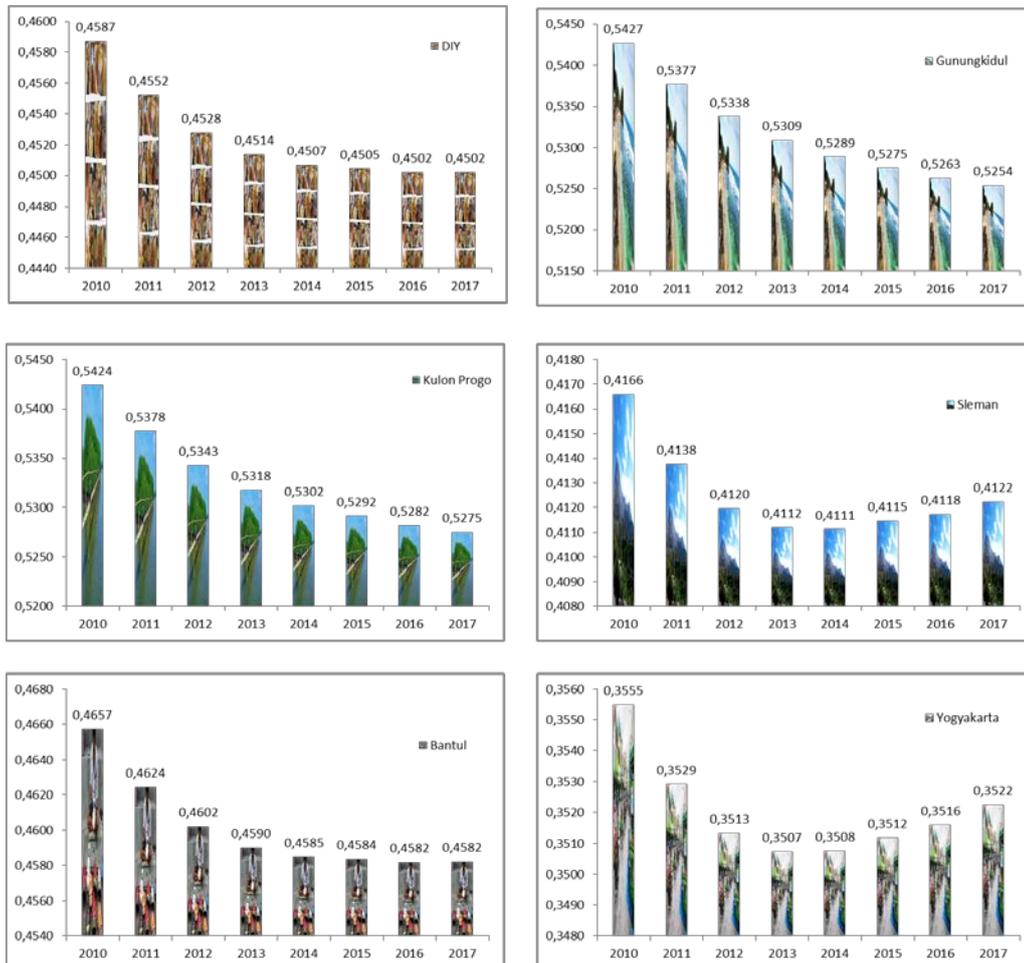
1. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio/DR*)

Hasil penghitungan angka DR menjelaskan bahwa setiap 100 orang penduduk DIY yang produktif secara ekonomis (umur 15-64 tahun) harus menanggung sejumlah penduduk nonproduktif yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas. Meskipun hingga 2016, angka beban tanggungan penduduk DIY belum berkurang secara nyata, namun perubahan tersebut mempunyai arti ekonomi yang luas. Pada tahun 2016 angka DR sebesar 45,02 sedikit lebih rendah dibanding angka DR tahun 2012 yang sebesar 45,28. Penurunan angka DR yang hanya sekitar 0,26 poin tersebut mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir beban tanggungan penduduk usia produktif secara jumlah

hanya berkurang sedikit. Kondisi ini dalam sudut pandang ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk karena bila rata-rata pendapatan penduduk usia produktif tidak naik atau kenaikannya hanya menyesuaikan inflasi harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari maka bisa dikatakan tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi penduduk DIY.

Angka ketergantungan DIY masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk DIY yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor

Gambar 6.10. Angka Beban Tanggungan Penduduk Kabupaten/Kota dan DIY, 2010-2017



penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dibagikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/tidak produktif. Perkembangan angka DR selama sewindu terakhir cenderung semakin menurun. Meskipun penurunan angka DR tersebut relatif kecil namun bila dikalkulasi secara ekonomi anggaran pembangunan yang bisa lebih dioptimalkan cukup besar.

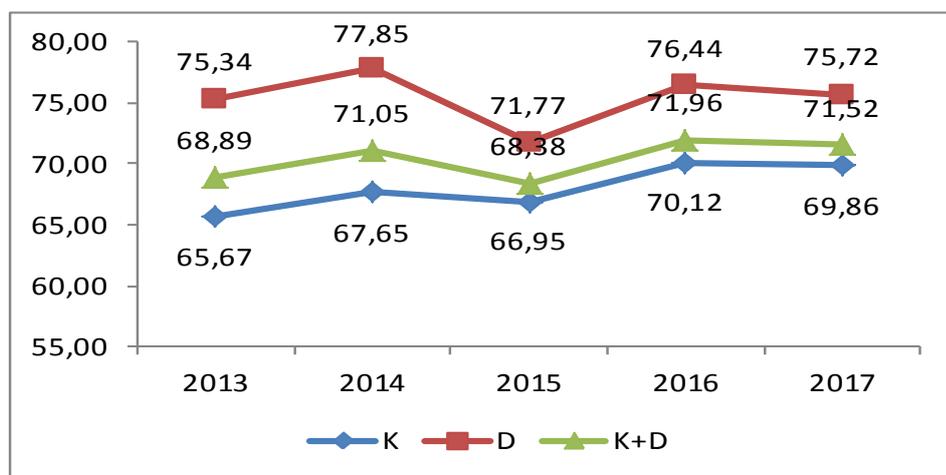
Angka DR di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul mempunyai pola penurunan yang hampir sama dengan DIY, sedangkan Sleman dan Kota Yogyakarta

mempunyai pola yang berbeda karena dari 2015 hingga 2017 cenderung meningkat lagi. Meskipun dengan besaran DR yang berbeda-beda, angka DR kabupaten/kota dan juga DIY selama sewindu terakhir sudah semakin mengecil. Angka DR di awal periode, 2010, tertinggi ada di Gunungkidul. Namun bila dilihat dari laju penurunannya maka rata-rata penurunan angka DR selama periode 2010 hingga 2017 tertinggi di Gunungkidul yaitu 0,511 per tahun. Urutan selanjutnya rata-rata laju penurunan angka DR adalah Kulon Progo sebesar 0,441, Bantul 0,271, Sleman 0,195, dan Kota Yogyakarta 0,183. Sementara laju penurunan angka DR DIY sebesar 0,312. Kondisi demikian menjelaskan bahwa dalam periode 2010 hingga 2017 angka beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif telah semakin berkurang. Komposisi penduduk produktif dan tidak produktif di Gunungkidul menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibanding kabupaten/kota lain. Sebagai daerah yang lebih maju dalam kehidupan sosial dan ekonomi Kota Yogyakarta mempunyai angka beban tanggungan yang selalu lebih rendah dibanding kabupaten lainnya di DIY.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi. Hal ini berarti secara langsung tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tenaga kerja yang berkualitas adalah tenaga kerja yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, dan juga dari pengalaman. Tenaga kerja seperti inilah merupakan modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

Gambar 6.11. Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah (persen) 2013-2017



TPAK mencerminkan ketersediaan angkatan kerja di antara penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Ketersediaan angkatan kerja menunjukkan kemampuan penduduk dalam

beraktivitas secara ekonomi, karena mencakup jumlah penduduk yang bekerja dan penduduk yang berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Sebagai pembanding adalah penduduk usia kerja atau berumur 15 tahun ke atas.

Disparitas angka TPAK antara perkotaan dan perdesaan masih relatif lebar dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Namun setelah itu selama dua tahun terakhir taraf kesenjangan TPAK berkurang. Dilihat pada klasifikasi daerah perkotaan dan perdesaan, TPAK daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan. Level TPAK di tahun 2015 sempat merosot, artinya proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja berkurang.

TPAK DIY tahun 2017 tercatat sebesar 71,52 persen, turun 0,44 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, terjadi penurunan porsi penduduk yang terserap pada lapangan kerja dan yang siap masuk ke bursa kerja. Hal ini juga berarti bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau memperoleh kesempatan kerja lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

TPAK daerah perdesaan lebih tinggi dibanding dengan TPAK daerah perkotaan dan kesenjangan telah semakin berkurang. Hal ini antara lain disebabkan karena kondisi komposisi kependudukan di daerah perkotaan yaitu jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas tetapi sebagian besar masuk dalam golongan bukan angkatan kerja tetapi mereka sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan yang merasa sudah cukup dan tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi, serta lain-lain yang tidak melakukan kegiatan apapun yang bernilai ekonomi. Sementara keadaan di desa oleh karena keadaan yang menuntut harus mencukupi kebutuhan hidup dengan mengerjakan lahan pertanian yang umumnya dibantu oleh anggota keluarga atau famili lain sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Pekerja keluarga yang dari anggota rumah tangga dalam konsep ketenagakerjaan kegiatan utama berdasarkan waktu terbanyak yang digunakan biasanya sebagai ibu rumah tangga, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi masih sekolah. Komposisi kependudukan di perdesaan juga mempengaruhi angka TPAK karena penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikannya cenderung lebih banyak merantau ke kota sehingga proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas di perdesaan lebih rendah.

3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

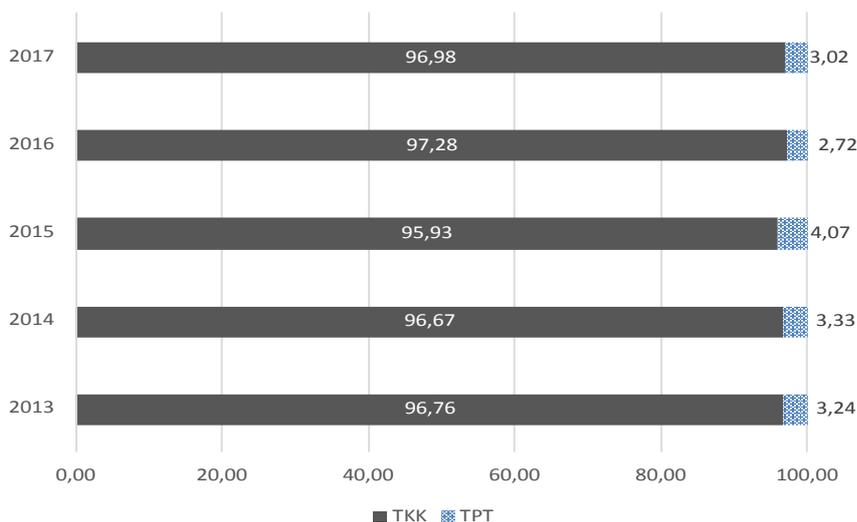
Indikator ketenagakerjaan lebih spesifik bisa dilihat dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK bermakna menjelaskan tentang keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian karena TKK merupakan bagian angkatan kerja yang benar-benar bekerja untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan. Oleh karena itu TKK tersebut juga dapat dilihat menurut lapangan usahanya.

Sekelompok penduduk lain yang merupakan bagian dari angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja. Kategori mereka yang tidak bekerja adalah mereka yang

sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat kategori yang masih bagian dari angkatan kerja disebut sebagai penganggur dan indikator pengukurannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Jumlah penduduk usia bekerja atau usia 15 tahun ke atas di DIY pada Agustus 2017 mencapai 2,96 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 1,46 persen dibanding keadaan pada Agustus 2016 yang sebanyak 2,92 juta orang atau bertambah 42,55 ribu orang. Bertambahnya penduduk usia bekerja tersebut juga diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja, yaitu bertambah sebanyak 17,75 ribu orang, atau terjadi peningkatan sebesar 0,85 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di DIY pada Agustus 2017 juga mengalami peningkatan sebanyak 0,53 persen dibanding keadaan pada Agustus 2016, yaitu dari 2,04 juta orang menjadi 2,05 juta orang, atau bertambah sekitar 10.768 orang.

Gambar 6.12. TKK dan TPT Penduduk DIY (persen), 2013-2017



Profil ketenagakerjaan dapat juga diamati mengenai penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sampai dengan Agustus 2017, sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja adalah pertanian sebesar 22,01 persen, perdagangan sebesar 18,70 persen, dan industri pengolahan 16,57 persen (BPS, Sakernas Agustus 2017).

Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2017 tidak dibarengi dengan meningkatnya tingkat kesempatan kerja (TKK) karena TKK sedikit menurun dari 97,28 persen di tahun 2016 menjadi 96,98 persen di tahun 2017. Hal ini juga berdampak pada naiknya tingkat penganggur terbuka (TPT) dari 2,72 persen menjadi 3,02 persen. Namun dalam lima tahun terakhir TKK bergerak naik, dan TPT bergerak turun.

Dilihat menurut spasial klasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan, TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. TPT perdesaan dan

perkotaan tahun 2017 masing-masing sebesar 1,66 persen dan 3,61 persen. Di daerah perdesaan karena didominasi oleh lapangan usaha pertanian, penyerapan tenaga kerja relatif tinggi, dan fenomena lain adalah penduduk desa yang telah selesai sekolah dan merasa cukup pendidikannya sebagian besar migrasi ke perkotaan untuk mencari kerja. Sebagian angkatan kerja di perdesaan meskipun belum mempunyai pekerjaan tetap sudah terbiasa menjadi pekerja keluarga dalam rumah tangga.

Bila dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat pengangguran cenderung tinggi untuk mereka yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas), dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Pada tahun 2016 TPT untuk kelompok yang berpendidikan sarjana (DI/DII/DIII/Sarjana) sebesar 4,90 persen, yang berpendidikan SLTA sebesar 4,38 persen, yang berpendidikan SLTP sebesar 1,83 persen, dan yang berpendidikan SD sebanyak 1,54 persen, serta yang tidak tamat SD sebanyak 0,56 persen. TPT di perkotaan sebesar 3,61 persen, lebih tinggi dibanding perdesaan yang sebesar 1,66 persen. Demikian pula menurut jenis kelamin pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu masing-masing sebesar 4,46 persen dan 2,48 persen (Tabel 6.4).

Tabel 6.4. TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2017 *)

Pendidikan	Kota	Desa	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Di bawah SD	0,90	0,12	0,58	0,54	0,56
2.SD	2,10	0,91	2,22	0,80	1,54
2. SMP	2,44	0,93	1,98	1,60	1,83
3. SLTA	4,26	4,86	4,84	3,65	4,38
5. D I/II/III/Sarjana	5,58	1,56	4,89	4,91	4,90
Total	3,61	1,66	3,46	2,48	3,02

Sumber : BPS Provinsi DIY
 Keterangan: * Kondisi Agustus 2017

4. Elastisitas Kesempatan Kerja

Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) merupakan angka yang menunjukkan besarnya persentase jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta terhadap besarnya persentase perubahan jumlah output atau pertumbuhan pada setiap sektor. Analisis EKK dapat menggunakan metoda *Ordinary Least Square* (OLS) atau dapat juga menggunakan rasio antara rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

Melalui EKK, diperoleh indikasi secara makro bahwa kesempatan kerja suatu sektor atau lapangan usaha bersifat elastis atau inelastis. Kesempatan kerja bersifat *elastis*, bila setiap perubahan output sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan kesempatan kerja lebih besar dari 1 persen (*increasing return to scale*). Kesempatan kerja bersifat *inelastis*, bila setiap perubahan output sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan

Bab 6 | Analisis Potensi dan Kualitas Pertumbuhan PDRB

kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*), dan kesempatan kerja bersifat *unitary*, artinya persentase perubahan output sama besarnya dengan persentase perubahan kesempatan kerja (*constan return to scale*).

Tabel 6.5. Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY (persen), 2013-2017

Kategori/Lapangan Usaha	Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	Elastisitas Kesempatan Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
				2013	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	-3,98	0,84	-4,74	28,18	22,01
2. Pertambangan dan penggalian	12,26	1,50	8,16	0,48	0,70
3. Industri pengolahan	6,31	4,18	1,51	14,12	16,57
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	-7,08	6,71	-1,05	0,26	0,18
5. Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan remediasi	36,09	3,15	11,44	0,07	0,22
6. Konstruksi	10,05	5,56	1,81	5,54	7,47
7. Perdagangan & reparasi, perawatan mobil dan spd motor	0,04	5,92	0,01	20,33	18,70
8. Pengangkutan & pergudangan	2,85	4,22	0,67	2,69	2,77
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	10,62	6,07	1,75	6,63	9,11
10. Informasi & komunikasi	11,51	6,42	1,79	0,57	0,81
11. Jasa keuangan dan asuransi	-0,07	6,06	-0,01	1,61	1,48
12. Real estat	8,05	5,97	1,35	0,14	0,18
13. Jasa perusahaan	16,44	6,04	2,72	1,37	2,31
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	-0,87	5,39	-0,16	4,02	3,56
15. Jasa pendidikan	1,03	5,94	0,17	5,76	5,51
16. Jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial	-1,96	6,28	-0,31	2,05	1,74
17. Jasa lainnya	4,17	6,18	0,67	6,19	6,69
Total	2,14	5,11	0,42	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi DIY, diolah dari data SAKERNAS bulan Agustus

Pada tahun 2013 jumlah tingkat kesempatan kerja yang tercipta mencapai 96,76 persen, sedangkan tahun 2017 sebesar 96,98 persen. Penghitungan EKK dalam analisis ini menggunakan metoda rasio antara rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan mengambil periode kajian tahun 2013-2017. Pada periode pengamatan tersebut, dari 17 kategori hanya 8 kategori dengan kesempatan kerja bersifat *elastis* dan 9 kategori lainnya bersifat *inelastis*. Secara umum kesempatan kerja juga bersifat *inelastis*, yaitu setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen peningkatan kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*), yaitu hanya 0,42. EKK yang *inelastis* ini juga bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut lebih bersifat padat modal (*capital Intensive*) dan masih kurang bisa menyerap peluang kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mungkin lebih berbasis

pada industri dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga kesempatan kerja yang tersedia semakin sedikit. Namun angka EKK pada periode 2013-2017 sedikit lebih tinggi dibanding dengan hasil penghitungan periode kajian 2012-2016 yang sebesar 0,06.

Meskipun sendi-sendi perekonomian 2017 telah mulai tumbuh lebih cepat namun belum banyak memberikan kesempatan kerja. Sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB semakin menurun ternyata juga mempengaruhi tingkat elastisitas kesempatan kerja, bahkan *inelastis* bernilai minus. Sementara hasil EKK *inelastis* negatif lainnya juga dialami kategori industri pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan, administrasi pemerintahan, dan jasa kesehatan manusia.

Sektor pertambangan dan penggalian dan pengelolaan air, air sampah, dan limbah mempunyai EKK yang tinggi, masing-masing sebesar 8,16 dan 11,44. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi di kedua kategori tersebut.

5. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja menghasilkan produk (Pangestu, 1997:41). Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya keterkaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Menurut J. Ravianto, (1986:3), tingkat produktivitas tenaga kerja diukur menggunakan pendekatan perbandingan antara nilai tambah dengan sumber daya yang terpakai.

Selama periode 2013-2017, tujuh lapangan usaha mengalami rata-rata pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) di atas 7 persen per tahun, yaitu: pertanian sebesar 10,4 persen, pengadaan listrik dan gas 28,15 persen, perdagangan 10,18 persen, jasa keuangan 10,07 persen, jasa pemerintahan 12,08 persen, jasa pendidikan 8,14 persen, dan jasa kesehatan manusia 11,65 persen (Tabel 6.7). Secara umum, produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir mampu tumbuh sebesar 6,55 persen per tahun. Meskipun rata-rata pertumbuhan produktivitas ini sedikit lebih rendah dibanding periode 2012-2016 yang mencapai 6,85 persen per tahun, namun masih tergolong cukup kondusif untuk mendorong geliat perekonomian di DIY. Hal ini seiring dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,11 persen per tahun.

Dikaji dari sisi produktivitas, bisa dilihat bahwa di awal periode 2013 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp45,03 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp123,4 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau Rp142 ribu per orang per hari untuk 6 hari kerja seminggu. Produktivitas tenaga kerja tahun 2017 naik mencapai Rp58,0 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp159,0 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau sekitar Rp183,1 ribu per orang per hari bila dihitung untuk 6 hari kerja seminggu.

Tabel 6.6. Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2013–2017

Kategori/Lapangan Usaha	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ Org./ Th.)		Rata-rata Pertumbuhan 2013 – 2017 (%)		Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas TK 2013-2017 (%)
	2013	2017	Ekonomi	Kesempatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	17,78	26,41	0,84	-3,98	10,40
2. Pertambangan dan penggalian	54,55	42,74	1,50	12,26	-5,92
3. Industri pengolahan	43,41	45,96	4,18	6,31	1,43
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	17,73	47,81	6,71	-7,08	28,15
5. Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan remediasi	68,22	26,91	3,15	36,09	-20,75
6. Konstruksi	77,13	73,73	5,56	10,05	-1,12
7. Perdagangan & reparasi, perawatan mobil dan spd motor	18,10	26,67	5,92	0,04	10,18
8. Pengangkutan & pergudangan	94,21	119,41	4,22	2,85	6,11
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	66,29	65,77	6,07	10,62	-0,20
10. Informasi & komunikasi	703,61	588,25	6,42	11,51	-4,38
11. Jasa keuangan dan asuransi	104,39	153,22	6,06	-0,07	10,07
12. Real estat	2141,90	2265,59	5,97	8,05	1,41
13. Jasa perusahaan	33,22	25,52	6,04	16,44	-6,38
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	88,51	139,66	5,39	-0,87	12,08
15. Jasa pendidikan	62,74	85,79	5,94	1,03	8,14
16. Jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial	54,30	84,31	6,28	-1,96	11,63
17. Jasa lainnya	18,40	22,63	6,18	4,17	5,31
Total	45,03	58,04	5,11	2,14	6,55

Sumber : BPS Provinsi DIY

Dilihat secara sektoral, produktivitas tertinggi adalah sektor real estat dan sektor informasi dan komunikasi yang masing-masing memiliki produktivitas Rp2.266 juta per pekerja setahun dan Rp588,2 juta per pekerja setahun. Dua sektor tersebut nilai produktivitasnya jauh di atas sektor-sektor yang lain dan secara konsisten memimpin baik di awal maupun di akhir periode kajian.

Gambar 6.13 dan 6.14 merupakan hasil analisis Tipologi Klassen dengan mengambil periode kajian tahun 2013 dan 2017. Selama jeda waktu lima tahun telah terjadi perubahan capaian pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. Kondisi pertumbuhan ekonomi level makro yang mengalami perlambatan dari tahun 2014 hingga 2015 dan setelah itu bergerak naik hingga tahun 2017, sehingga dampak kinerja produktivitas sektor-sektor pun berbeda-beda.

Pada tahun 2013 dan 2017 lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (kategori I), informasi dan komunikasi (kategori J), dan jasa kesehatan manusia (kategori Q) mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi maupun

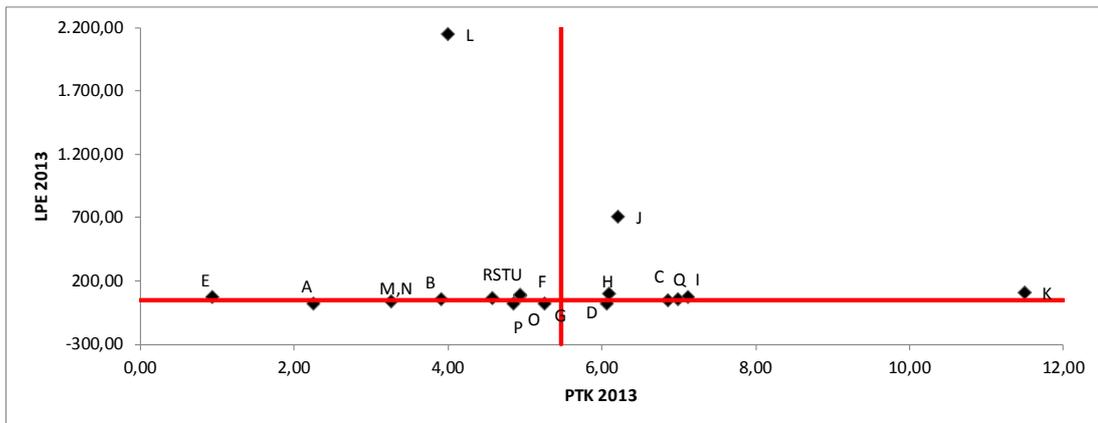
pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Menurut analisis Tipologi Klassen ketiga kategori tersebut dikatakan sebagai “sektor yang produktif dan tumbuh cepat”.

Lapangan usaha konstruksi (kategori F) dan jasa pendidikan (kategori P) di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerjanya mampu tumbuh di atas rata-rata, padahal di 2013 pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata. Hal ini berarti pada tahun 2017 lapangan usaha konstruksi dan juga jasa pendidikan termasuk sektor yang “produktif dan tumbuh pesat”.

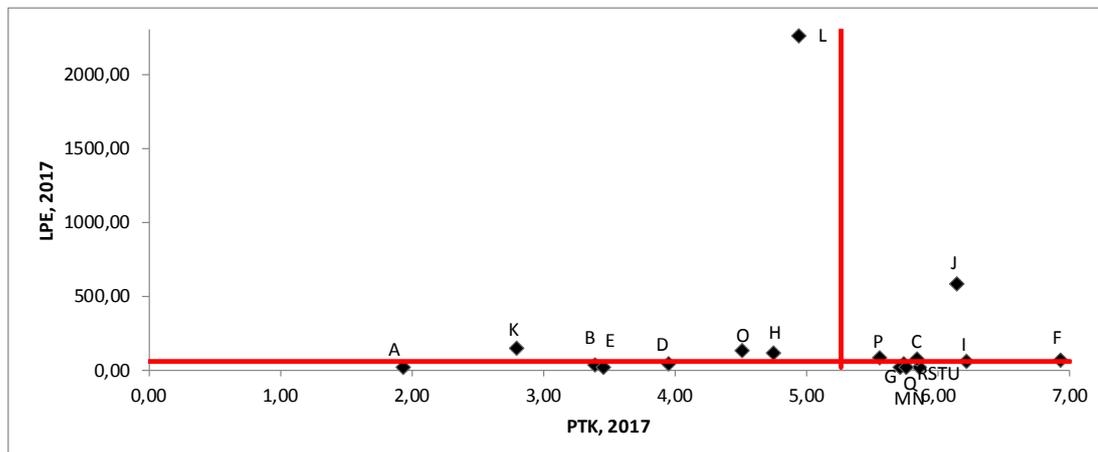
Kondisi sebaliknya terjadi untuk lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan (kategori H) dan jasa keuangan dan asuransi (kategori K). Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dua lapangan usaha ini bertahan di atas rata-rata tetapi pertumbuhan ekonominya turun dari di atas rata-rata menjadi di bawah rata-rata. Dengan demikian kategori H dan K di tahun 2017 turun dari kelompok “sektor yang produktif dan tumbuh pesat” menjadi “sektor yang maju tetapi tertekan (kurang produktif)”.

Dilihat secara parsial dari dimensi pencapaian produktivitas, secara rata-rata terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kategori jasa keuangan (K), administrasi

Gambar 6.13. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2013



Gambar 6.14. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2017



pemerintahan (O), jasa pendidikan (P), dan jasa kesehatan manusia (Q) di tahun 2013 dan 2017 produktivitasnya di atas rata-rata produktivitas total, ternyata juga mempunyai rata-rata pertumbuhan produktivitas di atas pertumbuhan rata-rata agregatnya yang sebesar 6,55 persen (Tabel 6.7). Sementara itu, kategori pengadaan listrik dan gas merupakan yang tertinggi pertumbuhan produktivitasnya, yaitu 28,15 persen per tahun.

Dengan demikian sektor yang dapat diandalkan dari sisi pertumbuhan dan produktivitasnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, dan jasa kesehatan manusia. Hal ini memberikan indikasi bahwa arah penguatan ekonomi D.I.Yogyakarta bertumpu pada kelompok sektor sekunder. Sementara sektor industri pengolahan dan perdagangan karena pangsa distribusinya cukup besar masih perlu dipacu kinerja ekonominya. Inovasi produksi, perluasan kualitas dan kauntitas pemasaran, dan promosi perlu diintensifkan lagi untuk mendatangkan pemodal besar sehingga tertarik mengembangkan usahanya di D.I. Yogyakarta.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali DIY, karena menyangkut berbagai aspek seperti kesenjangan pendapatan penduduk, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, ketimpangan, dan permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu maka kemiskinan menjadi primadona obyek pembangunan. Keberhasilan pembangunan oleh pemerintah atau kesuksesan pemimpin sering dikaitkan dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan, namun kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi kemiskinan melahirkan kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Dikategorikan kemiskinan relatif, bila seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seseorang atau sekelompok orang disebut hampir miskin, bila sebelumnya berkecukupan menjadi hampir miskin karena kondisi usahanya yang merosot.

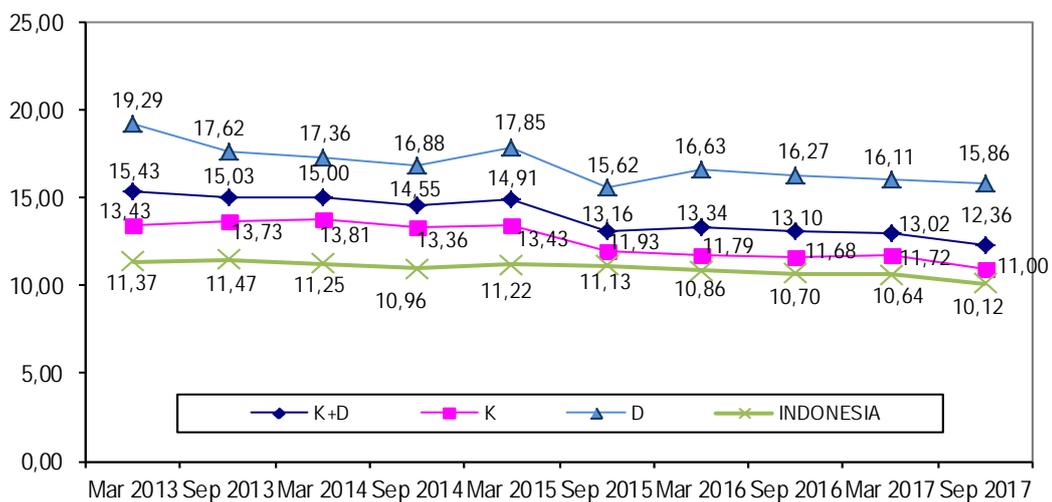
Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Dalam bahasan ini hanya akan dibahas tentang kemiskinan yang angkanya dirilis oleh BPS dan digunakan secara resmi oleh pemerintah. Secara umum konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemiskinan absolut.

1. Kemiskinan

Perhitungan kemiskinan yang dilakukan BPS dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), data dasar mengacu pada data Susenas. Pada kurun waktu lima tahun terakhir tren perkembangan persentase penduduk miskin DIY terlihat menurun, dari 15,03 persen di September 2013 menjadi 12,36 persen kondisi September 2017. Jumlah penduduk miskin DIY kondisi September 2013 sebesar 535,18 ribu jiwa turun menjadi 466,33 ribu jiwa kondisi September 2017. Secara rata-rata jumlah penduduk miskin DIY turun 3,38 persen per tahun.

Gambar 6.15. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2013 - 2017



Di level nasional, posisi persentase penduduk miskin DIY masih lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin rata-rata nasional. Pada kondisi September 2017 persentase penduduk miskin Indonesia sebanyak 10,12 persen (Gambar 6.15).

Masyarakat perkotaan dan perdesaan mempunyai pola hidup yang berbeda, baik dari mata pencaharian, tingkat konsumsi, maupun dari dimensi kehidupan sosialnya. Umumnya daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan juga pemerintahan

sehingga jenis lapangan pekerjaan lebih beragam. Sementara daerah pedesaan biasanya dihuni oleh petani sehingga kesempatan kerja yang tersedia sebagian besar adalah lapangan pekerjaan pertanian sedangkan pilihan jenis pekerjaan lainnya sangat terbatas.

Perbedaan karakteristik sosial ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan tersebut mendasari perlu untuk melihat perbedaan tingkat kemiskinannya. Sampai dengan kondisi September 2017, persentase penduduk miskin di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibanding dengan di perkotaan. Namun dilihat tren penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih cepat. Ini bisa menjadi indikasi bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan berhasil memacu pengurangan kemiskinan terutama di pedesaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan tahun 2013 (September) sebesar 17,62 **persen** turun menjadi 15,86 persen pada September 2017. Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin turun dari 13,73 persen pada September 2013 menjadi 11,0 persen pada September 2017.

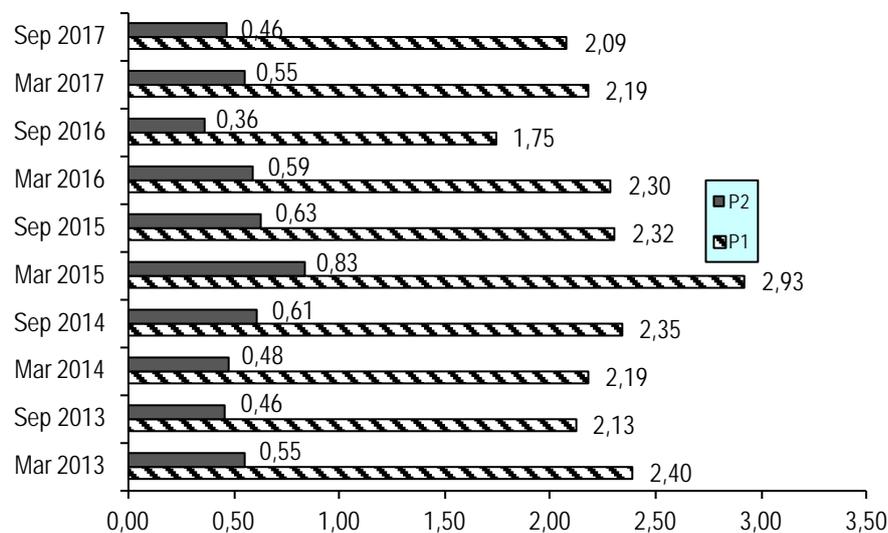
Lebih jauh dilihat rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin sejak September 2013 hingga September 2017, di perkotaan turun sebesar 2,15 persen per tahun, sedangkan di pedesaan turun sebesar 5,4 persen per tahun. Dalam kurun waktu yang sama kesenjangan persentase kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan tampak tidak mengalami perbedaan yang berarti. Meskipun ini dapat dimaknai mencerminkan ada keselarasan program pengentasan kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan, namun rasanya lebih penting untuk mengevaluasi programnya karena angka kemiskinan DIY secara posisi masih relatif tinggi baik secara nasional maupun bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Garis kemiskinan (GK) yang digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan peningkatan sebesar 30,42 persen, yaitu dari Rp303.843,- per kapita per bulan pada September 2013 menjadi Rp396.271,- per kapita per bulan pada September 2017. Kenaikan garis kemiskinan antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan harga (inflasi) komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, pola konsumsi masyarakat, dan perubahan komoditas barang atau jasa yang dikonsumsi.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu ukuran lain seperti **indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1)** dan **indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2)**. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P_2) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P_1 dan P_2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Perkembangan angka Indeks kedalaman (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) selama periode 2013 hingga 2017 menunjukkan arah penurunan. Artinya, kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan di DIY semakin berkurang, dari 2,13 persen di September 2013 menjadi 2,09 persen di September 2017. Sementara ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mengalami fluktuasi dan kondisi September 2013 besarnya sama dengan September 2017. Melalui dua ukuran ini (P_1 dan P_2) bisa dilihat keberhasilan dari program-program percepatan pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Gambar 6.16. Indeks Kedalaman (P_1) dan Indeks Keparahannya (P_2) Kemiskinan di DIY, 2013 – 2017



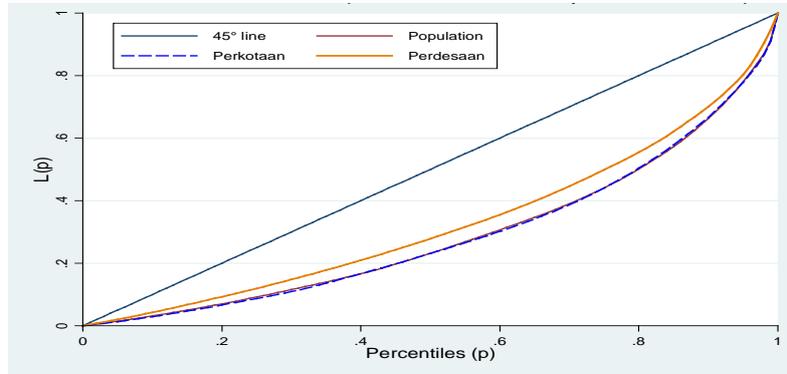
2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan yang disampaikan para pakar, namun pada kajian ini hanya menggunakan Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan Kriteria Bank Dunia yang paling lazim digunakan. Ketiga ukuran ini cukup menjelaskan besaran nilai sehingga tingkat perubahan dari tahun ke tahun dapat diamati.

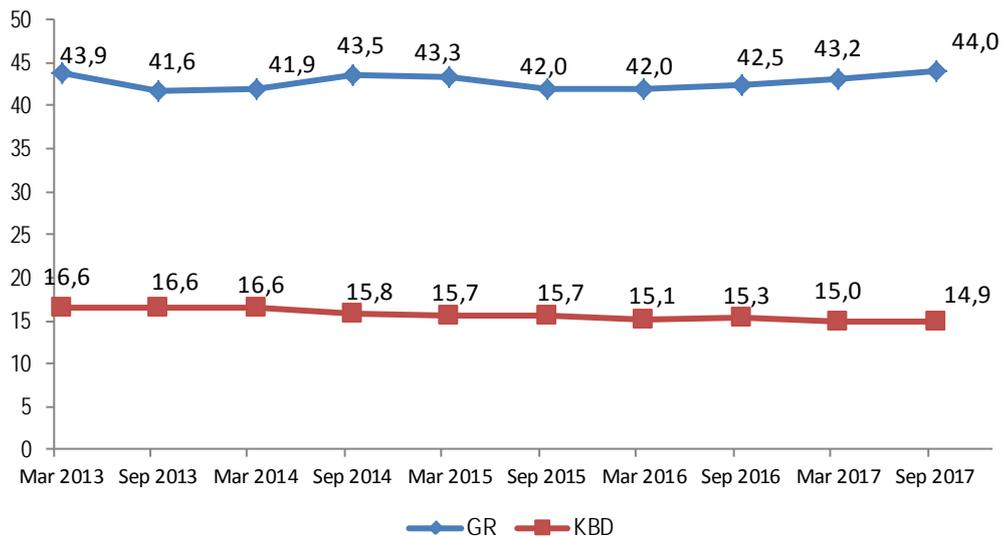
Berdasarkan data Susenas September 2017, ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilihat di Gambar 6.17, dan tampak bahwa Kurva Lorenz masih jauh dari garis diagonal. Ini mencerminkan distribusi pendapatan di DIY masih timpang atau belum merata. Demikian pula dengan Gambar 6.18 terjelaskan bahwa pemerataan pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini selama periode 2013-2017 perkembangannya juga masih belum memperlihatkan kecenderungan menggembirakan. Ketimpangan pendapatan yang diterima antarpenduduk meskipun masih dalam kategori moderat tetapi posisinya masih dekat dengan batas kategori timpang. Kondisi September 2017, rasio gini DIY menembus

angka 0,44. Angka ini tertinggi selama lima tahun terakhir, dan ini mencerminkan ketimpangan pendapatan antarpenduduk semakin melebar.

Gambar 6.17. Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas September 2017



Gambar 6.18. Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY (persen) 2013–2017



Indikator lain untuk mendeteksi tingkat distribusi pendapatan adalah ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD). Hasil hitungan ukuran ketimpangan KBD menjelaskan kondisi yang serupa. Persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah semakin menurun dari 16,6 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 14,9 persen pada tahun 2017. Demikian pula 40 persen penduduk berpendapatan menengah porsi distribusinya ditengarai semakin berkurang. Sebaliknya, pada golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi nampaknya mendapatkan porsi distribusi pendapatan yang semakin lebih besar dan hingga pada kondisi September 2017 porsinya mencapai 50,96 persen dari total pendapatan (Tabel 6.8).

Fenomena kenaikan Rasio Gini dan penurunan persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terrendah menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di DIY masih **timpang** , meskipun berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh H.T Oshima, ketimpangan pendapatan penduduk DIY masih dalam skala ketimpangan moderat (pada kisaran 30-50 persen). Berdasarkan skala ukuran kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk DIY juga masuk di skala moderat (*range* 12-17 persen).

Selama periode 2013–2017, pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terrendah berkurang sebesar 0,13 poin, dan pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan menengah juga berkurang sekitar 0,83 poin. Berkurangnya persentase pendapatan yang diterima oleh 80 persen penduduk golongan menengah ke bawah ternyata beralih dinikmati oleh penduduk berpendapatan tinggi. Pada golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi kondisi September 2017 menikmati 51 persen dari total pendapatan (Tabel 6.8), naik dibanding kondisi sebelumnya.

Tabel 6.7. Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2013 – 2017

Indikator	Mar 2014	Sep 2014	Mar 2015	Sep 2015	Mar 2016	Sep 2016	Mar 2017	Sep 2017
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40% penduduk pendapatan terrendah	15,81	15,67	15,08	15,33	15,81	15,67	14,98	14,85
40% penduduk pendapatan menengah	33,75	34,05	37,13	35,67	33,75	34,05	35,02	34,19
20% penduduk pendapatan tertinggi	50,44	50,28	47,79	49,00	50,44	50,28	50,00	50,96
Rasio Gini (%)	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SUSENAS

E. Disparitas antar Kabupaten/Kota

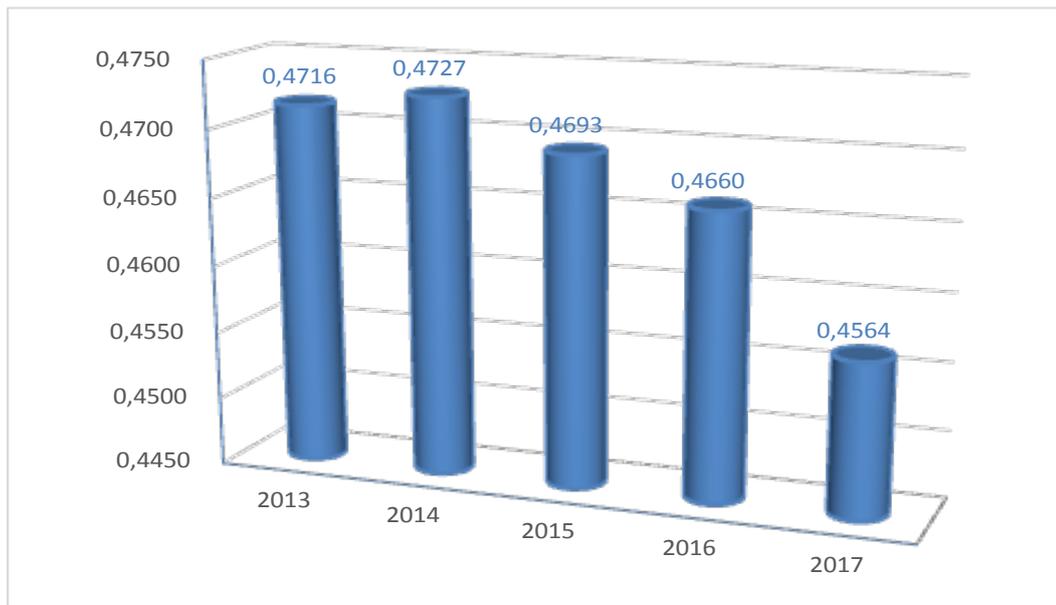
Disparitas pendapatan antarindividu penduduk seperti yang dijelaskan dengan Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia cukup populer digunakan sebagai salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain indikator disparitas pendapatan antar individu, disparitas antar wilayah juga perlu dicermati, sebagai indikator ketimpangan antar kabupaten/kota.

1. Indeks Ketimpangan Regional

Berdasarkan data PDRB per kapita kabupaten/kota dan provinsi serta data jumlah penduduk dapat diukur indikator ketimpangan antarwilayah dalam provinsi. Indikator tersebut disebut Indeks Williamson, yang dimaknai sebagai tingkat ketimpangan antarkabupaten/kota. Ketimpangan yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2013-2017 menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 47,16 persen pada

tahun 2013 menjadi 45,64 persen pada tahun 2017 (Gambar 6.19). Penurunan ini menunjukkan bahwa antarregion (kabupaten/kota) di wilayah DIY pengurangan ketimpangannya semakin membaik meskipun levelnya ketimpangan perekonomiannya moderat yang mendekati batas atas. Hal ini juga terindikasikan dari analisis Tipologi Klassen yang menunjukkan adanya pengurangan kesenjangan antar kabupaten/kota di DIY.

Gambar 6.19. Indeks Williamson DIY, 2013-2017



2. Disparitas Sektoral (*Shift Share Analysis*)

Berdasarkan kategori lapangan usaha ekonomi suatu daerah mempunyai ciri khas yang unik antara yang satu dengan yang lainnya. Besaran kinerja hasil output sektor ekonomi daerah tersebut membuat perbedaan skala ekonomi antardaerah dan bila perbedaan tersebut mencolok timpang maka menimbulkan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan yang signifikan dari pendapatan masing-masing sektor ekonomi. Kesenjangan output antarkategori dalam perekonomian dikenal dengan istilah disparitas sektoral dan dikaji dengan analisis pergeseran (*shift share analysis*). Analisis *shift share* juga berguna untuk mengkaji pergeseran serta peranan perekonomian di suatu daerah. Model ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah tertentu dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Di samping itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang lebih tinggi.

Implementasi analisis *shift share* perekonomian dalam provinsi, disparitas sektoral dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dampak pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di sekitarnya, dampak pertumbuhan ekonomi provinsi acuanya, dan juga karena kemampuan pelaku ekonomi dalam kabupaten/kota itu sendiri. Berkaitan dengan upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi, maka dipengaruhi oleh peran kabupaten/kota terhadap provinsi dan juga hubungan antarsektor atau kategori. Suatu kabupaten/kota atau sektor di kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, belum tentu memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan provinsi acuannya, karena tergantung pada perannya terhadap provinsi juga.

a. Pangsa Regional (PR)

Hasil analisis *shift share* untuk suatu periode yang dipilih dengan periode yang lain memungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan. Oleh karena itu dalam analisis ini, analisis *shift share* digunakan untuk mengkaji struktur perekonomian beserta perubahannya selama periode 2010-2017. Pertimbangan dipilihnya periode tersebut adalah melihat pergeseran struktur ekonomi dalam periode satu windu terakhir. Bila periode yang diamati terlalu pendek maka pergeserannya struktur ekonomi tidak begitu nyata.

Tabel 6.8. Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010–2017

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	873.536	1.558.843	2.012.914	1.649.808	29.699	6.124.801
2. Pertambangan & Penggalian	63.532	77.013	118.090	84.164	668	343.467
3. Industri Pengolahan	546.747	1.661.546	742.470	2.682.131	2.149.575	7.782.469
4. Pengadaan Listrik, Gas	3.900	14.934	6.756	21.817	32.592	79.999
5. Pengadaan Air	6.617	9.578	13.517	9.939	24.624	64.275
6. Konstruksi	351.938	988.053	688.026	2.017.505	1.176.380	5.221.901
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	531.530	804.320	646.884	1.337.149	1.026.296	4.346.180
8. Pengangkutan & Pergudangan	402.817	536.074	417.409	1.078.689	648.871	3.083.859
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	150.196	995.869	389.690	1.688.807	1.622.948	4.847.510
10. Informasi dan Komunikasi	238.529	895.100	562.881	1.657.527	1.868.765	5.222.801
11. Jasa Keuangan	105.974	226.965	126.567	466.686	794.365	1.720.556
12. Real Estat	145.797	643.292	243.871	1.425.899	1.339.955	3.798.815
13. Jasa Perusahaan	13.621	54.109	34.256	334.260	173.898	610.144
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	329.859	676.694	634.150	1.093.758	1.300.267	4.034.728
15. Jasa Pendidikan	251.359	700.413	452.395	1.778.954	1.400.860	4.583.980
16. Jasa Kesehatan	58.350	176.727	137.337	397.457	530.745	1.300.616
17. Jasa-jasa	176.117	210.765	244.938	416.651	406.674	1.455.144
PDRB	4.250.420	10.230.296	7.472.148	18.141.201	14.527.181	54.621.245

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Hasil perhitungan nilai PR selama periode 2010-2017, Kabupaten Sleman memiliki nilai PR yang tertinggi. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sleman menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta selama kurun waktu 2010-2017, atau dengan kata lain Kabupaten Sleman merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta. Kondisi ini masih mirip dengan hasil analisis pada periode kajian sebelumnya.

Pangsa terbesar berikutnya dicapai oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Gunungkidul dan Kulon Progo masih tetap berada di urutan keempat dan kelima.

Dengan mencermati nilai pangsa masing-masing sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Sleman maka nilai PR tertinggi terjadi pada kategori usaha industri pengolahan dan dibayangi oleh konstruksi. Di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta nilai PR sektor industri pengolahan juga merupakan yang tertinggi. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul nilai PR sektor industri pengolahan berada pada urutan kedua setelah sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan di seluruh kabupaten/kota D.I. Yogyakarta dapat menjadi *leading sector* untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

b. Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)

Analisis pergeseran dalam analisis *shift share* ditujukan untuk meneliti struktur ekonomi dan perubahannya sebagai indikator kegiatan ekonomi dalam periode 2010-2017. Komponen analisis pergeseran (*Shift Analysis*) terdiri dari nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Different Shift* (DS). Hasil perhitungan dari data PDRB provinsi dan kabupaten/kota, nilai PS dengan arah positif tertinggi di D.I. Yogyakarta dimiliki oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, kategori industri pengolahan, pertanian, dan informasi dan komunikasi memiliki nilai PS dengan arah negatif terbesar. Nilai PS positif urutan terbesar berikutnya adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan kategori jasa keuangan. Secara eksplisit hal ini mengindikasikan bahwa dalam periode 2010-2017 struktur ekonomi D.I. Yogyakarta secara makro bertumpu pada kelompok sektor tersier yang sifat output dari aktivitasnya berupa jasa. Pangsa pertanian dalam perekonomian D.I. Yogyakarta semakin menurun digeser kategori usaha lain yang semakin menguat, meskipun pertanian masih menjadi mata pencaharian utama penduduk di wilayah perdesaan. Menguatnya sektor-sektor jasa juga menunjukkan pangsa ekonomi dari wilayah perkotaan semakin mendominasi karena jasa-jasa menjadi lapangan usaha utama sebagian besar penduduk perkotaan.

Hasil penghitungan nilai PS pada level kabupaten/kota menunjukkan bahwa nilai PS yang tertinggi selama periode 2010-2017 dicapai oleh Kota Yogyakarta sama seperti periode kajian sebelumnya. Nilai PS sebesar 605.192 lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Sementara, keempat kabupaten lain justru memiliki nilai PS dengan arah negatif dan nilai negatif terbesar ada di Kabupaten Gunungkidul. Penyebab nilai PS negatif untuk masing-masing kabupaten berbeda, namun pada dasarnya dipengaruhi oleh besarnya nilai negatif PS pada tiga kategori, yaitu: pertanian, industri pengolahan, dan informasi dan komunikasi

Pendorong tingginya nilai PS di Kota Yogyakarta adalah kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan

sosial wajib, dan jasa keuangan. Tiga kategori tersebut di keempat kabupaten lain juga bernilai positif, namun tidak mampu mendorong nilai agregat PS. Di level D.I. Yogyakarta ketiga kategori tersebut tumbuh tinggi, sehingga ditengarai menjadi sektor yang memacu laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6.10 juga menjelaskan bahwa hasil penghitungan PS negatif terbesar di Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul adalah kategori pertanian. Sementara, untuk Sleman dan Kota Yogyakarta yang negatif terbesarnya adalah kategori informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, nilai PS negatif terbesar di tingkat D.I. Yogyakarta adalah kategori informasi dan komunikasi.

Tabel 6.9. Proportional Shift (PS) menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2010–2017

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	-201.384	-359.374	-464.056	-380.345	-6.847	-1.412.006
2. Pertambangan & Penggalian	-24.287	-29.440	-45.142	-32.173	-255	-131.297
3. Industri Pengolahan	-95.070	-288.913	-129.102	-466.375	-373.773	-1.353.233
4. Pengadaan Listrik, Gas	-51	-194	-88	-284	-424	-1.040
5. Pengadaan Air	-1.968	-2.848	-4.019	-2.955	-7.322	-19.112
6. Konstruksi	-6.895	-19.356	-13.478	-39.523	-23.045	-102.298
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	91.775	138.875	111.692	230.874	177.202	750.419
8. Pengangkutan & Pergudangan	8.076	10.747	8.368	21.626	13.009	61.826
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	54.730	362.883	141.998	615.381	591.383	1.766.375
10. Informasi dan Komunikasi	-73.887	-277.267	-174.358	-513.437	-578.870	-1.617.819
11. Jasa Keuangan	54.276	116.243	64.823	239.020	406.846	881.208
12. Real Estat	2.735	12.068	4.575	26.750	25.137	71.265
13. Jasa Perusahaan	-2.694	-10.701	-6.775	-66.107	-34.392	-120.669
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	113.971	233.807	219.108	377.909	449.261	1.394.056
15. Jasa Pendidikan	-14.345	-39.972	-25.818	-101.523	-79.945	-261.602
16. Jasa Kesehatan	7.318	22.166	17.225	49.850	66.567	163.126
17. Jasa-jasa	-8.375	-10.023	-11.648	-19.814	-19.340	-69.200
PDRB	-96.073	-141.298	-306.695	-61.126	605.192	0

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Kondisi perkembangan output kategori pertanian dan industri pengolahan secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya. Kategori pertanian terlihat semakin melambat pertumbuhannya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, terutama di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Sleman. Kategori industri pengolahan juga mengalami hal yang sama, meskipun perlambatannya tidak secepat kategori pertanian. Oleh karena pangsa kedua kategori tersebut dalam struktur ekonomi tergolong yang tertinggi, perkembangan ekonomi kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta mempunyai keterkaitan yang tinggi dengan pertumbuhan kategori pertanian dan industri pengolahan.

Tabel 6.10. *Different Shift (DS)* menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010–2017

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	9.124	103.039	35.777	-137.879	-10.061
2. Pertambangan & Penggalian	17.625	-9.690	-10.864	3.007	-78
3. Industri Pengolahan	23.692	109.691	42.767	-72.194	-103.957
4. Pengadaan Listrik, Gas	-122	-122	768	-114	-411
5. Pengadaan Air	-519	-95	743	338	-467
6. Konstruksi	64.099	-19.710	74.483	9.678	-128.550
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	19.250	50.221	-4.657	8.835	-73.648
8. Pengangkutan & Pergudangan	-179.202	-111.098	-114.390	596.202	-191.511
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-32.213	118.395	-34.211	-159.642	107.670
10. Informasi dan Komunikasi	4.043	-10.576	101.906	137.874	-233.246
11. Jasa Keuangan	279	14.099	20.692	21.925	-56.996
12. Real Estat	-10.445	69.074	41.361	1.631	-101.621
13. Jasa Perusahaan	-1.927	104	2.253	6.774	-7.204
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	12.497	45.074	-39.660	15.986	-33.897
15. Jasa Pendidikan	-2.185	57.289	35.635	31.104	-121.843
16. Jasa Kesehatan	-4.458	11.132	7.756	29.401	-43.831
17. Jasa-jasa	-43.624	3.853	33.189	32.801	-26.220
PDRB	-124.085	430.680	193.551	525.727	-1.025.872

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Hasil perhitungan nilai *Different Shift (DS)* menunjukkan bahwa tiga kabupaten memiliki nilai DS dengan arah positif, yakni Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Sementara, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta memiliki nilai DS dengan arah negatif. Nilai DS tertinggi selama periode 2010-2017 dicapai oleh Kabupaten Sleman, diikuti Kabupaten Bantul, dan Gunungkidul. Hasil penghitungan nilai DS ini menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman memiliki daya saing regional yang lebih kuat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Keunggulan daya saing perekonomian regional Sleman terutama ditopang oleh kategori-kategori pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, dan jasa lainnya. Jasa pendidikan pada periode ini urutannya tergeser oleh jasa lainnya dalam urutan sektor yang unggul daya saingnya. Daya saing regional Bantul terutama ditopang oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, dan pertanian, masih sama dengan kondisi periode kajian sebelumnya. Sementara itu, daya saing di Kabupaten Gunungkidul terutama ditopang oleh kategori informasi dan komunikasi dan konstruksi, dan kondisinya juga sama dengan periode kajian sebelumnya.

Nilai pergeseran netto positif (*upward different shift*) tertinggi diperoleh Kabupaten Sleman (464.600) karena delapan kategori bernilai positif, terutama pengangkutan dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa pemerintahan. Artinya, Kabupaten Sleman merupakan lokasi yang sangat menguntungkan (*locational advantage*)

bagi perkembangan lapangan usaha tersebut dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya (Tabel 6.12). Sebaliknya, Kota Yogyakarta memiliki nilai pergeseran netto negatif (*downward different shift*) tertinggi, yakni sebesar negatif 420.680. Hal ini dimungkinkan karena Kota Yogyakarta yang merupakan pusat perkotaan sudah mulai jenuh perkembangannya dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Lapangan usaha informasi dan komunikasi bernilai negatif terbesar di Kota Yogyakarta karena pertumbuhan lapangan usaha ini sudah melewati era tren meningkat, sementara di kabupaten-kabupaten lain masih berkembang dan tumbuh. Kategori lain yang juga bernilai negatif besar di Kota Yogyakarta adalah industri pengolahan.

Tabel 6.11. Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2010-2017

Kab/Kota	Perub. PDRB	Pangsa Regional	Nilai Pergeseran		Komponen Pergeseran		
			Netto	%	PS	DS	PS+DS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulon Progo	4.030.262	4.250.420	-220.158	-5,46	-96.073	-124.085	-220.158
Bantul	10.519.678	10.230.296	289.382	2,75	-141.298	430.680	289.382
Gunungkidul	7.359.004	7.472.148	-113.145	-1,54	-306.695	193.551	-113.145
Sleman	18.605.801	18.141.201	464.600	2,50	-61.126	525.727	464.600
Yogyakarta	14.106.501	14.527.181	-420.680	-2,98	605.192	-1.025.872	-420.680

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6.12 juga tampak bahwa hanya Kota Yogyakarta memiliki nilai PS positif. Spesialisasi Kota Yogyakarta terletak pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, dan jasa pemerintahan karena sebagai ibukota provinsi memiliki pertumbuhan yang tinggi di tingkat D.I. Yogyakarta. Dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai struktur ekonomi yang lebih menguntungkan (*favourable economic structure*) untuk kategori-kategori tersebut.

Berdasarkan nilai PS dan DS selama periode 2010-2017, kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dikelompokkan dalam tiga kategori seperti yang disajikan pada Tabel 6.13. Hasil ini mirip dengan analisis pada periode sebelumnya yang juga terdiri dari tiga kelompok. Pada kelompok pertama (Kuadran II), yang merepresentasikan daerah yang maju pesat dengan ditandai oleh nilai PS dan DS bertanda positif, dan ternyata tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok ini.

Kelompok kedua, mencakup daerah yang memiliki nilai DS bertanda positif dan nilai PS bertanda negatif atau disebut daerah yang sedang berkembang. Kelompok ini terdiri dari tiga kabupaten, yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Sementara, kelompok ketiga merepresentasikan daerah yang perekonomiannya cenderung berpotensi yang ditandai oleh nilai PS positif dan nilai DS negatif. Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang termasuk dalam kelompok ini, dan kondisinya sama dengan hasil analisis periode 2010-

2016. Kelompok IV, merepresentasikan daerah dengan daya saing lemah, dan Kabupaten Kulon Progo belum mampu lepas dari kondisi ini. Kulon Progo dan Gunungkidul juga memerlukan sektor-sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi untuk memperpendek kesenjangan terhadap tiga kabupaten/kota yang lain. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2010-2017 masih di bawah 5 persen, sementara tiga kabupaten/kota lainnya sudah di atas 5,1 persen (Tabel 6.13).

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan suatu situasi pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber daya berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, heterogenitas karakteristik suatu wilayah menjadi pemicu ketimpangan antardaerah atau antarsektor di suatu wilayah. Masalah ketimpangan ekonomi antardaerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi. Ardani (1992) mengemukakan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Tabel 6.12. Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2010-2017

Kategori	Komponen Pertumbuhan		
	DS	PS	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab/Kota yang pertumbuhan ekonominya pesat (I):	-	-	-
Kab/Kota sedang berkembang (II):			
1. Kabupaten Sleman	525.727	-61.126	5,45
2. Kabupaten Bantul	430.680	-141.298	5,15
3. Kabupaten Gunungkidul	193.551	-306.695	4,80
Kab/Kota yang cenderung berpotensi (III):			
1. Kota Yogyakarta	1.025.872	605.192	5,35
Kab/Kota mempunyai daya saing lemah (IV):			
2. Kulon Progo	-124.085	-96.073	4,77

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

BAB 7
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 sebesar 119,17 triliun rupiah, bertambah sekitar 9,1 triliun rupiah dibanding tahun 2016 yang sebesar 110,10 triliun rupiah. Sementara bila dibandingkan dengan tahun 2013 bertambah sekitar 34,2 triliun rupiah.
2. Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2017 sebesar 92,30 triliun rupiah, bertambah sebanyak 4,6 triliun rupiah dari 87,59 triliun rupiah di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada nilai PDRB atas harga konstan, menunjukkan bahwa tahun 2017 ekonomi D.I. Yogyakarta tumbuh 5,26 persen dibanding tahun sebelumnya, dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 5,05 persen.
3. Selama kurun waktu 2013-2017, ekonomi DIY tumbuh rata-rata 5,11 persen per tahun. Beberapa kategori yang rata-rata pertumbuhannya di atas 6 persen adalah: pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.
4. Pada tahun 2017, kategori industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pada distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 13,12 persen. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dan pertanian memberikan porsi distribusi terbesar berikutnya masing-masing 10,32 persen dan 10,01 persen. Perekonomian D.I. Yogyakarta juga ditopang oleh lapangan usaha konstruksi, jasa pendidikan, jasa pemerintahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, dan real estat, dengan kontribusi masing-masing antara 7 sampai 9 persen.
5. Kategori perdagangan, kategori angkutan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, dan kategori jasa-jasa lainnya yang dikelompokkan dalam sektor tersier mempunyai pangsa kontribusi yaitu 66,62 persen dari total PDRB tahun 2017. Sementara sektor sekunder yang terdiri dari kategori industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi pangsa distribusinya sebesar 22,85 persen. Kontribusi sektor sekunder dan tersier ditengarai semakin meningkat seiring dengan kondisi kontribusi sektor primer (pertanian dan pertambangan dan penggalian) yang semakin menurun. Ini mengindikasikan kegiatan ekonomi di DIY sudah moderen dan memerlukan SDM berpendidikan tinggi dan teknologi informasi yang baik.

6. Peran sektoral dalam menggerakkan perekonomian 2017, ditunjukkan oleh andil pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi DIY yang sebesar 5,26 persen, penyumbang terbesar pertumbuhan adalah industri pengolahan, yaitu 0,74 persen. Urutan andil pertumbuhan terbesar berikutnya adalah informasi dan komunikasi, yakni 0,67 persen, konstruksi 0,65 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 0,59 persen, dan jasa pendidikan masing-masing sebesar 0,49 persen.
7. Lima kabupaten/kota yang ada di D.I. Yogyakarta selama periode 2013-2017 rata-rata pertumbuhannya pada kisaran 5,0 persen sampai 5,97 persen, dengan posisi tertinggi Kulon Progo dan terendah Gunungkidul. Dengan dimulainya pembangunan bandara baru di Kulon Progo pertumbuhannya melejit padahal di tahun sebelumnya masih yang terendah.
8. PDRB per kapita riil tahun 2017 sebesar Rp24,53 juta, meningkat sebanyak Rp3,5 juta dibanding tahun 2013. Selama lima tahun tersebut PDRB per kapita riil tumbuh rata-rata 3,92 persen per tahun, dengan kisaran pertumbuhan tiap tahunnya antara 3,75 persen hingga 4,23 persen.
9. Kesenjangan PDRB per kapita riil Kota Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul terlihat mencolok. PDRB per kapita Kota Yogyakarta mencapai tiga kali lipat dari PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang merupakan terendah di antara lima kabupaten/kota di DIY. Sementara Kota Yogyakarta bila dibandingkan dengan Sleman yang PDRB per kapitanya paling tinggi di antara tiga kabupaten lain sebesar 2,2 kali lipat.
10. Inflasi IHK dan inflasi PDRB kurang menunjukkan korelasi statistik yang nyata sehingga kenaikan harga konsumen di pasar tidak langsung memberikan dampak yang nyata pada perubahan nilai tambah di tingkat produsen, atau sebaliknya.
11. Berdasarkan indeks perkembangan sektoral atas dasar harga konstan, lima kategori yang menunjukkan perkembangan lebih cepat, yaitu: informasi dan komunikasi, jasa keuangan, listrik dan gas, jasa kesehatan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Indeks perkembangan atas harga konstan 2010 kategori-kategori tersebut mencapai di atas 153.
12. Gabungan luas wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta hanya sebesar 19 persen dari luas wilayah D.I. Yogyakarta, namun secara ekonomi kedua wilayah tersebut menguasai 59,8 persen dari total PDRB DIY. Sementara Gunungkidul dan Kulon Progo yang luas wilayahnya meliputi 65 persen dari wilayah D.I. Yogyakarta hanya memperoleh bagian sekitar 21,2 persen dari total PDRB D.I. Yogyakarta.
13. Struktur ekonomi berdasarkan PDRB di masing-masing kabupaten/kota, dapat dideteksi kategori yang memberikan pangsa terbesar dalam struktur PDRB. Di Kabupaten Kulon Progo adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Di Kabupaten Bantul yang dominan adalah industri pengolahan, pertanian, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Di Gunungkidul kontribusi tiga besarnya adalah pertanian, jasa pemerintahan, dan konstruksi. Di Sleman yang menjadi *leading sector* adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara di Kota Yogyakarta tiga kategori dengan kontribusi persentase terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, dan informasi dan komunikasi.

14. Kontribusi PDRB D.I. Yogyakarta terhadap jumlah PDRB 33 provinsi sangat kecil yaitu hanya 0,86 persen. Demikian pula kontribusinya terhadap jumlah PDRB Pulau Jawa juga terendah yaitu hanya 1,47 persen. Di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), D.I. Yogyakarta bersama Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan tiga provinsi yang kontribusinya terhadap total PDRB 34 provinsi berada di bawah 1 persen.
15. Struktur PDRB menurut Pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 68,55 persen. Artinya, tingkat konsumsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi atau pembentukan PDRB. Pengaruh terbesar berikutnya adalah investasi, baik pemerintah maupun swasta, yang ditunjukkan oleh kontribusi komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yaitu 31,17 persen. Komponen pengeluaran pemerintah menjadi penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi 16,84 persen.
16. Pada tahun 2013 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen dibutuhkan pertumbuhan investasi sebesar 5,36 persen, sedangkan di tahun 2017 pertumbuhan investasi yang diperlukan lebih tinggi yaitu 5,61 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong semakin tingginya iklim investasi, namun di sisi lain juga bermakna bahwa semakin kurang efisiennya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
17. Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran di tahun 2017 tampak semakin membaik, meskipun belum sebagus kondisi 2013. Semua komponen PDRB tumbuh positif dan menggembirakan di tahun 2017. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 5,54 persen, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 4,97 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 3,06 persen. Sementara pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit rumah tangga, ekspor luar negeri, dan impor luar negeri mampu tumbuh di atas 9 persen.
18. Secara umum dalam periode 2013 hingga 2017 pertumbuhan ekonomi DIY berada pada tren yang meningkat lagi mulai tahun 2015. Semua lapangan usaha tumbuh positif, meskipun pertumbuhannya masih lambat dan tren perkembangannya belum semua ke arah meningkat.

19. Analisis Tipologi Klassen yang diaplikasikan untuk memetakan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita menghasilkan dua kelompok besar pertumbuhan. Selama periode 2013 hingga 2017 terjadi pergeseran posisi. Kulon Progo yang pada tahun 2013 sebagai daerah tertinggal bergeser menjadi daerah berkembang cepat (pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata provinsi tetapi PDRB per kapitanya di bawah rata-rata provinsi). Bantul dan Gunungkidul tetap di kategori sebagai daerah yang tertinggal karena pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya di bawah rata-rata provinsi). Sementara Sleman dan Kota Yogyakarta tetap menjadi daerah yang maju dan cepat tumbuh.
20. Tahun 2013 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp45,03 juta per orang per tahun, di tahun 2017 meningkat menjadi Rp58,04 juta per orang per tahun. Dengan demikian, selama kurun waktu 2013 hingga 2017 rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebesar 6,55 persen per tahun. Secara sektoral pertumbuhan produktivitas tertinggi ada pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, jasa pemerintahan, jasa kesehatan manusia, pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan.
21. Pada periode 2013-2017, secara sektoral pertumbuhan kesempatan kerja tidak elastis/*inelastis* dengan pertumbuhan ekonomi, angka perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) hanya 0,42 persen per tahun. Lapangan usaha yang pertumbuhan kesempatannya elastis dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengelolaan air dan daur ulang, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estat, dan jasa perusahaan. Kondisi ini menunjukkan terjadi peningkatan yang besar karena pada periode sebelumnya hanya lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang bersifat elastis atau angka EKK di atas 1 persen.
22. Analisis Tipologi Klassen untuk produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menempatkan tiga sektor yang dapat diandalkan karena prestasi pencapaian produktivitas dan pertumbuhan ekonominya, yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan jasa kesehatan masyarakat.
23. Kemiskinan di DIY dibandingkan provinsi-provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur masih tergolong tinggi (tertinggi di Pulau Jawa).
24. Permasalahan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan juga masih terlihat tinggi di level kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Namun demikian program pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dan untuk mengatasi jurang kesenjangan nampak menghasilkan kinerja yang membanggakan. Hal ini terukur dari tren menurunnya persentase penduduk miskin dan juga menurunnya kesenjangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Rata-rata jumlah penduduk miskin selama tujuh tahun

terakhir (2013-2017) juga menurun 3,38 persen per tahun. Persentase penduduk miskin September 2013 sebesar 15,03 persen turun menjadi 12,36 persen kondisi September 2017.

25. Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi kendala yang agak serius karena posisi angka Gini Rasio (GR) pada kondisi September 2017 sebesar 0,44. Artinya, angka gini rasio yang ditargetkan pemerintah di bawah 0,42 di akhir periode RPJMD 2012-2017 tidak tercapai. Sebenarnya sinyal melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan sudah terlihat sejak akhir 2015. Ketimpangan juga masih menganga dilihat dari distribusi pendapatan antara yang kaya dan miskin, karena 40 persen penduduk berpendapatan terendah dan 40 penduduk berpendapatan menengah, atau bila digolongkan menjadi 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah, hanya memperoleh 49,7 persen dari total distribusi pendapatan. Sementara itu, golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi memperoleh 51,3 persen dari total distribusi pendapatan.
26. Ketimpangan pendapatan antar-kabupaten/kota yang diukur dengan Indeks Williamson kecenderungannya ke arah kondisi yang lebih baik meskipun penurunan angka ketimpangannya relatif kecil.
27. Kategori pertumbuhan berdasarkan analisis *Shift Share* data PDRB kabupaten/kota menyimpulkan tidak ada kabupaten/kota yang pertumbuhannya pesat (kuadran I). Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang (kuadran II). Kota Yogyakarta hanya menempati daerah yang cenderung berpotensi (kuadran III), dan Kabupaten Kulon Progo masih merupakan daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV).

B. Rekomendasi

1. Meningkatnya pengangguran dari kelompok penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi perlu menjadi perhatian serius. Untuk itu pelatihan kerja dan pembinaan wirausaha seharusnya juga menysar ke kelompok penduduk ini.
2. Tren kesenjangan distribusi pendapatan antarwilayah dan antarpenduduk sudah semakin memprihatinkan dan mendesak untuk diatasi. Permasalahan ini akan teratasi di antaranya dengan memperluas sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kulon Progo dan Gunungkidul serta terus menggerakkan sektor-sektor potensi di Bantul.
3. Dalam upaya lebih menekan angka pengangguran dan sekaligus peningkatan kesempatan kerja, pemerintah pusat dan daerah perlu mengambil kebijakan yang bisa mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor

yang masih potensi seperti industri pengolahan, konstruksi, jasa keuangan, real estat, dan jasa perusahaan.

4. Terus mengupayakan proyek dan investasi berskala besar untuk mengungkit gerak laju perekonomian terutama untuk tiga kabupaten yang masih tertinggal yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul.
5. Master plan pembangunan tetap harus memperhatikan potensi yang dimiliki tiap daerah agar program dapat berdaya dan efisien dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga tujuan mengeliminir kesenjangan antar kabupaten/kota dapat tercapai (lihat analisis Tipologi Klassen).
6. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan terus melakukan kajian karakteristik kemiskinan penduduk DIY agar program penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang tepat maka implikasi pengentasan kemiskinannya juga efektif dan cepat.
7. Perbaikan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota sudah mulai nampak hasilnya, namun pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian. Artinya, sendi-sendi ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang harus lebih dipacu pertumbuhannya. Bila ini berjalan dengan baik, maka tidak hanya pertumbuhan yang dapat diperbaiki tetapi kesenjangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran juga dapat ditekan lebih rendah.
8. Untuk melihat seberapa penting daerah di luar DIY dalam mempengaruhi perekonomian DIY perlu melakukan kajian *spillover effect* antardaerah terutama dengan daerah yang berbatasan. Untuk itu perlu mengumpulkan indikator-indikator yang tidak sedikit dari Kabupaten Klaten, Magelang, Purworejo serta kabupaten sekitar D.I. Yogyakarta lainnya. Namun karena keterbatasan waktu dan semakin luasnya pembahasan maka dalam analisis ini kajian *spillor effect* tidak dapat dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik RI, 2017, "**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha**", Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2016, "**ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta 2011-2015**", Kerjasama Bappeda dan BPS DIY.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2016, "**Analisis PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta 2011-2015**", Kerjasama Bappeda dan BPS DIY.
- BPS Provinsi DIY, 2017, "**Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2016**", Yogyakarta.
- Herrick Bruce dan Kendleberger Charles P, 1988, "**Economic Development (diterjemahkan oleh Drs. Komarudin, Drs. A. Hasyuri Ali, Drs. G. Kartasapoetra)**", Bina Aksara, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, "**Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan**", PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2013, "**Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi**", Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, "**Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang**", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mubyarto, 2003, "**Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila**" Seminar Bulanan III, PUSTEP-UGM, Yogyakarta 1 April 2003.
- Nellis, Joseph G. dan David Parker, 2002, "**The Essence of The Economy**", Second Edition, Prentice Hall of India, New Delhi.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012, "**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017**", Yogyakarta.
- Simanjuntak, P.J, 2001, "**Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia**", Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjafrizal, "**Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**", Prisma, LP3ES No. 3.
- Todaro, Michael P, and Smith, Stephen C, 2015, "**Economic Development 12th Edition**", Addison Wesley, London.
- Thomas, V., Dailami M., Dhareshwar A., Kaufmann D., Kishor N., Lopez R., and Wang Yang, 2001, "**The Quality of Growth**", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widodo, Suseno Triyanto Hg, 1990, "**Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia**", Kanisius, Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko, 2008, "**The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas**". JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, ___.

LAMPIRAN



Lampiran Tabel 1.
PDRB DIY Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2104	2015	2016 ¹⁾	2017 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.449.019,7	9.769.112,4	10.793.840,1	11.456.173,0	11.933.401,2
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	8.347.274,0	8.545.054,9	9.442.590,2	10.036.120,9	10.424.091,2
	a. Tanaman Pangan	3.318.116,3	3.277.477,0	3.808.409,6	4.134.843,7	4.232.040,5
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	284.221,0	262.539,4	287.655,4	298.985,8	295.278,7
	c. Perkebunan Semusim	46.720,3	51.806,1	53.795,0	55.701,7	59.325,1
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2.563.417,3	2.601.564,0	2.735.787,8	2.815.065,7	2.974.072,0
	e. Perkebunan Tahunan	209.369,1	230.395,0	225.176,9	254.106,9	273.274,6
	f. Peternakan	1.757.555,4	1.930.499,3	2.136.761,6	2.265.239,7	2.358.965,9
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	167.874,7	190.774,1	195.003,9	212.177,4	231.134,5
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	750.207,7	816.386,5	902.903,4	955.185,0	1.004.944,9
	3 Perikanan	351.538,1	407.671,0	448.346,5	464.867,1	504.365,0
B	Pertambangan dan Penggalian	495.039,5	537.599,5	573.133,0	593.156,2	615.943,0
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	495.039,5	537.599,5	573.133,0	593.156,2	615.943,0
C	Industri Pengolahan	11.563.733,8	12.614.921,0	13.303.467,8	14.547.753,4	15.636.602,8
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.822.563,6	6.655.855,8	7.103.601,4	7.941.762,8	8.558.240,6
	3 Pengolahan Tembakau	817.470,4	732.370,8	742.297,4	794.422,8	910.077,8
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.207.632,4	1.339.987,1	1.458.642,5	1.602.087,3	1.736.475,9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	341.306,5	351.932,3	378.490,2	404.318,7	430.499,1
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	200.182,6	201.488,0	204.404,5	205.278,4	225.302,1
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	254.921,0	277.247,2	293.838,4	322.792,3	346.837,1
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	106.227,3	115.955,4	131.001,4	142.898,6	152.564,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	352.913,7	343.097,6	318.017,1	306.053,3	310.263,1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	400.598,5	429.587,2	426.568,7	438.024,2	472.977,9
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	820.253,5	884.077,4	890.732,6	935.009,2	938.695,9
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	414.548,7	460.662,9	494.955,9	542.431,8	562.134,1
	14 Industri Alat Angkutan	3.597,0	3.332,5	3.104,5	3.052,6	3.189,3
	15 Industri Furnitur	532.612,8	523.488,8	538.313,4	573.131,6	626.243,7
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	288.905,8	295.838,0	319.499,7	336.489,5	363.101,3
D	Pengadaan Listrik, Gas	86.394,5	101.943,8	118.012,2	141.794,3	173.689,0
	1 Ketenagalistrikan	85.453,6	100.951,3	117.037,3	140.746,6	172.558,0
	2 Gas	940,9	992,5	974,9	1.047,7	1.131,0
E	Pengadaan Air	89.645,3	102.669,9	109.697,2	114.764,9	121.272,8
F	Konstruksi	8.060.750,5	8.722.682,2	9.499.916,9	10.286.733,8	11.303.629,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	6.938.421,0	7.681.034,9	8.342.646,2	9.332.037,8	10.241.621,1
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.163.092,2	1.292.028,2	1.401.769,5	1.569.787,6	1.720.350,8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	5.775.328,8	6.389.006,7	6.940.876,7	7.762.250,2	8.521.270,2
H	Transportasi dan Pergudangan	4.783.126,5	5.313.232,9	5.763.846,2	6.251.304,0	6.783.680,8
	1 Angkutan Rel	62.282,2	84.542,3	101.336,8	109.348,3	129.637,3
	2 Angkutan Darat	2.975.031,0	3.265.119,4	3.485.831,2	3.627.080,5	3.804.588,4
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	777.432,2	886.134,0	992.290,7	1.206.916,6	1.402.533,6
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	968.381,1	1.077.437,1	1.184.387,5	1.307.958,7	1.446.921,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.284.060,7	9.324.121,0	10.383.401,7	11.255.100,2	12.304.098,9
	1 Penyediaan Akomodasi	1.665.470,5	1.814.459,7	2.050.489,2	2.273.996,0	2.596.088,2
	2 Penyediaan Makan Minum	6.618.590,2	7.509.661,3	8.332.912,5	8.981.104,2	9.708.010,8
J	Informasi dan Komunikasi	7.572.218,9	7.897.507,2	8.244.241,8	8.957.494,4	9.789.585,7
K	Jasa Keuangan	3.170.932,7	3.602.560,5	4.022.438,4	4.334.287,9	4.640.943,5
	1 Bank	2.342.861,6	2.702.047,9	3.052.521,2	3.273.041,3	3.474.376,3
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	255.538,0	286.504,7	305.491,8	329.446,1	358.805,4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	565.726,3	606.489,7	656.551,6	723.399,2	798.501,7
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6.806,8	7.518,2	7.873,8	8.401,4	9.260,1
L	Real Estate	5.815.245,1	6.497.271,5	7.116.820,4	7.808.288,9	8.382.668,3
M,N	Jasa Perusahaan	855.439,4	956.390,6	1.048.359,3	1.115.193,5	1.207.969,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.702.818,7	7.492.245,8	8.379.231,5	9.217.107,9	10.213.350,4
P	Jasa Pendidikan	6.816.002,1	7.600.854,9	8.598.743,9	9.013.442,2	9.711.308,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.094.674,4	2.276.361,0	2.553.550,8	2.759.864,8	3.004.111,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.147.020,2	2.351.975,0	2.589.171,1	2.824.989,7	3.109.029,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	84.924.542,9	92.842.484,2	101.440.518,4	110.009.486,9	119.172.905,6

Lampiran Tabel 2.
PDRB DIY Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2104	2015	2016 [*]	2017 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.670.026,2	7.508.980,3	7.667.601,7	7.779.801,3	7.930.646,7
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.741.414,9	6.539.528,2	6.666.702,6	6.766.494,7	6.884.010,1
	a. Tanaman Pangan	2.808.220,7	2.760.023,5	2.838.357,6	2.916.633,1	2.895.314,1
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	235.350,9	212.590,9	220.477,6	219.115,2	223.677,7
	c. Perkebunan Semusim	41.348,4	41.666,1	40.253,7	38.481,5	40.244,1
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.942.962,6	1.731.959,8	1.709.503,9	1.694.434,8	1.751.517,6
	e. Perkebunan Tahunan	166.790,4	167.480,0	160.968,8	163.005,1	169.974,7
	f. Peternakan	1.409.959,7	1.478.301,7	1.548.209,3	1.581.601,3	1.643.457,2
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	136.782,1	147.506,3	148.931,6	153.223,6	159.824,7
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	657.699,9	680.932,8	700.236,9	708.450,0	728.827,2
	3 Perikanan	270.911,3	288.519,3	300.662,1	304.856,6	317.809,3
B	Pertambangan dan Penggalian	461.013,8	470.734,6	471.323,2	473.298,7	489.349,2
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	461.013,8	470.734,6	471.323,2	473.298,7	489.349,2
C	Industri Pengolahan	10.084.213,3	10.469.748,6	10.693.035,7	11.234.803,5	11.879.549,5
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.141.145,2	5.550.764,0	5.724.930,3	6.111.908,0	6.505.523,4
	3 Pengolahan Tembakau	571.755,5	456.644,9	453.234,7	460.060,2	489.335,7
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	982.801,6	1.059.015,3	1.122.114,4	1.193.570,6	1.274.075,8
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	279.763,8	279.526,2	300.273,3	310.008,0	323.933,9
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	193.358,3	190.616,0	186.553,1	183.513,3	198.305,1
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	238.009,9	248.636,7	253.685,7	268.713,7	278.534,7
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	117.513,9	125.873,3	135.404,1	144.381,0	152.557,2
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	310.988,6	292.300,2	265.704,0	246.688,5	254.141,5
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	353.713,2	359.128,1	335.701,7	336.586,0	360.404,3
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	769.924,8	788.641,2	777.412,5	801.506,7	799.598,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	375.320,8	403.331,4	430.750,2	450.695,5	465.140,1
	14 Industri Alat Angkutan	3.139,4	2.831,6	2.631,5	2.514,7	2.610,9
	15 Industri Furnitur	488.110,6	466.972,4	453.940,5	470.858,1	504.270,9
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	258.667,7	245.467,5	250.699,7	253.799,2	271.117,6
D	Pengadaan Listrik, Gas	116.969,2	124.960,1	127.701,3	145.910,1	151.680,9
	1 Ketenagalistrikan	116.199,0	124.160,4	126.892,6	145.088,0	150.840,0
	2 Gas	770,2	799,8	808,7	822,1	840,9
E	Pengadaan Air	79.739,9	82.855,4	85.260,2	87.268,2	90.288,8
F	Konstruksi	7.106.854,7	7.508.543,3	7.826.700,7	8.250.608,3	8.822.979,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	6.187.855,1	6.540.107,5	6.944.902,7	7.367.623,9	7.788.855,6
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	983.772,5	1.058.936,0	1.091.042,1	1.165.920,9	1.229.214,5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	5.204.082,6	5.481.171,5	5.853.860,6	6.201.703,0	6.559.641,1
H	Transportasi dan Pergudangan	4.217.506,9	4.377.849,8	4.541.309,5	4.750.834,0	4.976.166,8
	1 Angkutan Rel	50.999,1	60.546,0	65.371,0	67.821,8	78.659,9
	2 Angkutan Darat	2.761.816,0	2.810.248,9	2.902.683,0	2.957.490,5	3.053.105,4
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	597.096,7	631.120,0	650.042,7	740.177,1	800.039,5
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	807.595,1	875.934,9	923.212,8	985.344,7	1.044.362,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.942.541,1	7.414.021,0	7.842.143,3	8.274.501,4	8.788.711,3
	1 Penyediaan Akomodasi	1.289.746,6	1.353.394,3	1.450.436,0	1.568.773,7	1.743.404,0
	2 Penyediaan Makan Minum	5.652.794,5	6.060.626,6	6.391.707,2	6.705.727,6	7.045.307,3
J	Informasi dan Komunikasi	7.969.970,4	8.458.713,2	8.891.144,9	9.630.639,1	10.222.383,3
K	Jasa Keuangan	2.610.919,1	2.826.933,5	3.060.732,9	3.213.222,2	3.303.212,2
	1 Bank	1.898.021,7	2.086.228,9	2.273.369,4	2.378.617,2	2.420.775,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	224.469,4	237.670,3	247.199,4	258.464,2	270.993,6
	3 Jasa Keuangan Lainnya	482.676,8	496.979,2	533.921,7	569.704,7	604.728,2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5.751,3	6.055,1	6.242,4	6.436,2	6.714,9
L	Real Estate	5.322.003,8	5.735.457,1	6.082.488,7	6.395.208,9	6.711.294,8
M,N	Jasa Perusahaan	858.734,2	924.041,7	991.563,8	1.025.558,0	1.085.625,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5.639.411,8	5.971.985,6	6.304.910,7	6.656.182,7	6.956.541,3
P	Jasa Pendidikan	6.430.385,5	6.938.845,3	7.444.276,5	7.672.850,0	8.099.103,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.916.373,7	2.062.978,6	2.210.405,6	2.310.356,4	2.445.389,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.012.930,9	2.119.325,9	2.288.950,1	2.419.533,0	2.558.881,6
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	75.627.449,6	79.536.081,8	83.474.451,5	87.688.199,8	92.300.659,8

Lampiran Tabel 3.
Laju Pertumbuhan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2104	2015	2016*	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,26	-2,10	2,11	1,46	1,94
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,33	-3,00	1,94	1,50	1,74
	a. Tanaman Pangan	0,41	-1,70	2,84	2,76	-0,73
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1,25	-9,70	3,71	-0,62	2,08
	c. Perkebunan Semusim	2,41	0,80	-3,39	-4,40	4,58
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	6,29	-10,90	-1,30	-0,88	3,37
	e. Perkebunan Tahunan	5,56	0,40	-3,89	1,27	4,28
	f. Peternakan	0,88	4,80	4,73	2,16	3,91
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,37	7,80	0,97	2,88	4,31
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,54	3,50	2,83	1,17	2,88
	3 Perikanan	4,87	6,50	4,21	1,40	4,25
B	Pertambangan dan Penggalian	3,92	2,10	0,13	0,42	3,39
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3,92	2,10	0,13	0,42	3,39
C	Industri Pengolahan	6,87	3,80	2,13	5,07	5,74
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	9,35	8,00	3,14	6,76	6,44
	3 Pengolahan Tembakau	0,78	-20,10	-0,75	1,51	6,36
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	9,64	7,80	5,96	6,37	6,74
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6,23	-0,10	7,42	3,24	4,49
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	4,82	-1,40	-2,13	-1,63	8,06
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	1,47	4,50	2,03	5,92	3,65
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-0,10	7,10	7,57	6,63	5,66
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,18	-6,00	-9,10	-7,16	3,02
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	9,69	1,50	-6,52	0,26	7,08
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	4,79	2,40	-1,42	3,10	-0,24
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-0,70	7,50	6,80	4,63	3,20
	14 Industri Alat Angkutan	-2,07	-9,80	-7,07	-4,44	3,83
	15 Industri Furnitur	2,49	-4,30	-2,79	3,73	7,10
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	5,85	-5,10	2,13	1,24	6,82
D	Pengadaan Listrik, Gas	6,08	6,80	2,19	14,26	3,96
	1 Ketenagalistrikan	6,08	6,90	2,20	14,34	3,96
	2 Gas	5,95	3,80	1,11	1,66	2,28
E	Pengadaan Air	0,95	3,90	2,90	2,36	3,46
F	Konstruksi	4,94	5,70	4,24	5,42	6,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	5,26	5,70	6,19	6,09	5,72
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	6,20	7,60	3,03	6,86	5,43
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	5,09	5,30	6,80	5,94	5,77
H	Transportasi dan Pergudangan	6,10	3,80	3,73	4,61	4,74
	1 Angkutan Rel	-1,09	18,70	7,97	3,75	15,98
	2 Angkutan Darat	4,33	1,80	3,29	1,89	3,23
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	15,78	5,70	3,00	13,87	8,09
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	6,18	8,50	5,40	6,73	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	6,80	5,77	5,51	6,21
	1 Penyediaan Akomodasi	8,51	4,90	7,17	8,16	11,13
	2 Penyediaan Makan Minum	6,82	7,20	5,46	4,91	5,06
J	Informasi dan Komunikasi	6,22	6,10	5,11	8,32	6,14
K	Jasa Keuangan	11,50	8,30	8,27	4,98	2,80
	1 Bank	14,89	9,90	8,97	4,63	1,77
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	1,86	5,90	4,01	4,56	4,85
	3 Jasa Keuangan Lainnya	4,15	3,00	7,43	6,70	6,15
	4 Jasa Penunjang Keuangan	-0,43	5,30	3,09	3,10	4,33
L	Real Estate	4,01	7,80	6,05	5,14	4,94
M,N	Jasa Perusahaan	3,27	7,60	7,31	3,43	5,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,94	5,90	5,57	5,57	4,51
P	Jasa Pendidikan	4,58	7,90	7,28	3,07	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,00	7,70	7,15	4,52	5,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,86	5,30	8,00	5,70	5,76
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,47	5,20	4,95	5,05	5,26

Lampiran Tabel 4.
Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (persen) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2104	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,13	10,50	10,64	10,41	10,01
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,83	9,20	9,31	9,12	8,75
	a. Tanaman Pangan	3,91	3,50	3,75	3,76	3,55
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,33	0,30	0,28	0,27	0,25
	c. Perkebunan Semusim	0,06	0,10	0,05	0,05	0,05
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3,02	2,80	2,70	2,56	2,50
	e. Perkebunan Tahunan	0,25	0,20	0,22	0,23	0,23
	f. Peternakan	2,07	2,10	2,11	2,06	1,98
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,88	0,90	0,89	0,87	0,84
	3 Perikanan	0,41	0,40	0,44	0,42	0,42
B	Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,60	0,56	0,54	0,52
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,58	0,60	0,56	0,54	0,52
C	Industri Pengolahan	13,62	13,60	13,11	13,22	13,12
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	6,86	7,20	7,00	7,22	7,18
	3 Pengolahan Tembakau	0,96	0,80	0,73	0,72	0,76
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,42	1,40	1,44	1,46	1,46
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,40	0,40	0,37	0,37	0,36
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0,24	0,20	0,20	0,19	0,19
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,13	0,10	0,13	0,13	0,13
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,42	0,40	0,31	0,28	0,26
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,47	0,50	0,42	0,40	0,40
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	0,97	1,00	0,88	0,85	0,79
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,49	0,50	0,49	0,49	0,47
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,63	0,60	0,53	0,52	0,53
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	0,34	0,30	0,31	0,31	0,30
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,10	0,10	0,12	0,13	0,15
	1 Ketenagalistrikan	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14
	2 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10
F	Konstruksi	9,49	9,40	9,37	9,35	9,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	8,17	8,30	8,22	8,48	8,59
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,37	1,40	1,38	1,43	1,44
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6,80	6,90	6,84	7,06	7,15
H	Transportasi dan Pergudangan	5,63	5,70	5,68	5,68	5,69
	1 Angkutan Rel	0,07	0,10	0,10	0,10	0,11
	2 Angkutan Darat	3,50	3,50	3,44	3,30	3,19
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	0,92	1,00	0,98	1,10	1,18
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1,14	1,20	1,17	1,19	1,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	10,00	10,24	10,23	10,32
	1 Penyediaan Akomodasi	1,96	2,00	2,02	2,07	2,18
	2 Penyediaan Makan Minum	7,79	8,10	8,21	8,16	8,15
J	Informasi dan Komunikasi	8,92	8,50	8,13	8,14	8,21
K	Jasa Keuangan	3,73	3,90	3,97	3,94	3,89
	1 Bank	2,76	2,90	3,01	2,98	2,92
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,67	0,70	0,65	0,66	0,67
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
L	Real Estate	6,85	7,00	7,02	7,10	7,03
M,N	Jasa Perusahaan	1,01	1,00	1,03	1,01	1,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,89	8,10	8,26	8,38	8,57
P	Jasa Pendidikan	8,03	8,20	8,48	8,19	8,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,47	2,50	2,52	2,51	2,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,53	2,50	2,55	2,57	2,61
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran Tabel 5.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi DIY (persen) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2104	2015	2016 [*]	2017 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,98	-0,21	0,20	0,13	0,17
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-1,03	-0,27	0,16	0,12	0,13
	a. Tanaman Pangan	0,10	-0,06	0,10	0,09	-0,02
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,01
	c. Perkebunan Semusim	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-1,17	-0,28	-0,03	-0,02	0,07
	e. Perkebunan Tahunan	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,01
	f. Peternakan	0,04	0,09	0,09	0,04	0,07
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	-0,02	0,01	0,00	0,01	0,01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02
	3 Perikanan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,01	0,00	0,00	0,02
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,03	0,01	0,00	0,00	0,02
C	Industri Pengolahan	0,42	0,51	0,28	0,65	0,74
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,27	0,54	0,22	0,46	0,45
	3 Pengolahan Tembakau	-0,11	-0,15	0,00	0,01	0,03
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,08	0,10	0,08	0,09	0,09
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,02	0,00	0,03	0,01	0,02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,02	-0,02	-0,03	-0,02	0,01
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,02	0,01	-0,03	0,00	0,03
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	0,07	0,02	-0,01	0,03	0,00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,02	0,04	0,03	0,02	0,02
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,01	-0,03	-0,02	0,02	0,04
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	0,01	-0,02	0,01	0,00	0,02
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01
	1 Ketenagalistrikan	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01
	2 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	-0,11	0,53	0,40	0,51	0,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	0,47	0,47	0,51	0,51	0,48
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,08	0,10	0,04	0,09	0,07
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	0,39	0,37	0,47	0,42	0,41
H	Transportasi dan Pergudangan	0,39	0,21	0,21	0,25	0,26
	1 Angkutan Rel	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	2 Angkutan Darat	0,20	0,06	0,12	0,07	0,11
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	0,09	0,04	0,02	0,11	0,07
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,09	0,09	0,06	0,07	0,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,62	0,54	0,52	0,59
	1 Penyediaan Akomodasi	0,03	0,08	0,12	0,14	0,20
	2 Penyediaan Makan Minum	0,72	0,54	0,42	0,38	0,39
J	Informasi dan Komunikasi	0,63	0,65	0,54	0,89	0,67
K	Jasa Keuangan	0,49	0,29	0,29	0,18	0,10
	1 Bank	0,46	0,25	0,24	0,13	0,05
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,03	0,02	0,05	0,04	0,04
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	0,57	0,55	0,44	0,37	0,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,09	0,08	0,04	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,82	0,44	0,42	0,42	0,34
P	Jasa Pendidikan	1,25	0,67	0,64	0,27	0,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41	0,19	0,19	0,12	0,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,18	0,14	0,21	0,16	0,16
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26

Lampiran Tabel 6.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (dalam juta rupiah) 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	57.101.887,2	62.875.141,2	68.730.527,5	74.429.795,6	81.688.213,9
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	22.374.227,4	24.286.650,1	26.286.556,5	28.459.585,1	30.982.942,7
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2.123.443,9	2.407.737,9	2.682.818,5	2.919.007,1	3.191.311,9
1.c. Pakaian	2.788.341,1	2.982.995,7	3.324.854,3	3.687.042,3	3.997.631,1
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar La	6.532.968,4	7.508.503,3	8.468.846,8	9.143.946,7	10.236.471,4
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemelihara	2.849.447,7	3.087.039,9	3.411.482,7	3.679.768,2	4.005.992,3
1.f. Kesehatan	2.685.689,2	3.021.534,5	3.312.124,4	3.671.351,2	4.046.099,9
1.g. Transportasi/Angkutan	7.129.963,8	8.002.514,2	8.753.886,1	9.276.225,0	10.122.089,0
1.h. Komunikasi	3.036.970,0	3.201.567,5	3.360.001,3	3.540.534,2	4.058.504,3
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.317.569,2	1.470.111,4	1.572.116,2	1.710.636,7	1.838.569,7
1.j. Pendidikan	3.405.955,4	3.717.178,6	4.047.223,6	4.473.538,8	4.928.558,0
1.k. Penginapan dan Hotel	1.705.259,9	1.916.779,6	2.073.547,1	2.254.386,0	2.454.164,1
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.152.051,2	1.272.528,5	1.437.070,0	1.613.774,2	1.825.879,6
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.457.182,4	2.948.426,6	3.171.192,8	3.225.070,3	3.756.395,3
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	13.629.833,9	15.347.428,3	17.214.154,3	18.441.761,5	20.063.071,6
3.a. Konsumsi Kolektif	7.638.839,9	8.667.188,2	9.679.421,8	10.362.756,3	11.232.170,3
3.b. Konsumsi Individu	5.990.994,0	6.680.240,2	7.534.732,5	8.079.005,2	8.830.901,2
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	24.250.704,4	27.744.794,4	30.798.881,3	33.428.977,9	37.147.935,8
4.a. Bangunan	19.626.275,1	22.442.138,5	24.803.517,4	26.755.606,5	29.961.861,5
4.b. Non-Bangunan	4.624.429,3	5.302.655,9	5.995.363,9	6.673.371,4	7.186.074,3
5. Perubahan Inventori	967.149,9	980.197,0	1.151.796,8	1.295.788,0	1.368.184,0
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	4.224.511,5	5.465.423,2	6.266.264,5	6.495.281,8	7.436.958,6
6.a. Barang	3.101.443,9	4.162.171,4	4.764.412,0	4.728.509,7	5.599.613,7
6.b. Jasa	1.123.067,6	1.303.251,9	1.501.852,4	1.766.772,1	1.837.344,9
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	2.514.540,0	4.085.244,9	5.066.145,4	5.922.732,1	6.540.718,7
7.a. Barang	747.814,7	811.835,3	1.240.178,0	1.840.763,2	2.308.738,3
7.b. Jasa	1.766.725,3	3.273.409,6	3.825.967,5	4.081.968,9	4.231.980,4
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(15.192.186,4)	(18.433.681,6)	(20.826.153,3)	(21.384.456,1)	(25.747.135,0)
8.a. Ekspor	40.564.356,9	46.988.180,1	52.238.029,4	58.195.116,4	62.037.877,8
8.b. Impor	55.755.422,7	65.421.861,7	73.064.182,7	79.579.572,4	87.785.012,8
P D R B	84.924.542,9	92.842.484,2	101.440.518,4	110.009.486,9	119.172.905,6

Lampiran Tabel 7.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (dalam juta rupiah) 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	45.670.009,0	47.923.893,3	50.193.386,0	52.619.164,2	55.533.017,4
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	16.246.721,2	16.669.147,0	17.270.489,9	17.894.700,4	18.834.266,3
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1.706.164,7	1.823.550,4	1.924.700,6	2.024.703,6	2.123.606,7
1.c. Pakaian	2.380.334,6	2.471.869,6	2.606.391,1	2.755.231,1	2.882.567,5
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar La	5.343.712,1	5.742.145,1	6.085.963,5	6.434.591,0	6.837.426,0
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemelihara	2.272.353,6	2.397.965,4	2.530.849,0	2.620.505,0	2.782.330,4
1.f. Kesehatan	2.259.602,2	2.396.395,6	2.519.983,4	2.652.280,1	2.811.784,0
1.g. Transportasi/Angkutan	6.268.521,4	6.642.174,6	6.978.323,5	7.405.226,6	7.792.662,3
1.h. Komunikasi	2.562.655,9	2.710.444,3	2.846.242,0	2.990.939,8	3.154.836,7
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.063.311,6	1.148.652,4	1.206.458,1	1.263.916,4	1.302.424,2
1.j. Pendidikan	3.051.633,5	3.229.912,5	3.387.526,5	3.576.073,8	3.793.235,0
1.k. Penginapan dan Hotel	1.455.674,2	1.587.293,2	1.677.578,3	1.783.260,6	1.900.445,0
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.059.323,8	1.104.343,3	1.158.880,0	1.217.735,9	1.317.433,2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.095.397,3	2.317.122,7	2.384.374,2	2.362.343,8	2.589.249,7
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	11.553.432,0	12.056.062,7	12.719.134,3	12.987.745,6	13.384.558,9
3.a. Konsumsi Kolektif	6.201.739,3	6.507.500,1	6.857.275,5	6.997.740,9	7.212.282,0
3.b. Konsumsi Individu	5.351.692,7	5.548.562,6	5.861.858,8	5.990.004,7	6.172.276,8
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	20.190.810,1	21.358.622,4	22.286.614,6	23.616.947,8	24.791.861,8
4.a. Bangunan	16.436.213,5	17.344.657,9	18.073.133,5	19.170.028,6	20.137.862,1
4.b. Non-Bangunan	3.754.596,7	4.013.964,6	4.213.481,1	4.446.919,2	4.653.999,8
5. Perubahan Inventori	832.539,6	930.599,3	974.645,0	1.045.164,3	1.066.313,9
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	3.541.640,2	4.278.247,9	4.416.252,1	4.400.889,0	4.808.527,4
6.a. Barang	2.594.947,9	3.246.508,6	3.349.434,2	3.192.594,1	3.595.250,9
6.b. Jasa	946.692,3	1.031.739,4	1.066.817,9	1.208.294,9	1.213.276,6
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	2.241.625,6	3.228.540,5	3.728.749,4	4.492.510,6	4.905.221,9
7.a. Barang	840.987,0	936.550,0	1.375.927,3	2.099.846,8	2.488.770,8
7.b. Jasa	1.400.638,6	2.291.990,5	2.352.822,1	2.392.663,7	2.416.451,1
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(6.014.753,1)	(6.099.926,1)	(5.771.205,2)	(4.851.544,3)	(4.967.647,4)
8.a. Ekspor	33.989.619,7	35.810.888,3	37.561.868,4	39.476.426,8	41.444.540,8
8.b. Impor	40.004.372,7	41.910.814,5	43.333.073,7	44.327.971,0	46.412.188,2
PDRB	75.627.449,6	79.536.081,8	83.474.451,5	87.688.199,8	92.300.659,8

Lampiran Tabel 8.
Laju Pertumbuhan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (persen) 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	4,85	4,94	4,74	4,83	5,54
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2,20	2,60	3,61	3,61	5,25
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	3,99	6,88	5,55	5,20	4,88
1.c. Pakaian	5,50	3,85	5,44	5,71	4,62
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar La	5,75	7,46	5,99	5,73	6,26
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemelihara	6,38	5,53	5,54	3,54	6,18
1.f. Kesehatan	5,58	6,05	5,16	5,25	6,01
1.g. Transportasi/Angkutan	6,51	5,96	5,06	6,12	5,23
1.h. Komunikasi	6,77	5,77	5,01	5,08	5,48
1.i. Rekreasi dan Budaya	7,68	8,03	5,03	4,76	3,05
1.j. Pendidikan	8,95	5,84	4,88	5,57	6,07
1.k. Penginapan dan Hotel	6,63	9,04	5,69	6,30	6,57
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	6,33	4,25	4,94	5,08	8,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,42	10,58	2,90	-0,92	9,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5,90	4,35	5,50	2,11	3,06
3.a. Konsumsi Kolektif	4,75	4,93	5,37	2,05	3,07
3.b. Konsumsi Individu	7,26	3,68	5,65	2,19	3,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5,12	5,78	4,34	5,97	4,97
4.a. Bangunan	5,14	5,53	4,20	6,07	5,05
4.b. Non-Bangunan	5,04	6,91	4,97	5,54	4,66
5. Perubahan Inventori	3,44	11,78	4,73	7,24	2,02
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	20,71	20,80	3,23	-0,35	9,26
6.a. Barang	15,01	25,11	3,17	-4,68	12,61
6.b. Jasa	39,71	8,98	3,40	13,26	0,41
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	17,87	44,03	15,49	20,48	9,19
7.a. Barang	35,05	11,36	46,91	52,61	18,52
7.b. Jasa	9,50	63,64	2,65	1,69	0,99
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	5,35	1,42	-5,39	-15,94	2,39
8.a. Ekspor	4,28	5,36	4,89	5,10	4,99
8.b. Impor	4,44	4,77	3,39	2,30	4,70
PDRB	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26

Lampiran Tabel 9.
Didtribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (persen) 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	60,39	67,72	67,75	67,66	68,55
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	21,48	26,16	25,91	25,87	26,00
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2,26	2,59	2,64	2,65	2,68
1.c. Pakaian	3,15	3,21	3,28	3,35	3,35
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar La	7,07	8,09	8,35	8,31	8,59
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemelihara	3,00	3,33	3,36	3,34	3,36
1.f. Kesehatan	2,99	3,25	3,27	3,34	3,40
1.g. Transportasi/Angkutan	8,29	8,62	8,63	8,43	8,49
1.h. Komunikasi	3,39	3,45	3,31	3,22	3,41
1.i. Rekreasi dan Budaya	1,41	1,58	1,55	1,55	1,54
1.j. Pendidikan	4,04	4,00	3,99	4,07	4,14
1.k. Penginapan dan Hotel	1,92	2,06	2,04	2,05	2,06
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,40	1,37	1,42	1,47	1,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,77	3,18	3,13	2,93	3,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15,28	16,53	16,97	16,76	16,84
3.a. Konsumsi Kolektif	8,20	9,34	9,54	9,42	9,43
3.b. Konsumsi Individu	7,08	7,20	7,43	7,34	7,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	26,70	29,88	30,36	30,39	31,17
4.a. Bangunan	21,73	24,17	24,45	24,32	25,14
4.b. Non-Bangunan	4,96	5,71	5,91	6,07	6,03
5. Perubahan Inventori	1,10	1,06	1,14	1,18	1,15
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	4,68	5,89	6,18	5,90	6,24
6.a. Barang	3,43	4,48	4,70	4,30	4,70
6.b. Jasa	1,25	1,40	1,48	1,61	1,54
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	2,96	4,40	4,99	5,38	5,49
7.a. Barang	1,11	0,87	1,22	1,67	1,94
7.b. Jasa	1,85	3,53	3,77	3,71	3,55
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-7,95	-19,85	-20,53	-19,44	-21,60
8.a. Ekspor	44,94	50,61	51,50	52,90	52,06
8.b. Impor	52,90	70,47	72,03	72,34	73,66
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran Tabel 10.
Sumber Pertumbuhan PDRB DIY menurut Pengeluaran (persen) 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	2,94	2,98	2,85	2,91	3,32
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	0,49	0,56	0,76	0,75	1,07
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	0,09	0,16	0,13	0,12	0,11
1.c. Pakaian	0,17	0,12	0,17	0,18	0,15
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar La	0,41	0,53	0,43	0,42	0,46
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemelihara	0,19	0,17	0,17	0,11	0,18
1.f. Kesehatan	0,17	0,18	0,16	0,16	0,18
1.g. Transportasi/Angkutan	0,53	0,49	0,42	0,51	0,44
1.h. Komunikasi	0,23	0,20	0,17	0,17	0,19
1.i. Rekreasi dan Budaya	0,11	0,11	0,07	0,07	0,04
1.j. Pendidikan	0,35	0,24	0,20	0,23	0,25
1.k. Penginapan dan Hotel	0,13	0,17	0,11	0,13	0,13
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	0,09	0,06	0,07	0,07	0,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,28	0,29	0,08	-0,03	0,26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	0,90	0,66	0,83	0,32	0,45
3.a. Konsumsi Kolektif	0,39	0,40	0,44	0,17	0,24
3.b. Konsumsi Individu	0,51	0,26	0,39	0,15	0,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,37	1,54	1,17	1,59	1,34
4.a. Bangunan	1,12	1,20	0,92	1,31	1,10
4.b. Non-Bangunan	0,25	0,34	0,25	0,28	0,24
5. Perubahan Inventori	0,04	0,13	0,06	0,08	0,02
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	0,85	0,97	0,17	-0,02	0,46
6.a. Barang	0,47	0,86	0,13	-0,19	0,46
6.b. Jasa	0,38	0,11	0,04	0,17	0,01
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	0,47	1,30	0,63	0,91	0,47
7.a. Barang	0,30	0,13	0,55	0,87	0,44
7.b. Jasa	0,17	1,18	0,08	0,05	0,03
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-0,43	-0,11	0,41	1,10	-0,13
8.a. Ekspor	1,95	2,41	2,20	2,29	2,24
8.b. Impor	2,37	2,52	1,79	1,19	2,38
PDRB	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26

Lampiran Tabel 11.
PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 ¹⁾	2017 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.373.635,0	1.442.659,9	1.566.769,2	1.658.813,4	1.715.660,9
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	1.101.150,5	1.150.866,9	1.244.931,6	1.322.988,8	1.368.768,3
	a. Tanaman Pangan	295.971,3	299.783,3	346.208,9	368.825,2	377.110,6
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	42.997,6	39.445,3	43.783,9	45.669,3	45.041,5
	c. Perkebunan Semusim	7.245,4	7.962,8	8.398,6	8.812,8	9.583,8
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	296.154,5	295.791,4	309.306,5	322.851,8	343.487,3
	e. Perkebunan Tahunan	135.209,1	148.733,5	145.798,7	163.209,8	173.150,2
	f. Peternakan	300.353,3	332.450,4	363.690,6	384.300,4	388.957,7
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	23.219,3	26.700,2	27.744,4	29.319,6	31.437,2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	202.144,1	212.589,7	233.677,5	243.723,5	251.345,0
	3 Perikanan	70.340,4	79.203,3	88.160,2	92.101,1	95.547,6
B	Pertambangan dan Penggalian	98.940,2	101.818,1	109.892,1	115.601,8	132.102,2
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	98.940,2	101.818,1	109.892,1	115.601,8	132.102,2
C	Industri Pengolahan	780.587,0	871.865,3	925.813,9	1.016.200,3	1.122.792,3
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	601.198,1	689.086,5	733.110,9	807.169,1	896.100,9
	3 Pengolahan Tembakau	61.382,5	57.291,4	57.169,4	60.024,7	64.653,6
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	29.838,4	32.853,8	35.445,9	38.360,9	42.178,8
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	634,2	637,8	675,4	725,7	752,6
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	9.746,3	9.925,8	10.156,4	10.188,3	11.033,6
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	337,0	357,2	371,4	400,9	422,8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	22.936,0	24.903,9	27.278,5	29.466,5	31.152,6
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	509,9	520,4	504,0	518,4	539,9
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	15.131,2	15.991,6	15.948,3	16.731,8	18.089,3
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	552,2	591,6	592,3	628,0	654,1
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4.169,1	5.269,0	7.529,0	12.999,0	15.306,5
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	8.148,1	8.236,0	8.582,3	9.128,0	10.006,1
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	26.004,0	26.200,4	28.450,1	29.858,9	31.901,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.193,6	4.859,8	5.658,5	6.824,1	8.345,1
	1 Kelenagalistrakan	4.155,3	4.819,0	5.617,7	6.780,4	8.292,2
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	38,3	40,8	40,8	43,7	52,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	9.007,7	10.007,7	10.522,2	11.195,5	11.966,2
F	Konstruksi	561.695,7	602.695,7	649.776,4	710.844,1	825.885,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	843.413,4	928.413,4	1.008.690,0	1.131.565,1	1.271.959,3
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	37.421,7	42.421,7	46.424,9	50.703,8	58.968,8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	805.991,7	885.991,7	962.265,2	1.080.861,3	1.212.990,5
H	Transportasi dan Pergudangan	547.288,4	593.001,4	636.391,4	669.410,9	708.679,7
	1 Angkutan Rel	2.721,7	3.521,7	4.230,6	4.587,2	5.029,4
	2 Angkutan Darat	442.087,0	479.000,0	510.912,7	531.810,4	555.401,0
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	102.479,7	110.479,7	121.248,0	133.013,2	148.249,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	242.861,2	267.891,2	296.720,5	322.991,3	350.564,8
	1 Penyediaan Akomodasi	284,3	314,3	358,5	399,1	433,7
	2 Penyediaan Makan Minum	242.576,9	267.576,9	296.362,0	322.592,2	350.131,1
J	Informasi dan Komunikasi	342.993,8	364.480,9	382.516,6	414.272,1	451.136,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	205.582,7	229.410,7	255.816,3	271.629,1	286.018,1
	1 Jasa Perantara Keuangan	186.778,4	208.458,3	233.275,5	247.384,8	259.567,3
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	6.123,9	6.933,7	7.409,8	7.909,3	8.504,7
	3 Jasa Keuangan Lainnya	12.507,0	13.825,3	14.927,9	16.125,2	17.710,2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	173,4	193,4	203,2	209,9	235,9
L	Real Estate	213.830,0	233.583,0	256.043,7	284.442,3	310.731,6
M,N	Jasa Perusahaan	18.108,0	20.295,8	22.111,9	23.424,7	25.128,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	548.399,2	615.523,0	684.126,5	760.654,8	846.924,1
P	Jasa Pendidikan	369.065,8	409.065,8	461.610,9	488.022,7	532.472,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92.253,1	100.500,0	112.613,0	119.451,3	130.305,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	237.738,9	260.500,0	286.474,8	307.111,2	332.663,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.489.593,7	7.056.571,8	7.671.548,0	8.312.454,6	9.063.335,3

Lampiran Tabel 12.
PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.131.360,5	1.120.167,9	1.138.920,2	1.158.714,1	1.178.486,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	890.441,8	873.914,4	885.581,2	901.915,5	919.530,1
	a. Tanaman Pangan	256.059,4	257.605,0	263.894,2	271.404,1	271.834,9
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	34.536,2	31.205,3	32.967,2	32.712,3	33.083,2
	c. Perkebunan Semusim	6.375,7	6.412,6	6.266,3	6.244,7	6.566,6
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	221.791,2	195.447,9	194.626,8	195.276,7	205.525,2
	e. Perkebunan Tahunan	107.129,5	107.859,3	103.583,7	104.906,0	108.272,9
	f. Peternakan	244.469,2	253.614,0	261.909,5	268.556,0	270.813,7
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	20.080,7	21.770,2	22.333,4	22.815,7	23.433,6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	185.729,4	188.682,3	193.138,0	195.203,1	196.392,4
	3 Perikanan	55.189,3	57.571,2	60.201,0	61.595,5	62.563,5
B	Pertambangan dan Penggalian	90.140,2	91.487,5	91.992,8	93.577,0	106.376,7
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Biji Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	90.140,2	91.487,5	91.992,8	93.577,0	106.376,7
C	Industri Pengolahan	696.306,9	755.840,4	782.466,7	823.768,2	888.952,4
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	543.290,3	608.868,5	631.880,2	664.967,9	720.904,1
	3 Pengolahan Tembakau	44.281,7	35.343,1	34.419,5	34.918,1	35.367,2
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	23.841,8	25.515,5	26.812,6	28.040,7	30.196,6
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	522,0	510,1	538,5	551,4	554,2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	9.620,3	9.594,7	9.496,0	9.420,1	10.061,8
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	312,4	316,9	322,0	337,2	340,8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	24.145,2	25.881,0	27.509,8	29.406,1	30.855,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	415,8	414,7	397,7	394,2	414,4
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	13.406,2	13.670,3	12.925,0	13.044,8	13.889,1
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	518,3	531,9	525,4	542,3	562,7
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	3.642,1	4.520,0	6.406,0	10.604,0	12.315,0
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	7.807,9	7.705,2	7.643,4	8.115,7	8.754,8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	24.502,9	22.968,4	23.590,5	23.425,9	24.735,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.714,2	6.026,7	6.205,3	7.100,0	7.365,7
	1 Ketenagalistrikan	5.682,9	5.993,8	6.172,0	7.066,7	7.326,9
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	31,4	32,9	33,3	33,3	38,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	8.241,5	8.341,5	8.523,6	8.740,0	9.133,9
F	Konstruksi	483.855,7	508.855,7	530.760,3	565.132,8	633.469,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	757.217,7	796.717,7	848.655,9	901.270,6	977.513,9
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	32.486,6	34.986,6	36.088,0	38.564,6	43.242,8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	724.731,1	761.731,1	812.567,9	862.706,0	934.271,1
H	Transportasi dan Pergudangan	502.391,6	512.691,3	531.294,2	545.330,8	564.545,9
	1 Angkutan Rel	2.251,9	2.551,7	2.751,0	2.866,9	3.072,1
	2 Angkutan Darat	411.835,4	416.835,4	430.148,0	438.142,0	450.177,4
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	88.304,3	93.304,3	98.395,1	104.321,9	111.296,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	209.359,4	219.373,9	231.152,4	244.855,3	257.194,7
	1 Penyediaan Akomodasi	224,4	238,9	254,9	269,4	282,6
	2 Penyediaan Makan Minum	209.135,0	219.135,0	230.897,5	244.585,9	256.912,1
J	Informasi dan Komunikasi	352.124,3	378.090,0	398.651,2	430.223,0	455.455,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	157.992,0	175.745,1	189.970,4	198.342,1	200.443,4
	1 Jasa Perantara Keuangan	141.362,3	157.888,7	171.024,4	178.631,5	179.742,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5.612,5	6.006,9	6.236,9	6.373,2	6.590,3
	3 Jasa Keuangan Lainnya	10.866,6	11.690,9	12.545,2	13.173,0	13.936,2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	150,6	158,6	163,9	164,4	174,9
L	Real Estate	202.865,3	213.562,4	226.908,2	239.462,0	254.389,3
M,N	Jasa Perusahaan	18.328,7	19.560,5	20.889,2	21.612,5	22.706,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	461.077,7	488.812,0	513.344,6	544.978,0	571.987,9
P	Jasa Pendidikan	353.043,9	378.043,9	405.420,5	421.214,2	450.757,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84.986,0	91.000,0	97.499,8	103.017,3	109.753,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	226.654,6	240.000,0	259.240,5	273.439,0	285.093,8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.741.660,3	6.004.316,4	6.281.895,8	6.580.777,0	6.973.625,6

Lampiran Tabel 13.
Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,45	-0,99	1,67	1,74	1,71
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	2,68	-1,86	1,34	1,84	1,95
	a. Tanaman Pangan	0,54	0,60	2,44	2,85	0,16
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,34	-9,64	5,65	-0,77	1,13
	c. Perkebunan Semusim	2,63	0,58	-2,28	-0,34	5,15
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	6,99	-11,88	-0,42	0,33	5,25
	e. Perkebunan Tahunan	5,22	0,68	-3,96	1,28	3,21
	f. Peternakan	0,33	3,74	3,27	2,54	0,84
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,37	8,41	2,59	2,16	2,71
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,31	1,59	2,36	1,07	0,61
	3 Perikanan	6,26	4,32	4,57	2,32	1,57
B	Pertambangan dan Penggalian	4,60	1,49	0,55	1,72	13,68
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4,60	1,49	0,55	1,72	13,68
C	Industri Pengolahan	7,37	8,55	3,52	5,28	7,91
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	8,74	12,07	3,78	5,24	8,41
	3 Pengolahan Tembakau	-0,48	-20,19	-2,61	1,45	1,29
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4,52	7,02	5,08	4,58	7,69
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,35	-2,26	5,57	2,39	0,50
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	4,48	-0,27	-1,03	-0,80	6,81
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,69	1,45	1,63	4,70	1,07
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,29	7,19	6,29	6,89	4,93
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,32	-0,26	-4,10	-0,88	5,12
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	9,62	1,97	-5,45	0,93	6,47
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	4,79	2,62	-1,23	3,22	3,77
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-3,69	24,11	41,73	65,53	16,14
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	0,34	-1,32	-0,80	6,18	7,87
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	6,37	-6,26	2,71	-0,70	5,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,50	5,47	2,96	14,42	3,74
	1 Ketenagalistrikan	6,50	5,47	2,97	14,50	3,68
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	5,95	4,78	1,44	-0,01	16,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	1,06	1,21	2,18	2,54	4,51
F	Konstruksi	4,21	5,17	4,30	6,48	12,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	5,33	5,22	6,52	6,20	8,46
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	6,29	7,70	3,15	6,86	12,13
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,29	5,11	6,67	6,17	8,30
H	Transportasi dan Pergudangan	3,19	2,05	3,63	2,64	3,52
	1 Angkutan Rel	-0,35	13,31	7,81	4,21	7,16
	2 Angkutan Darat	2,57	1,21	3,19	1,86	2,75
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	6,29	5,66	5,46	6,02	6,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	4,78	5,37	5,93	5,04
	1 Penyediaan Akomodasi	8,05	6,46	6,70	5,66	4,91
	2 Penyediaan Makan Minum	7,39	4,78	5,37	5,93	5,04
J	Informasi dan Komunikasi	6,15	7,37	5,44	7,92	5,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,62	11,24	8,09	4,41	1,06
	1 Jasa Perantara Keuangan	14,89	11,69	8,32	4,45	0,62
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,96	7,03	3,83	2,19	3,41
	3 Jasa Keuangan Lainnya	5,41	7,59	7,31	5,00	5,79
	4 Jasa Penunjang Keuangan	-0,63	5,34	3,35	0,28	6,40
L	Real Estate	4,48	5,27	6,25	5,53	6,23
M,N	Jasa Perusahaan	4,03	6,72	6,79	3,46	5,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,11	6,02	5,02	6,16	4,96
P	Jasa Pendidikan	3,96	7,08	7,24	3,90	7,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,27	7,08	7,14	5,66	6,54
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,55	5,89	8,02	5,48	4,26
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,87	4,57	4,62	4,76	5,97

Lampiran Tabel 14.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,17	20,44	20,42	19,96	19,10
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	16,97	16,31	16,23	15,92	15,16
	a. Tanaman Pangan	4,56	4,25	4,51	4,44	4,11
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,66	0,56	0,57	0,55	0,51
	c. Perkebunan Semusim	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4,56	4,19	4,03	3,88	3,82
	e. Perkebunan Tahunan	2,08	2,11	1,90	1,96	1,90
	f. Peternakan	4,63	4,71	4,74	4,62	4,37
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,36	0,38	0,36	0,35	0,35
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,11	3,01	3,05	2,93	2,88
	3 Perikanan	1,08	1,12	1,15	1,11	1,06
B	Pertambangan dan Penggalian	1,52	1,44	1,43	1,39	1,61
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,52	1,44	1,43	1,39	1,61
C	Industri Pengolahan	12,03	12,36	12,07	12,20	12,43
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	9,26	9,77	9,56	9,69	9,96
	3 Pengolahan Tembakau	0,95	0,81	0,75	0,72	0,68
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,46	0,47	0,46	0,46	0,46
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,23	0,23	0,21	0,20	0,21
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,06	0,07	0,10	0,16	0,17
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0,40	0,37	0,37	0,36	0,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
	1 Ketenagalistrikan	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14
F	Konstruksi	8,66	8,54	8,47	8,55	9,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	13,00	13,16	13,15	13,61	14,00
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,58	0,60	0,61	0,61	0,64
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	12,42	12,56	12,54	13,00	13,37
H	Transportasi dan Pergudangan	8,43	8,40	8,30	8,05	7,84
	1 Angkutan Rel	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06
	2 Angkutan Darat	6,81	6,79	6,66	6,40	6,20
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1,58	1,57	1,58	1,60	1,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,74	3,80	3,87	3,91	3,92
	1 Penyediaan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan Makan Minum	3,74	3,79	3,86	3,90	3,91
J	Informasi dan Komunikasi	5,29	5,17	4,99	4,98	4,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,25	3,33	3,27	3,09
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,88	2,95	3,04	2,98	2,80
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,19	0,20	0,19	0,19	0,19
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	3,29	3,31	3,34	3,39	3,37
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,29	0,29	0,28	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8,45	8,72	8,92	9,15	9,14
P	Jasa Pendidikan	5,69	5,80	6,02	5,91	5,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,42	1,47	1,44	1,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,66	3,69	3,73	3,69	3,62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran Tabel 15.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,49	-0,19	0,31	0,32	0,30
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	0,42	-0,29	0,19	0,26	0,27
	a. Tanaman Pangan	0,03	0,03	0,10	0,12	0,01
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,01	-0,06	0,03	0,00	0,01
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,26	-0,46	-0,01	0,01	0,16
	e. Perkebunan Tahunan	0,10	0,01	-0,07	0,02	0,05
	f. Peternakan	0,01	0,16	0,14	0,11	0,03
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,01	0,05	0,07	0,03	0,02
	3 Perikanan	0,06	0,04	0,04	0,02	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,02	0,01	0,03	0,19
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,07	0,02	0,01	0,03	0,19
C	Industri Pengolahan	0,87	1,04	0,44	0,66	0,99
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,80	1,14	0,38	0,53	0,85
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	-0,16	-0,02	0,01	0,01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,01	0,03	0,03	0,03	0,02
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,01
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,02	0,03	0,07	0,03
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0,03	-0,03	0,01	0,00	0,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
F	Konstruksi	0,36	0,44	0,36	0,55	1,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,70	0,69	0,87	0,84	1,16
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,04	0,04	0,02	0,04	0,07
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	0,67	0,64	0,85	0,80	1,09
H	Transportasi dan Pergudangan	0,28	0,18	0,31	0,22	0,29
	1 Angkutan Rel	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	0,19	0,09	0,22	0,13	0,18
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0,10	0,09	0,08	0,09	0,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,17	0,20	0,22	0,19
	1 Penyediaan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan Makan Minum	0,26	0,17	0,20	0,22	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	0,37	0,45	0,34	0,50	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,35	0,31	0,24	0,13	0,03
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,33	0,29	0,22	0,12	0,02
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	0,16	0,19	0,22	0,20	0,23
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,41	0,48	0,41	0,50	0,41
P	Jasa Pendidikan	0,25	0,44	0,46	0,25	0,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,09	0,10	0,11	0,09	0,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,18	0,23	0,32	0,23	0,18
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,87	4,57	4,62	4,76	5,97

Lampiran Tabel 16.
PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 ¹⁾	2017 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.476.292,0	2.556.405,7	2.821.402,7	3.010.874,3	3.148.388,5
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	2.308.295,0	2.364.759,1	2.606.846,3	2.784.396,6	2.906.098,6
	a. Tanaman Pangan	887.616,1	880.686,8	1.015.633,9	1.102.402,7	1.144.942,2
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	83.381,1	74.955,5	82.348,6	86.147,9	85.147,3
	c. Perkebunan Semusim	16.447,1	18.530,6	19.430,6	19.257,7	20.122,1
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	846.612,1	872.685,0	918.208,4	960.150,4	1.013.303,3
	e. Perkebunan Tahunan	31.445,8	34.264,9	34.783,2	39.274,4	42.490,6
	f. Peternakan	400.582,6	434.663,1	486.568,4	525.229,1	543.755,2
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	42.210,1	48.973,1	49.873,1	51.934,4	56.338,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	75.048,2	82.083,0	92.480,3	98.041,1	103.310,6
	3 Perikanan	92.948,8	109.563,6	122.076,1	128.436,6	138.979,4
B	Pertambangan dan Penggalian	106.879,3	116.953,1	125.530,4	128.516,3	129.076,0
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	106.879,3	116.953,1	125.530,4	128.516,3	129.076,0
C	Industri Pengolahan	2.491.084,2	2.741.391,6	2.909.864,1	3.175.265,8	3.449.821,2
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.159.273,9	1.363.459,8	1.472.594,8	1.631.223,0	1.761.300,8
	3 Pengolahan Tembakau	265.840,1	248.106,9	242.910,4	262.068,5	301.013,9
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	284.980,6	321.464,4	355.093,4	396.683,9	443.322,2
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	123.149,5	123.453,1	133.693,1	145.160,5	154.734,1
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	81.174,1	82.172,1	83.502,1	84.295,6	91.409,8
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	20.173,9	22.293,8	23.193,8	25.402,2	27.468,9
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	20.326,8	22.436,8	25.526,8	28.113,9	30.219,2
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	11.864,5	11.444,6	10.884,6	10.942,5	11.062,0
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	114.443,2	124.235,3	126.635,3	130.716,1	141.283,6
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	123.911,2	133.451,0	136.051,0	140.487,9	140.910,8
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	24.111,1	27.383,4	29.173,4	31.931,8	33.133,8
	14 Industri Alat Angkutan	2.966,9	2.764,9	2.579,9	2.541,8	2.635,9
	15 Industri Furnitur	208.403,2	206.725,6	211.725,6	225.553,5	246.764,9
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	50.465,1	51.999,8	56.299,8	60.144,8	64.561,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.918,6	18.773,7	21.882,0	26.436,0	32.302,6
	1 Ketenagalistrikan	15.679,6	18.518,0	21.630,0	26.163,1	32.010,6
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	239,0	255,7	252,0	272,9	292,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	13.242,1	15.153,3	16.192,9	17.043,7	17.976,3
F	Konstruksi	1.511.936,7	1.654.150,4	1.803.228,3	1.943.455,3	2.118.975,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.347.850,3	1.473.263,0	1.585.613,0	1.770.132,1	1.945.840,1
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	140.633,1	159.866,3	174.776,3	195.783,5	215.909,5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.207.217,2	1.313.396,7	1.410.836,7	1.574.348,6	1.729.930,6
H	Transportasi dan Pergudangan	789.917,8	874.460,7	940.530,7	1.002.783,6	1.070.507,3
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	614.457,7	678.846,5	725.416,5	765.129,9	801.114,4
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	175.460,1	195.614,2	215.114,2	237.653,6	269.392,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.770.326,1	2.011.871,2	2.239.275,5	2.442.216,4	2.656.392,0
	1 Penyediaan Akomodasi	213.246,2	232.437,7	263.342,0	291.863,8	331.854,8
	2 Penyediaan Makan Minum	1.557.079,9	1.779.433,4	1.975.933,4	2.150.352,6	2.324.537,2
J	Informasi dan Komunikasi	1.283.762,3	1.347.205,5	1.411.574,2	1.519.508,1	1.667.176,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	416.541,8	483.499,1	545.349,2	584.815,5	626.064,6
	1 Jasa Perantara Keuangan	377.582,1	441.469,6	500.114,7	537.035,9	573.207,1
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	13.235,8	14.688,0	15.655,0	16.361,4	17.833,6
	3 Jasa Keuangan Lainnya	25.366,4	26.952,2	29.172,2	30.994,1	34.564,5
	4 Jasa Penunjang Keuangan	357,5	389,4	407,4	424,2	459,4
L	Real Estate	1.008.900,1	1.141.508,8	1.262.118,4	1.376.057,5	1.486.180,1
M,N	Jasa Perusahaan	77.173,6	86.886,8	94.901,6	100.784,6	107.584,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.147.990,0	1.285.862,9	1.432.619,2	1.571.240,3	1.756.873,4
P	Jasa Pendidikan	1.073.246,7	1.208.172,6	1.372.466,0	1.449.027,9	1.547.113,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290.728,6	316.399,2	354.915,3	387.702,9	419.294,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	316.964,9	350.967,2	387.739,7	413.475,5	454.170,4
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16.138.755,1	17.682.924,9	19.325.203,3	20.919.335,9	22.633.736,7

Lampiran Tabel 17.
PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.964.025,9	1.912.487,9	1.952.982,7	1.982.709,1	2.032.344,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	1.827.697,4	1.767.746,1	1.801.653,8	1.828.449,5	1.872.873,4
	a. Tanaman Pangan	736.003,8	726.357,6	747.387,2	767.608,8	777.825,1
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	68.592,7	59.538,0	63.611,6	62.850,7	64.186,0
	c. Perkebunan Semusim	14.317,0	14.406,9	13.902,3	13.236,3	13.530,1
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	632.367,5	574.894,0	568.012,3	562.485,3	580.639,2
	e. Perkebunan Tahunan	25.515,3	25.399,2	25.256,5	25.618,6	26.646,9
	f. Peternakan	318.072,3	331.495,1	347.556,0	359.977,2	371.952,3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	32.828,8	35.655,4	35.928,0	36.672,6	38.093,9
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	66.514,8	69.058,3	71.635,1	72.601,7	74.527,2
	3 Perikanan	69.813,6	75.683,4	79.693,9	81.658,0	84.943,3
B	Pertambangan dan Penggalian	100.263,1	101.804,8	102.422,6	102.781,3	102.845,1
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100.263,1	101.804,8	102.422,6	102.781,3	102.845,1
C	Industri Pengolahan	2.138.364,4	2.224.275,1	2.283.703,1	2.404.767,2	2.558.218,3
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.013.260,1	1.116.885,1	1.161.311,1	1.238.366,6	1.322.109,4
	3 Pengolahan Tembaku	187.937,7	150.321,8	143.721,7	146.903,4	157.327,9
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	235.876,6	257.648,6	278.748,6	302.234,6	326.282,9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	100.308,3	98.341,6	106.241,6	111.297,2	116.201,1
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	77.630,6	77.115,7	75.515,7	74.516,7	79.401,6
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	18.699,1	19.486,0	19.872,0	20.945,2	21.734,8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21.867,2	23.658,6	25.522,6	27.129,5	28.839,3
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	10.625,4	10.200,6	9.500,8	9.107,6	9.309,1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	101.490,8	102.770,2	98.450,2	98.700,9	105.124,3
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	112.822,7	117.922,0	117.721,0	119.563,6	119.232,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	21.844,6	23.515,5	24.915,5	26.129,8	26.936,5
	14 Industri Alat Angkutan	2.590,0	2.350,3	2.185,3	2.092,4	2.142,8
	15 Industri Furnitur	187.940,4	181.179,8	176.117,8	183.029,8	196.042,2
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	45.470,8	42.879,2	43.879,2	44.749,8	47.533,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.910,9	23.520,2	24.243,8	27.905,3	29.022,9
	1 Ketenagalistrikan	21.712,2	23.312,4	24.033,5	27.689,4	28.803,3
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	198,7	207,8	210,3	216,0	219,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	12.222,4	12.649,0	13.022,1	13.407,7	13.834,6
F	Konstruksi	1.368.231,2	1.447.564,0	1.506.241,3	1.567.472,5	1.660.496,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.156.441,8	1.232.188,2	1.315.611,2	1.401.507,7	1.482.797,1
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	115.813,5	127.492,1	132.420,2	141.670,3	150.773,8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.040.628,2	1.104.696,1	1.183.191,1	1.259.837,4	1.332.023,3
H	Transportasi dan Pergudangan	721.870,5	749.086,1	777.541,9	809.961,0	841.691,9
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	570.330,7	583.998,9	603.298,9	623.673,4	643.722,8
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	151.539,7	165.087,2	174.242,9	186.287,6	197.969,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.443.507,6	1.555.098,5	1.646.727,0	1.750.671,5	1.851.038,5
	1 Penyediaan Akomodasi	167.916,8	178.419,3	191.349,3	207.258,6	228.532,4
	2 Penyediaan Makan Minum	1.275.590,8	1.376.679,2	1.455.377,7	1.543.412,9	1.622.506,1
J	Informasi dan Komunikasi	1.358.556,6	1.454.258,1	1.536.406,9	1.664.675,1	1.762.378,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	351.945,0	385.477,1	418.450,3	438.489,6	450.880,8
	1 Jasa Perantara Keuangan	316.712,0	348.753,2	379.506,4	397.221,1	407.233,9
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	12.256,5	13.193,9	13.673,9	14.156,4	14.862,2
	3 Jasa Keuangan Lainnya	22.657,7	23.197,1	24.927,1	26.759,5	28.421,8
	4 Jasa Penunjang Keuangan	318,8	333,0	343,0	352,6	362,9
L	Real Estate	910.010,4	989.905,3	1.057.941,5	1.119.537,2	1.175.156,4
M,N	Jasa Perusahaan	76.405,4	81.440,8	87.194,2	90.911,3	94.797,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	959.446,7	1.010.099,0	1.063.245,3	1.125.300,6	1.181.300,9
P	Jasa Pendidikan	996.811,5	1.073.653,8	1.157.438,0	1.194.995,4	1.256.613,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.486,9	281.683,2	302.837,0	318.577,5	334.917,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	296.218,9	315.933,2	342.511,4	363.114,3	383.485,7
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	14.138.719,3	14.851.124,1	15.588.520,4	16.376.784,3	17.211.819,3

Lampiran Tabel 18.
Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,66	-2,62	2,12	1,52	2,50
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	2,56	-3,28	1,92	1,49	2,43
	a. Tanaman Pangan	0,39	-1,31	2,90	2,71	1,33
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,94	-13,20	6,84	-1,20	2,12
	c. Perkebunan Semusim	2,09	0,63	-3,50	-4,79	2,22
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	6,16	-9,09	-1,20	-0,97	3,23
	e. Perkebunan Tahunan	6,38	-0,46	-0,56	1,43	4,01
	f. Peternakan	1,08	4,22	4,84	3,57	3,33
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,82	8,61	0,76	2,07	3,88
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,96	3,82	3,73	1,35	2,65
	3 Perikanan	6,01	8,41	5,30	2,46	4,02
B	Pertambangan dan Penggalian	2,45	1,54	0,61	0,35	0,06
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,45	1,54	0,61	0,35	0,06
C	Industri Pengolahan	6,29	4,02	2,67	5,30	6,38
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	8,35	10,23	3,98	6,64	6,76
	3 Pengolahan Tembakau	1,75	-20,02	-4,39	2,21	7,10
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8,72	9,23	8,19	8,43	7,96
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,53	-1,96	8,03	4,76	4,41
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	3,76	-0,66	-2,07	-1,32	6,56
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetaka	1,73	4,21	1,98	5,40	3,77
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,55	8,19	7,88	6,30	6,30
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,36	-4,00	-6,86	-4,14	2,21
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	7,54	1,26	-4,20	0,25	6,51
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	4,80	4,52	-0,17	1,57	-0,28
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-0,41	7,65	5,95	4,87	3,09
	14 Industri Alat Angkutan	-1,04	-9,26	-7,02	-4,25	2,41
	15 Industri Furnitur	1,79	-3,60	-2,79	3,92	7,11
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	4,77	-5,70	2,33	1,98	6,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,11	7,34	3,08	15,10	4,00
	1 Ketenagalistrikan	6,10	7,37	3,09	15,21	4,02
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	7,45	4,62	1,20	2,69	1,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,58	3,49	2,95	2,96	3,18
F	Konstruksi	4,84	5,80	4,05	4,07	5,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	5,61	6,55	6,77	6,53	5,80
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasir	5,94	10,08	3,87	6,99	6,43
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,57	6,16	7,11	6,48	5,73
H	Transportasi dan Pergudangan	4,96	3,77	3,80	4,17	3,92
	1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2 Angkutan Darat	4,52	2,40	3,30	3,38	3,21
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	6,62	8,94	5,55	6,91	6,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,54	7,73	5,89	6,31	5,73
	1 Penyediaan Akomodasi	7,88	6,25	7,25	8,31	10,26
	2 Penyediaan Makan Minum	7,50	7,92	5,72	6,05	5,12
J	Informasi dan Komunikasi	6,31	7,04	5,65	8,35	5,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,75	9,53	8,55	4,79	2,83
	1 Jasa Perantara Keuangan	12,91	10,12	8,82	4,67	2,52
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	1,75	7,65	3,64	3,53	4,99
	3 Jasa Keuangan Lainnya	2,65	2,38	7,46	7,35	6,21
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,78	4,43	3,00	2,81	2,93
L	Real Estate	4,52	8,78	6,87	5,82	4,97
M,N	Jasa Perusahaan	4,47	6,59	7,06	4,26	4,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,37	5,28	5,26	5,84	4,98
P	Jasa Pendidikan	5,08	7,71	7,80	3,24	5,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	7,31	7,51	5,20	5,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,35	6,66	8,41	6,02	5,61
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,46	5,04	4,97	5,06	5,10

Lampiran Tabel 19.
 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,34	14,46	14,60	14,39	14,03
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pert	14,30	13,37	13,49	13,31	12,96
	a. Tanaman Pangan	5,50	4,98	5,26	5,27	5,13
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,52	0,42	0,43	0,41	0,38
	c. Perkebunan Semusim	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	5,25	4,94	4,75	4,59	4,50
	e. Perkebunan Tahunan	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19
	f. Peternakan	2,48	2,46	2,52	2,51	2,42
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,26	0,28	0,26	0,25	0,25
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,47	0,46	0,48	0,47	0,45
	3 Perikanan	0,58	0,62	0,63	0,61	0,62
B	Pertambangan dan Penggalian	0,66	0,66	0,65	0,61	0,58
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,66	0,66	0,65	0,61	0,58
C	Industri Pengolahan	15,44	15,50	15,06	15,18	15,13
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,18	7,71	7,62	7,80	7,77
	3 Pengolahan Tembakau	1,65	1,40	1,26	1,25	1,27
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,77	1,82	1,84	1,90	1,93
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,76	0,70	0,69	0,69	0,70
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	0,50	0,46	0,43	0,40	0,43
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,71	0,70	0,66	0,62	0,59
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	0,77	0,75	0,70	0,67	0,63
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
	14 Industri Alat Angkutan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
	15 Industri Furnitur	1,29	1,17	1,10	1,08	1,07
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	0,31	0,29	0,29	0,29	0,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,11	0,13	0,14
	1 Ketenagalistrikan	0,10	0,10	0,11	0,13	0,14
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,37	9,35	9,33	9,29	9,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8,35	8,33	8,20	8,46	8,59
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasir	0,87	0,90	0,90	0,94	0,95
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	7,48	7,43	7,30	7,53	7,65
H	Transportasi dan Pergudangan	4,89	4,95	4,87	4,79	4,70
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	3,81	3,84	3,75	3,66	3,54
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1,09	1,11	1,11	1,14	1,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,97	11,38	11,59	11,67	11,73
	1 Penyediaan Akomodasi	1,32	1,31	1,36	1,40	1,46
	2 Penyediaan Makan Minum	9,65	10,06	10,22	10,28	10,26
J	Informasi dan Komunikasi	7,95	7,62	7,30	7,26	7,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,58	2,73	2,82	2,80	2,76
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,34	2,50	2,59	2,57	2,53
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	6,25	6,46	6,53	6,58	6,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,48	0,49	0,49	0,48	0,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	7,11	7,27	7,41	7,51	7,83
P	Jasa Pendidikan	6,65	6,83	7,10	6,93	7,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,80	1,79	1,84	1,85	1,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,96	1,98	2,01	1,98	2,02
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran Tabel 20.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bantul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,38	-0,36	0,27	0,19	0,30
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	0,34	-0,42	0,23	0,17	0,27
	a. Tanaman Pangan	0,02	-0,07	0,14	0,13	0,06
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	-0,06	0,03	0,00	0,01
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,27	-0,41	-0,05	-0,04	0,11
	e. Perkebunan Tahunan	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	f. Peternakan	0,03	0,09	0,11	0,08	0,07
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
	3 Perikanan	0,03	0,04	0,03	0,01	0,02
B	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	0,94	0,61	0,40	0,78	0,94
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	Industri Makanan dan Minuman					
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,58	0,73	0,30	0,49	0,51
	3 Pengolahan Tembakau	0,02	-0,27	-0,04	0,02	0,06
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,04	-0,01	0,05	0,03	0,03
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	0,02	0,00	-0,01	-0,01	0,03
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetaka	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,05	0,01	-0,03	0,00	0,04
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,04	0,04	0,00	0,01	0,00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,02	-0,05	-0,03	0,04	0,08
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	0,02	-0,02	0,01	0,01	0,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	0,47	0,56	0,40	0,39	0,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	0,46	0,54	0,56	0,55	0,50
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,05	0,08	0,03	0,06	0,06
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	0,41	0,45	0,53	0,49	0,44
H	Transportasi dan Pergudangan	0,25	0,19	0,19	0,21	0,19
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	0,18	0,10	0,13	0,13	0,12
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0,07	0,10	0,06	0,08	0,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,79	0,62	0,67	0,61
	1 Penyediaan Akomodasi	0,09	0,07	0,09	0,10	0,13
	2 Penyediaan Makan Minum	0,66	0,71	0,53	0,56	0,48
J	Informasi dan Komunikasi	0,60	0,68	0,55	0,82	0,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	0,24	0,22	0,13	0,08
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,27	0,23	0,21	0,11	0,06
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	0,29	0,57	0,46	0,40	0,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,04	0,04	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,36	0,36	0,36	0,40	0,34
P	Jasa Pendidikan	0,36	0,54	0,56	0,24	0,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,14	0,14	0,10	0,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,11	0,14	0,18	0,13	0,12
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,46	5,04	4,97	5,06	5,10

Lampiran Tabel 21.
PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.046.994,5	3.150.565,0	3.535.656,7	3.787.293,3	3.968.200,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	2.523.488,1	2.579.953,8	2.893.983,8	3.107.888,0	3.236.031,5
	a. Tanaman Pangan	1.439.232,6	1.421.015,0	1.654.410,2	1.791.821,4	1.836.776,9
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	8.097,9	7.688,8	8.291,0	8.677,1	8.611,5
	c. Perkebunan Semusim	3.764,8	4.241,7	4.493,2	4.552,8	5.065,4
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	415.139,3	422.137,3	442.591,4	460.530,8	493.003,5
	e. Perkebunan Tahunan	19.893,2	22.683,6	22.330,0	24.722,2	26.844,7
	f. Peternakan	584.180,9	642.772,5	700.251,6	750.359,2	791.706,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	53.179,5	59.414,8	61.616,5	67.224,5	74.023,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	421.629,6	456.036,4	513.727,3	545.492,0	582.575,4
	3 Perikanan	101.876,8	114.574,8	127.945,6	133.913,2	149.593,1
B	Pertambangan dan Penggalian	170.194,5	178.643,4	188.772,5	195.599,8	201.918,5
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	170.194,5	178.643,4	188.772,5	195.599,8	201.918,5
C	Industri Pengolahan	1.086.106,3	1.204.712,4	1.284.288,4	1.405.322,4	1.535.319,3
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	657.919,9	756.613,1	818.833,9	914.922,2	1.003.515,1
	3 Pengolahan Tembakau	731,7	717,7	723,5	786,0	899,7
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	15.787,6	17.761,0	19.618,4	21.509,0	24.011,0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.994,2	3.203,5	3.396,8	3.694,0	3.988,3
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	44.344,3	45.571,1	46.244,4	47.131,7	52.048,4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	5.211,1	5.671,8	5.921,8	6.551,1	7.130,4
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	18.874,1	21.419,4	24.253,5	26.803,9	28.549,3
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.862,5	4.169,9	3.936,4	3.855,4	3.981,9
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	93.029,3	102.467,1	104.925,5	107.745,7	117.681,2
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	52.076,8	56.260,6	57.098,5	60.097,3	60.398,7
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	17.263,2	18.909,4	20.086,2	22.234,6	23.789,5
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	133.734,0	129.259,2	133.428,5	141.812,2	157.153,5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	40.277,5	42.688,7	45.821,1	48.179,4	52.172,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.563,4	8.991,0	10.404,2	12.444,1	15.436,4
	1 Ketenagalistrikan	7.406,0	8.828,7	10.243,3	12.269,4	15.249,6
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	157,4	162,3	161,0	174,7	186,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	19.538,6	22.134,7	23.520,7	24.682,0	26.247,7
F	Konstruksi	1.109.379,3	1.198.556,4	1.298.853,1	1.407.758,0	1.563.746,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.002.567,1	1.126.233,7	1.218.309,9	1.381.432,0	1.519.918,4
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	54.972,2	62.536,0	67.967,5	76.273,1	83.278,9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	947.594,8	1.063.697,7	1.150.342,4	1.305.159,0	1.436.639,5
H	Transportasi dan Pergudangan	603.119,4	659.675,5	707.695,0	756.286,7	805.655,1
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	478.073,4	520.332,7	553.254,7	584.595,8	614.442,4
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	125.046,0	139.342,8	154.440,2	171.690,8	191.212,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	628.770,2	726.389,4	813.608,1	883.856,8	958.922,0
	1 Penyediaan Akomodasi	11.963,7	13.190,2	15.062,6	16.703,7	19.187,0
	2 Penyediaan Makan Minum	616.806,5	713.199,2	798.545,6	867.153,1	939.735,0
J	Informasi dan Komunikasi	855.560,3	916.149,7	963.597,6	1.051.970,4	1.156.954,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	243.579,5	284.852,3	322.775,3	346.867,9	361.954,0
	1 Jasa Perantara Keuangan	214.873,4	253.061,6	288.479,6	309.558,8	320.454,7
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	10.996,3	12.354,6	13.212,4	14.160,7	15.560,1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	17.624,0	19.340,3	20.982,9	23.041,9	25.822,1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	85,8	95,8	100,3	106,5	117,0
L	Real Estate	385.700,5	430.299,2	474.733,5	528.958,9	578.583,4
M,N	Jasa Perusahaan	49.472,5	55.035,7	60.222,3	64.966,4	70.298,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.048.848,1	1.166.153,8	1.289.112,2	1.411.268,5	1.564.517,3
P	Jasa Pendidikan	678.669,5	772.874,0	876.367,3	921.758,6	997.908,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227.171,6	247.287,8	277.851,2	299.358,7	324.943,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	367.105,3	408.817,1	452.888,9	502.230,6	556.518,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.530.340,8	12.557.371,3	13.798.656,9	14.982.055,1	16.207.041,8

Lampiran Tabel 22.
PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.508.677,4	2.493.155,8	2.557.403,2	2.613.141,8	2.664.845,1
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	2.066.846,4	2.039.894,2	2.087.324,1	2.135.212,1	2.167.740,7
	a. Tanaman Pangan	1.226.636,7	1.203.663,7	1.238.415,9	1.272.198,9	1.265.537,9
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	6.648,4	6.443,5	6.719,0	6.714,2	6.857,5
	c. Perkebunan Semusim	3.310,8	3.376,1	3.284,3	3.189,6	3.334,6
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	320.819,1	287.592,9	285.079,0	283.004,5	296.745,5
	e. Perkebunan Tahunan	15.887,7	16.088,2	15.476,2	15.643,2	16.395,6
	f. Peternakan	449.408,6	476.208,5	491.092,1	505.490,9	527.099,3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	44.135,1	46.521,3	47.257,6	48.971,0	51.770,3
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	361.775,9	369.673,8	382.529,1	388.647,8	403.526,9
	3 Perikanan	80.055,1	83.587,8	87.550,0	89.281,9	93.577,4
B	Pertambangan dan Penggalian	158.455,7	160.985,2	161.383,4	162.657,3	167.046,1
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	158.455,7	160.985,2	161.383,4	162.657,3	167.046,1
C	Industri Pengolahan	968.727,9	1.008.531,4	1.035.163,3	1.089.755,5	1.163.512,3
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	576.211,1	614.314,3	644.235,3	687.751,2	736.014,6
	3 Pengolahan Tembakau	519,3	441,6	434,4	446,4	475,5
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	12.508,7	13.485,7	14.495,8	15.392,3	16.740,0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.640,8	2.683,9	2.814,1	2.905,2	3.033,5
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	42.682,7	42.615,2	41.981,3	41.913,5	45.453,7
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	4.810,5	5.007,7	5.112,1	5.426,2	5.644,0
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21.919,6	23.629,0	25.342,3	27.252,7	28.722,4
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.293,7	3.475,4	3.218,6	3.045,1	3.150,3
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	82.617,9	86.256,3	82.204,4	82.544,9	88.962,1
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	48.872,5	50.380,1	49.946,6	52.264,1	52.226,3
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	15.225,0	16.214,7	17.092,5	18.095,3	18.799,2
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	120.905,8	113.772,1	111.399,3	115.419,8	124.382,5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	36.520,3	36.255,4	36.886,5	37.298,9	39.908,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.025,5	10.775,4	11.030,5	12.610,8	13.256,2
	1 Ketenagalistrikan	9.897,1	10.644,9	10.898,3	12.475,5	13.117,1
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	128,4	130,5	132,2	135,3	139,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	16.785,1	17.437,0	17.940,0	18.351,0	19.033,9
F	Konstruksi	945.650,5	993.510,4	1.036.792,6	1.092.138,3	1.176.314,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	910.271,7	971.903,7	1.038.835,3	1.111.128,3	1.179.089,8
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	46.176,0	50.812,5	52.659,0	56.297,0	59.296,0
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	864.095,7	921.091,2	986.176,3	1.054.831,2	1.119.793,8
H	Transportasi dan Pergudangan	548.633,4	561.987,4	582.657,8	603.242,2	626.705,1
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	443.223,9	449.507,6	463.407,5	475.301,8	491.287,2
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	105.409,5	112.479,8	119.250,2	127.940,5	135.417,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	549.675,6	596.989,2	635.346,4	670.616,2	708.164,6
	1 Penyediaan Akomodasi	9.427,3	9.863,8	10.592,9	11.466,8	12.801,3
	2 Penyediaan Makan Minum	540.248,3	587.125,5	624.753,5	659.149,4	695.363,3
J	Informasi dan Komunikasi	886.937,7	957.028,2	1.011.119,7	1.099.899,7	1.174.024,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	198.811,9	220.771,0	239.629,5	250.943,1	253.056,5
	1 Jasa Perantara Keuangan	174.194,0	194.619,7	211.890,4	221.671,8	221.707,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9.596,0	10.261,8	10.669,1	11.075,5	11.708,7
	3 Jasa Keuangan Lainnya	14.948,5	15.811,0	16.988,9	18.112,8	19.554,1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	73,4	78,4	81,0	83,1	86,6
L	Real Estate	341.097,1	368.705,2	393.209,3	420.060,4	442.615,4
M,N	Jasa Perusahaan	49.766,5	52.936,8	56.662,6	59.527,9	63.147,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	887.944,9	939.395,0	988.811,7	1.040.788,4	1.088.902,2
P	Jasa Pendidikan	640.146,6	692.197,5	744.844,8	770.301,1	817.091,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208.405,4	223.760,5	239.841,1	250.576,0	265.932,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	347.419,6	369.722,6	401.692,0	431.708,9	459.756,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.177.432,5	10.639.792,3	11.152.363,1	11.697.446,9	12.282.493,6

Lampiran Tabel 23.

Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,30	-0,62	2,58	2,18	1,98
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	2,49	-1,30	2,33	2,29	1,52
	a. Tanaman Pangan	1,29	-1,87	2,89	2,73	-0,52
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,69	-3,08	4,28	-0,07	2,14
	c. Perkebunan Semusim	3,81	1,97	-2,72	-2,88	4,55
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	6,25	-10,36	-0,87	-0,73	4,86
	e. Perkebunan Tahunan	6,83	1,26	-3,80	1,08	4,81
	f. Peternakan	3,16	5,96	3,13	2,93	4,27
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,51	5,41	1,58	3,63	5,72
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,62	2,18	3,48	1,60	3,83
	3 Perikanan	5,09	4,41	4,74	1,98	4,81
B	Pertambangan dan Penggalian	4,86	1,60	0,25	0,79	2,70
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4,86	1,60	0,25	0,79	2,70
C	Industri Pengolahan	8,21	4,11	2,64	5,27	6,77
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	10,13	6,61	4,87	6,75	7,02
	3 Pengolahan Tembakau	1,17	-14,96	-1,64	2,76	6,51
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	10,45	7,81	7,49	6,18	8,76
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6,60	1,63	4,85	3,24	4,42
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	5,15	-0,16	-1,49	-0,16	8,45
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	2,44	4,10	2,09	6,14	4,02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-0,65	7,80	7,25	7,54	5,39
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-1,39	5,52	-7,39	-5,39	3,45
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	9,46	4,40	-4,70	0,41	7,77
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	5,58	3,08	-0,86	4,64	-0,07
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-0,90	6,50	5,41	5,87	3,89
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	4,86	-5,90	-2,09	3,61	7,77
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	5,64	-0,73	1,74	1,12	7,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,91	7,48	2,37	14,33	5,12
	1 Ketenagalistrikan	6,96	7,56	2,38	14,47	5,14
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	3,27	1,61	1,29	2,33	2,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1,45	3,88	2,88	2,29	3,72
F	Konstruksi	4,52	5,06	4,36	5,34	7,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	5,11	6,77	6,89	6,96	6,12
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	5,89	10,04	3,63	6,91	5,33
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,07	6,60	7,07	6,96	6,16
H	Transportasi dan Pergudangan	4,73	2,43	3,68	3,53	3,89
	1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2 Angkutan Darat	4,50	1,42	3,09	2,57	3,36
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	5,70	6,71	6,02	7,29	5,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,31	8,61	6,43	5,55	5,60
	1 Penyediaan Akomodasi	9,04	4,63	7,39	8,25	11,64
	2 Penyediaan Makan Minum	8,30	8,68	6,41	5,51	5,49
J	Informasi dan Komunikasi	6,23	7,90	5,65	8,78	6,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,89	11,05	8,54	4,72	0,84
	1 Jasa Perantara Keuangan	12,91	11,73	8,87	4,62	0,02
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	1,62	6,94	3,97	3,81	5,72
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7,65	5,77	7,45	6,62	7,96
	4 Jasa Penunjang Keuangan	2,04	6,81	3,23	2,65	4,22
L	Real Estate	4,44	8,09	6,65	6,83	5,37
M,N	Jasa Perusahaan	3,53	6,37	7,04	5,06	6,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,54	5,79	5,26	5,26	4,62
P	Jasa Pendidikan	4,92	8,13	7,61	3,42	6,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	7,37	7,19	4,48	6,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,17	6,42	8,65	7,47	6,50
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,97	4,54	4,82	4,89	5,00

Lampiran Tabel 24.

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,43	25,09	25,62	25,28	24,59
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	21,89	20,55	20,97	20,74	20,05
	a. Tanaman Pangan	12,48	11,32	11,99	11,96	11,25
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
	c. Perkebunan Semusim	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3,60	3,36	3,21	3,07	3,12
	e. Perkebunan Tahunan	0,17	0,18	0,16	0,17	0,16
	f. Peternakan	5,07	5,12	5,07	5,01	4,99
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,46	0,47	0,45	0,45	0,44
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,66	3,63	3,72	3,64	3,61
	3 Perikanan	0,88	0,91	0,93	0,89	0,92
B	Pertambangan dan Penggalian	1,48	1,42	1,37	1,31	1,23
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,48	1,42	1,37	1,31	1,23
C	Industri Pengolahan	9,42	9,59	9,31	9,38	9,69
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	5,71	6,03	5,93	6,11	6,51
	3 Pengolahan Tembakau	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	0,38	0,36	0,34	0,31	0,29
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,81	0,82	0,76	0,72	0,71
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,45	0,45	0,41	0,40	0,39
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	1,16	1,03	0,97	0,95	0,91
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
	1 Ketenagalistrikan	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,17	0,18	0,17	0,16	0,17
F	Konstruksi	9,62	9,54	9,41	9,40	9,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8,70	8,97	8,83	9,22	9,25
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,48	0,50	0,49	0,51	0,52
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	8,22	8,47	8,34	8,71	8,73
H	Transportasi dan Pergudangan	5,23	5,25	5,13	5,04	5,04
	1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2 Angkutan Darat	4,15	4,14	4,01	3,90	3,88
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1,08	1,11	1,12	1,14	1,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,45	5,78	5,90	5,90	6,12
	1 Penyediaan Akomodasi	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12
	2 Penyediaan Makan Minum	5,35	5,68	5,79	5,79	6,00
J	Informasi dan Komunikasi	7,42	7,30	6,98	7,02	6,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,11	2,27	2,34	2,32	2,40
	1 Jasa Perantara Keuangan	1,86	2,02	2,09	2,07	2,15
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	3,35	3,43	3,44	3,53	3,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	9,10	9,29	9,34	9,38	9,30
P	Jasa Pendidikan	5,89	6,15	6,35	6,20	6,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,97	1,97	2,01	2,00	1,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,18	3,26	3,28	3,35	3,45
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran Tabel 25.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,58	-0,15	0,60	0,50	0,44
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	0,52	-0,26	0,45	0,43	0,28
	a. Tanaman Pangan	0,16	-0,23	0,33	0,30	-0,06
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,19	-0,33	-0,02	-0,02	0,12
	e. Perkebunan Tahunan	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
	f. Peternakan	0,14	0,26	0,14	0,13	0,18
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,02	0,08	0,12	0,05	0,13
	3 Perikanan	0,04	0,03	0,04	0,02	0,04
B	Pertambangan dan Penggalian	0,08	0,02	0,00	0,01	0,04
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,08	0,02	0,00	0,01	0,04
C	Industri Pengolahan	0,76	0,39	0,25	0,49	0,63
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	Industri Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,55	0,37	0,28	0,39	0,41
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,03
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,07	0,04	-0,04	0,00	0,05
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,03	0,01	0,00	0,02	0,00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	0,06	-0,07	-0,02	0,04	0,08
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
F	Konstruksi	0,42	0,47	0,41	0,50	0,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,46	0,61	0,63	0,65	0,58
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,03	0,05	0,02	0,03	0,03
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	0,43	0,56	0,61	0,62	0,56
H	Transportasi dan Pergudangan	0,26	0,13	0,19	0,18	0,20
	1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2 Angkutan Darat	0,20	0,06	0,13	0,11	0,14
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0,06	0,07	0,06	0,08	0,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	0,46	0,36	0,32	0,32
	1 Penyediaan Akomodasi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
	2 Penyediaan Makan Minum	0,43	0,46	0,35	0,31	0,31
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,69	0,51	0,80	0,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,22	0,22	0,18	0,10	0,02
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,21	0,20	0,16	0,09	0,00
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	0,15	0,27	0,23	0,24	0,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,40	0,51	0,46	0,47	0,41
P	Jasa Pendidikan	0,31	0,51	0,49	0,23	0,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	0,15	0,15	0,10	0,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,18	0,22	0,30	0,27	0,24
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,97	4,54	4,82	4,89	5,00

Lampiran Tabel 26.
PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.534.773,3	2.574.199,3	2.826.715,0	2.983.069,2	3.085.181,1
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	2.393.150,1	2.419.559,8	2.656.007,0	2.804.252,5	2.894.208,1
	a. Tanaman Pangan	702.048,9	683.578,0	788.383,7	857.513,6	861.622,6
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	149.463,6	140.352,4	152.636,0	157.337,6	154.483,8
	c. Perkebunan Semusim	19.262,9	21.070,3	21.865,3	22.659,4	23.953,4
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	999.876,2	1.004.807,8	1.064.913,3	1.096.458,4	1.154.793,9
	e. Perkebunan Tahunan	22.815,8	24.708,2	24.133,1	27.566,8	29.735,6
	f. Peternakan	452.807,4	491.989,4	548.606,1	582.411,4	603.861,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	46.875,4	53.053,7	55.469,6	60.305,2	65.757,3
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	55.127,0	58.660,8	64.826,9	68.547,8	71.655,7
	3 Perikanan	86.496,2	95.978,8	105.881,1	110.268,8	119.317,3
B	Pertambangan dan Penggalian	122.599,9	137.850,2	147.413,2	152.576,6	154.658,4
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	122.599,9	137.850,2	147.413,2	152.576,6	154.658,4
C	Industri Pengolahan	4.021.392,5	4.311.424,1	4.543.920,0	4.943.591,4	5.319.570,1
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.693.806,6	1.932.243,4	2.070.675,7	2.315.503,0	2.479.661,6
	3 Pengolahan Tembakau	450.669,1	397.367,6	400.624,1	431.054,6	493.528,8
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	695.470,7	773.357,4	841.914,8	923.572,4	998.055,0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	95.896,2	98.587,8	106.789,0	114.161,9	121.310,4
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	54.065,7	55.101,8	55.664,8	55.487,5	59.874,0
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetak	162.964,5	174.220,1	183.991,5	201.864,6	217.642,7
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	39.160,5	42.873,9	48.866,0	53.305,3	57.385,1
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	317.823,9	310.620,6	290.209,2	277.395,1	282.429,8
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	162.811,4	171.954,9	170.680,4	176.705,1	188.725,4
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	7.828,9	8.394,6	8.586,6	8.993,7	9.045,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	48.291,9	52.871,6	56.932,3	60.216,5	61.540,1
	14 Industri Alat Angkutan	633,3	588,2	545,0	535,0	557,2
	15 Industri Furnitur	159.815,9	157.488,1	161.489,8	171.715,5	184.685,7
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	132.154,0	135.754,2	146.951,0	153.081,3	165.128,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.296,8	27.895,9	32.016,3	38.680,5	47.254,3
	1 Ketenagalistrikan	24.023,6	27.612,2	31.732,5	38.376,3	46.929,4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	273,1	283,6	283,8	304,2	324,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	14.052,2	16.069,8	17.198,3	17.992,7	19.091,4
F	Konstruksi	3.109.586,7	3.365.673,5	3.671.128,5	3.960.104,0	4.376.658,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	2.103.955,9	2.362.696,9	2.574.664,1	2.883.199,6	3.160.224,6
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	512.528,6	574.589,7	624.929,2	700.629,9	767.846,5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.591.427,3	1.788.107,2	1.949.734,9	2.182.569,7	2.392.378,1
H	Transportasi dan Pergudangan	1.929.376,7	2.164.299,8	2.377.612,6	2.692.371,9	2.973.830,1
	1 Angkutan Rel	904,1	1.130,3	1.364,8	1.469,6	1.728,9
	2 Angkutan Darat	741.545,8	818.941,1	880.008,6	926.556,2	960.487,0
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	777.432,1	886.133,4	992.291,0	1.206.916,6	1.402.533,6
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	409.494,7	458.095,0	503.948,2	557.429,5	609.080,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.796.604,3	3.086.048,1	3.450.076,4	3.793.368,4	4.144.322,4
	1 Penyediaan Akomodasi	611.660,5	661.704,5	751.632,1	833.492,0	949.424,4
	2 Penyediaan Makan Minum	2.184.943,8	2.424.343,6	2.698.444,3	2.959.876,4	3.194.898,0
J	Informasi dan Komunikasi	2.470.222,7	2.612.761,5	2.726.066,7	2.961.884,7	3.244.700,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	860.246,4	992.908,7	1.114.723,3	1.200.882,6	1.280.249,9
	1 Jasa Perantara Keuangan	643.199,0	760.582,2	862.638,2	925.864,5	975.859,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	35.373,2	39.800,8	42.630,1	46.321,1	50.874,1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	180.443,4	191.189,8	208.056,0	227.213,2	251.886,5
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.230,8	1.335,9	1.399,0	1.483,8	1.630,4
L	Real Estate	2.129.836,5	2.383.940,9	2.626.348,2	2.923.612,0	3.142.737,1
M,N	Jasa Perusahaan	470.231,8	528.106,6	578.396,9	618.775,8	670.736,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.796.460,4	2.021.715,0	2.251.056,6	2.520.298,8	2.782.811,3
P	Jasa Pendidikan	2.644.487,8	2.943.821,9	3.346.591,6	3.538.688,4	3.815.058,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	646.475,9	701.977,8	791.283,7	868.505,4	947.351,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	620.762,9	680.848,8	751.294,1	842.093,9	923.008,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	28.295.362,8	30.912.238,7	33.826.505,4	36.939.695,9	40.087.444,9

Lampiran Tabel 27.
PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.066.440,3	1.968.070,7	2.003.474,9	2.025.845,0	2.047.956,6
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	1.948.817,1	1.848.247,5	1.879.168,7	1.899.889,7	1.917.774,9
	a. Tanaman Pangan	600.435,8	582.884,2	599.870,0	616.667,1	592.318,0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	125.358,5	112.232,1	116.944,7	116.794,8	118.879,2
	c. Perkebunan Semusim	17.344,3	17.469,9	16.869,4	16.135,1	16.808,5
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	763.259,2	674.276,7	664.643,7	659.088,1	679.888,7
	e. Perkebunan Tahunan	18.253,2	18.129,9	17.432,2	17.293,4	18.018,7
	f. Peternakan	385.219,2	401.635,5	420.727,9	430.017,0	446.094,0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	38.947,0	41.619,1	42.680,8	43.894,2	45.767,8
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	50.127,0	51.327,0	52.717,8	53.309,7	54.590,8
	3 Perikanan	67.496,2	68.496,2	71.588,4	72.645,6	75.590,9
B	Pertambangan dan Pengecilan	114.158,6	115.316,4	115.517,4	116.010,7	116.931,8
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Pengecilan Lainnya	114.158,6	115.316,4	115.517,4	116.010,7	116.931,8
C	Industri Pengolahan	3.442.811,3	3.513.598,4	3.582.533,8	3.742.820,5	3.958.737,5
	1 Industri Batubara dan Pengecilan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengecilan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.487.910,9	1.591.997,5	1.648.531,5	1.762.123,3	1.868.838,5
	3 Pengolahan Tembakau	319.922,3	254.690,4	249.932,6	254.258,5	270.153,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	565.470,7	609.964,2	646.225,2	687.409,4	730.981,5
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	78.896,2	78.843,1	85.213,8	87.966,0	91.788,0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	52.844,0	52.799,4	51.640,4	50.817,8	54.219,4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	152.023,0	158.512,2	161.418,5	169.656,5	175.507,9
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	43.933,6	47.233,3	50.959,8	54.299,6	57.859,5
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	280.007,2	264.777,6	241.434,6	222.941,5	230.622,3
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	143.311,4	145.151,6	136.284,9	136.661,8	145.231,9
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	7.378,9	7.536,8	7.529,5	7.707,5	7.709,4
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	43.791,9	46.862,7	50.012,0	50.847,3	51.629,1
	14 Industri Alat Angkutan	553,3	498,4	460,6	441,1	457,7
	15 Industri Furnitur	149.613,9	143.200,6	138.977,7	143.970,2	151.698,5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	117.154,0	111.530,6	113.912,5	113.720,1	122.040,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32.747,5	33.932,0	34.426,8	39.685,0	41.250,1
	1 Ketenagalistrikan	32.523,6	33.702,4	34.192,0	39.446,8	41.008,6
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	223,8	229,6	234,8	238,3	241,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	12.547,3	13.051,2	13.445,4	13.768,0	14.215,3
F	Konstruksi	2.816.446,0	2.975.378,7	3.107.439,5	3.255.739,8	3.482.033,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.882.435,0	2.003.871,3	2.132.734,9	2.266.178,9	2.395.018,2
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	437.695,2	474.735,9	494.492,7	528.028,2	557.094,1
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.444.739,7	1.529.135,4	1.638.242,2	1.738.150,7	1.837.924,0
H	Transportasi dan Pergudangan	1.621.175,8	1.708.682,4	1.775.484,4	1.906.605,9	2.009.178,5
	1 Angkutan Rel	809,0	862,5	931,2	962,7	1.107,8
	2 Angkutan Darat	687.115,5	711.859,4	739.902,5	753.977,3	773.829,1
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	597.096,7	631.131,2	650.043,1	740.177,1	800.039,5
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	336.154,7	364.829,3	384.607,6	411.488,8	434.202,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.435.074,3	2.581.614,6	2.738.288,4	2.902.017,7	3.080.070,8
	1 Penyediaan Akomodasi	472.561,4	494.344,9	530.855,6	574.810,8	636.968,7
	2 Penyediaan Makan Minum	1.962.512,9	2.087.269,7	2.207.432,8	2.327.206,9	2.443.102,0
J	Informasi dan Komunikasi	2.571.044,5	2.757.450,5	2.908.483,0	3.146.691,0	3.347.054,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	713.637,0	778.030,1	845.349,5	887.991,3	912.766,4
	1 Jasa Perantara Keuangan	522.438,0	579.972,0	632.965,3	662.953,7	673.145,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	31.252,6	33.351,5	34.707,1	36.114,8	38.190,2
	3 Jasa Keuangan Lainnya	158.837,1	163.538,7	176.472,8	187.689,5	200.144,6
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.109,3	1.167,9	1.204,2	1.233,3	1.286,5
L	Real Estate	2.019.632,4	2.188.665,9	2.333.477,3	2.462.400,1	2.584.190,2
M,N	Jasa Perusahaan	472.690,1	515.392,4	552.150,3	571.731,6	604.811,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.517.840,3	1.618.043,2	1.702.107,9	1.802.366,0	1.876.188,1
P	Jasa Pendidikan	2.470.132,9	2.681.853,4	2.893.218,8	3.008.341,9	3.177.933,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	593.989,7	641.582,9	690.675,4	721.549,5	765.037,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	584.611,3	618.537,2	669.199,2	704.252,1	742.302,9
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	25.367.414,2	26.713.071,2	28.098.006,9	29.573.995,0	31.155.675,6

Lampiran Tabel 28.

Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,74	-4,76	1,80	1,12	1,09
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	2,69	-5,16	1,67	1,10	0,94
	a. Tanaman Pangan	0,12	-2,92	2,91	2,80	-3,95
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1,07	-10,47	4,20	-0,13	1,78
	c. Perkebunan Semusim	2,34	0,72	-3,44	-4,35	4,17
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	6,24	-11,66	-1,43	-0,84	3,16
	e. Perkebunan Tahunan	5,35	-0,68	-3,85	-0,80	4,19
	f. Peternakan	0,64	4,26	4,75	2,21	3,74
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,95	6,86	2,55	2,84	4,27
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,34	2,39	2,71	1,12	2,40
	3 Perikanan	5,54	1,48	4,51	1,48	4,05
B	Pertambangan dan Penggalian	2,28	1,01	0,17	0,43	0,79
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,28	1,01	0,17	0,43	0,79
C	Industri Pengolahan	6,01	2,06	1,96	4,47	5,77
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	9,13	7,00	3,55	6,89	6,06
	3 Pengolahan Tembakau	1,03	-20,39	-1,87	1,73	6,25
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8,23	7,87	5,94	6,37	6,34
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6,06	-0,07	8,08	3,23	4,34
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	2,91	-0,08	-2,20	-1,59	6,69
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	1,31	4,27	1,83	5,10	3,45
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-1,10	7,51	7,89	6,55	6,56
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,10	-5,44	-8,82	-7,66	3,45
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	7,88	1,28	-6,11	0,28	6,27
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	4,20	2,14	-0,10	2,36	0,02
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-0,54	7,01	6,72	1,67	1,54
	14 Industri Alat Angkutan	-2,32	-9,92	-7,58	-4,24	3,78
	15 Industri Furnitur	1,85	-4,29	-2,95	3,59	5,37
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	3,41	-4,80	2,14	-0,17	7,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,71	3,62	1,46	15,27	3,94
	1 Ketenagalistrikan	6,71	3,62	1,45	15,37	3,96
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	7,11	2,57	2,29	1,47	1,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	1,17	4,02	3,02	2,40	3,25
F	Konstruksi	4,74	5,64	4,44	4,77	6,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	5,27	6,45	6,43	6,26	5,69
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	6,15	8,46	4,16	6,78	5,50
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,01	5,84	7,14	6,10	5,74
H	Transportasi dan Pergudangan	9,03	5,40	3,91	7,39	5,38
	1 Angkutan Rel	-2,08	6,61	7,97	3,39	15,06
	2 Angkutan Darat	4,54	3,60	3,94	1,90	2,63
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	15,78	5,70	3,00	13,87	8,09
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	7,39	8,53	5,42	6,99	5,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12	6,02	6,07	5,98	6,14
	1 Penyediaan Akomodasi	8,21	4,61	7,39	8,28	10,81
	2 Penyediaan Makan Minum	6,86	6,36	5,76	5,43	4,98
J	Informasi dan Komunikasi	8,45	7,25	5,48	8,19	6,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,17	9,02	8,65	5,04	2,79
	1 Jasa Perantara Keuangan	15,57	11,01	9,14	4,74	1,54
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	2,05	6,72	4,06	4,06	5,75
	3 Jasa Keuangan Lainnya	8,18	2,96	7,91	6,36	6,64
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,92	5,28	3,11	2,42	4,32
L	Real Estate	5,00	8,37	6,62	5,52	4,95
M,N	Jasa Perusahaan	3,37	9,03	7,13	3,55	5,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,96	6,60	5,20	5,89	4,10
P	Jasa Pendidikan	4,21	8,57	7,88	3,98	5,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,94	8,01	7,65	4,47	6,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,92	5,80	8,19	5,24	5,40
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,89	5,30	5,18	5,25	5,35

Lampiran Tabel 29.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,96	8,33	8,36	8,06	7,75
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	8,46	7,83	7,85	7,58	7,27
	a. Tanaman Pangan	2,48	2,21	2,33	2,32	2,21
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,53	0,45	0,45	0,43	0,39
	c. Perkebunan Semusim	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3,53	3,25	3,15	2,96	2,87
	e. Perkebunan Tahunan	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
	f. Peternakan	1,60	1,59	1,62	1,57	1,50
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18
	3 Perikanan	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,45	0,44	0,41	0,39
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,43	0,45	0,44	0,41	0,39
C	Industri Pengolahan	14,21	13,95	13,43	13,37	13,21
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	5,99	6,25	6,12	6,25	6,17
	3 Pengolahan Tembakau	1,59	1,29	1,18	1,17	1,20
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2,46	2,50	2,49	2,50	2,48
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,34	0,32	0,32	0,31	0,30
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,19	0,18	0,16	0,15	0,15
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,58	0,56	0,54	0,55	0,55
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,12	1,00	0,86	0,76	0,71
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,58	0,56	0,50	0,48	0,47
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,56	0,51	0,48	0,46	0,46
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11
	1 Ketenagalistrikan	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,99	10,89	10,85	10,71	10,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7,44	7,64	7,61	7,79	7,85
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	1,81	1,86	1,85	1,89	1,90
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,62	5,78	5,76	5,90	5,95
H	Transportasi dan Pergudangan	6,82	7,00	7,03	7,28	7,39
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	2,62	2,65	2,60	2,51	2,39
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	2,75	2,87	2,93	3,26	3,48
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1,45	1,48	1,49	1,50	1,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,88	9,98	10,20	10,28	10,34
	1 Penyediaan Akomodasi	2,16	2,14	2,22	2,25	2,36
	2 Penyediaan Makan Minum	7,72	7,84	7,98	8,03	7,98
J	Informasi dan Komunikasi	8,73	8,45	8,06	8,01	8,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,21	3,30	3,25	3,18
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,27	2,46	2,55	2,51	2,43
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,64	0,62	0,62	0,61	0,62
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	7,53	7,71	7,76	7,90	7,80
M,N	Jasa Perusahaan	1,66	1,71	1,71	1,67	1,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,35	6,54	6,65	6,81	6,87
P	Jasa Pendidikan	9,35	9,52	9,89	9,67	9,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,28	2,27	2,34	2,35	2,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,19	2,20	2,22	2,28	2,30
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran Tabel 30.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Sleman Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,23	-0,39	0,13	0,08	0,07
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	0,21	-0,40	0,12	0,07	0,06
	a. Tanaman Pangan	0,00	-0,07	0,06	0,06	-0,08
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,01	-0,05	0,02	0,00	0,01
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,19	-0,35	-0,04	-0,02	0,07
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Peternakan	0,01	0,06	0,07	0,03	0,05
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	3 Perikanan	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	0,81	0,28	0,26	0,57	0,73
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	Industri Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,52	0,41	0,21	0,40	0,36
	3 Pengolahan Tembakau	0,01	-0,26	-0,02	0,02	0,05
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,18	0,18	0,14	0,15	0,15
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,02	0,00	0,02	0,01	0,01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percelakar	0,01	0,03	0,01	0,03	0,02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	-0,06	-0,09	-0,07	0,03
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,04	0,01	-0,03	0,00	0,03
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,01	-0,03	-0,02	0,02	0,03
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0,02	-0,02	0,01	0,00	0,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	0,53	0,63	0,49	0,53	0,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,39	0,48	0,48	0,47	0,44
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,11	0,15	0,07	0,12	0,10
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	0,29	0,33	0,41	0,36	0,34
H	Transportasi dan Pergudangan	0,56	0,34	0,25	0,47	0,35
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	0,12	0,10	0,10	0,05	0,07
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	0,34	0,13	0,07	0,32	0,20
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0,10	0,11	0,07	0,10	0,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,58	0,59	0,58	0,60
	1 Penyediaan Akomodasi	0,15	0,09	0,14	0,16	0,21
	2 Penyediaan Makan Minum	0,53	0,49	0,45	0,43	0,39
J	Informasi dan Komunikasi	0,84	0,73	0,57	0,85	0,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,35	0,25	0,25	0,15	0,08
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,29	0,23	0,20	0,11	0,03
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,05	0,02	0,05	0,04	0,04
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	0,40	0,67	0,54	0,46	0,41
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,17	0,14	0,07	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,30	0,40	0,31	0,36	0,25
P	Jasa Pendidikan	0,42	0,83	0,79	0,41	0,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,19	0,18	0,11	0,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,11	0,13	0,19	0,12	0,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,89	5,30	5,18	5,25	5,35

Lampiran Tabel 31.

PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43.311,0	41.998,0	45.154,5	46.844,5	47.958,9
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	42.548,4	41.196,9	44.299,3	45.944,7	47.015,2
	a. Tanaman Pangan	3.453,3	3.454,1	3.878,8	3.904,7	4.015,4
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	282,0	265,8	285,9	291,5	283,1
	c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	5.634,2	6.155,8	6.592,5	6.796,4	7.059,4
	e. Perkebunan Tahunan	4,6	5,3	5,5	6,1	6,7
	f. Peternakan	32.347,2	30.488,8	32.682,6	34.067,8	34.717,0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	827,1	827,2	854,0	878,3	933,5
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Perikanan	762,6	801,1	855,2	899,8	943,7
B	Pertambangan dan Penggalian	912,6	1.017,4	1.041,0	1.087,0	1.125,6
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	912,6	1.017,4	1.041,0	1.087,0	1.125,6
C	Industri Pengolahan	3.162.724,6	3.503.705,6	3.659.952,7	3.954.959,2	4.217.233,8
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.709.793,3	1.938.840,9	2.028.045,2	2.221.396,8	2.417.733,6
	3 Pengolahan Tembakau	38.895,7	36.540,7	35.944,0	38.721,4	44.601,7
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	165.768,4	178.274,8	193.756,4	208.423,0	224.887,2
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	116.816,4	123.869,1	134.743,1	142.910,0	152.344,6
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	11.796,0	11.811,5	12.077,2	12.090,5	12.460,1
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	70.357,6	79.210,4	83.205,0	91.017,3	96.006,2
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4.301,1	4.557,4	5.104,8	5.543,5	5.881,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	15.819,0	15.284,2	14.325,5	14.199,6	13.415,8
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	8.094,6	8.606,6	9.005,0	9.312,3	9.518,9
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	633.192,9	684.596,4	691.446,5	726.811,5	730.934,0
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	322.943,7	355.834,5	382.482,6	411.020,1	430.440,9
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	26.798,9	26.305,7	26.981,5	28.441,9	30.520,0
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	38.146,9	39.973,5	42.835,9	45.071,2	48.488,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	34.920,0	41.416,1	48.055,5	57.415,1	70.350,6
	1 Ketenagalistrikan	34.694,3	41.173,3	47.813,8	57.157,4	70.076,0
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	225,7	242,7	241,7	257,6	274,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	34.604,5	39.433,3	42.035,3	43.862,7	45.993,1
F	Konstruksi	1.857.547,3	1.993.618,2	2.133.134,0	2.265.491,9	2.417.777,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.622.198,4	1.773.124,2	1.923.298,6	2.130.471,8	2.345.123,5
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	404.582,3	446.139,0	486.831,5	541.359,8	595.786,4
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.217.616,1	1.326.985,2	1.436.467,1	1.589.111,9	1.749.337,1
H	Transportasi dan Pergudangan	898.347,9	1.011.503,3	1.094.829,6	1.153.541,9	1.238.719,5
	1 Angkutan Rel	58.656,8	79.890,7	95.741,3	103.291,5	122.879,3
	2 Angkutan Darat	693.220,2	767.846,4	818.178,8	850.572,3	891.855,2
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	146.471,0	163.766,2	180.909,4	199.678,1	223.985,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.841.005,2	3.177.195,7	3.540.966,4	3.863.755,8	4.243.793,1
	1 Penyediaan Akomodasi	798.596,6	888.517,5	1.005.818,8	1.129.363,6	1.293.939,7
	2 Penyediaan Makan Minum	2.042.408,6	2.288.678,2	2.535.147,6	2.734.392,2	2.949.853,4
J	Informasi dan Komunikasi	2.658.361,7	2.671.115,1	2.767.355,9	2.999.250,3	3.269.519,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.446.245,6	1.612.478,4	1.790.994,2	1.938.683,5	2.084.850,1
	1 Jasa Perantara Keuangan	920.811,4	1.038.975,8	1.174.140,0	1.260.872,2	1.345.287,3
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	191.523,8	213.675,8	226.695,4	245.380,8	264.261,0
	3 Jasa Keuangan Lainnya	328.952,3	354.266,1	384.333,2	426.214,4	468.494,0
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4.958,1	5.560,7	5.825,6	6.216,1	6.807,7
L	Real Estate	2.077.702,6	2.304.808,7	2.496.071,1	2.664.981,3	2.850.160,9
M,N	Jasa Perusahaan	246.546,1	270.552,0	296.115,3	311.413,0	338.219,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2.160.769,5	2.408.848,6	2.682.897,3	2.937.107,9	3.255.324,0
P	Jasa Pendidikan	2.018.579,1	2.251.404,1	2.535.454,3	2.666.907,1	2.857.879,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	831.318,6	903.928,4	1.016.645,1	1.085.552,8	1.181.954,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	602.697,2	658.138,5	717.935,4	774.487,0	842.671,4
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22.537.791,9	24.664.285,5	26.791.936,3	28.895.812,7	31.308.655,2

Lampiran Tabel 32.
PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.100,0	35.733,8	36.052,7	36.377,3	36.766,9
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	35.453,1	35.075,5	35.380,3	35.694,1	36.071,3
	a. Tanaman Pangan	3.165,9	3.119,4	3.166,7	3.183,3	3.147,0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	234,2	232,7	235,8	235,2	237,1
	c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4.725,1	4.761,3	4.716,7	4.704,5	4.719,3
	e. Perkebunan Tahunan	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	f. Peternakan	26.588,5	26.226,3	26.524,7	26.823,0	27.205,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	735,2	731,6	732,3	744,1	758,2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Perikanan	647,0	658,3	672,4	683,2	695,6
B	Pertambangan dan Penggalian	839,0	850,0	851,2	856,1	876,7
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	839,0	850,0	851,2	856,1	876,7
C	Industri Pengolahan	2.813.952,7	2.943.904,5	2.996.573,4	3.123.936,8	3.272.312,3
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.515.575,9	1.614.793,0	1.633.407,2	1.715.374,1	1.832.045,0
	3 Pengolahan Tembakau	27.429,3	22.827,9	21.646,2	22.309,4	23.939,3
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	128.688,5	134.580,7	142.673,0	150.254,5	158.465,4
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	94.675,5	95.294,4	103.412,9	107.428,8	112.594,2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	10.817,4	10.576,4	10.410,3	10.176,8	10.342,4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	64.838,9	67.248,8	68.700,6	71.937,8	75.485,3
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4.786,6	5.016,6	5.315,7	5.551,8	5.827,4
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	13.771,4	12.821,8	11.796,7	11.282,8	11.388,3
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	7.155,8	7.253,2	7.066,1	7.088,7	7.148,7
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	592.985,5	604.042,1	601.150,8	621.437,2	620.441,4
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	293.377,0	311.670,4	333.074,6	342.510,2	352.693,9
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	25.150,5	23.971,7	23.293,0	24.064,5	25.081,0
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	34.700,3	33.807,4	34.626,4	34.520,3	36.859,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47.599,0	50.700,6	51.794,6	58.012,8	60.189,1
	1 Ketenagalistrikan	47.416,0	50.506,8	51.596,8	57.809,5	59.979,8
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	183,0	193,7	197,8	203,3	209,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	30.712,0	31.963,4	32.797,8	33.527,3	34.601,9
F	Konstruksi	1.600.097,5	1.674.189,0	1.722.508,1	1.783.818,9	1.877.754,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.407.238,6	1.480.894,1	1.569.644,8	1.658.673,7	1.754.131,8
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	340.394,6	364.016,1	373.699,6	395.400,4	418.792,8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.066.844,0	1.116.877,9	1.195.945,2	1.263.273,3	1.335.338,9
H	Transportasi dan Pergudangan	815.841,3	838.086,9	870.912,2	895.462,9	938.282,7
	1 Angkutan Rel	47.936,7	57.131,8	61.688,8	63.992,2	74.480,0
	2 Angkutan Darat	644.133,5	646.826,9	667.836,5	680.935,0	703.055,3
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	123.771,1	134.128,2	141.386,9	150.535,8	160.747,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.320.365,4	2.444.064,8	2.589.749,8	2.740.135,5	2.927.873,7
	1 Penyediaan Akomodasi	635.310,9	662.200,6	714.829,4	771.995,5	861.538,3
	2 Penyediaan Makan Minum	1.685.054,6	1.781.864,2	1.874.920,4	1.968.140,0	2.066.335,4
J	Informasi dan Komunikasi	2.779.291,4	2.898.953,3	3.035.921,6	3.280.050,1	3.473.909,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.196.258,9	1.273.749,8	1.374.111,3	1.444.289,8	1.490.269,2
	1 Jasa Perantara Keuangan	750.030,2	807.905,0	880.574,7	922.255,2	943.197,1
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	167.205,4	179.444,2	185.159,7	192.616,4	199.650,6
	3 Jasa Keuangan Lainnya	274.958,1	282.049,0	303.891,0	324.786,5	342.619,3
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4.065,2	4.351,7	4.485,9	4.631,6	4.802,0
L	Real Estate	1.848.546,3	1.972.048,8	2.074.601,9	2.167.878,8	2.264.807,4
M,N	Jasa Perusahaan	245.485,7	259.521,0	278.211,9	285.922,7	304.281,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.813.729,6	1.914.203,7	2.021.480,1	2.139.889,8	2.239.054,4
P	Jasa Pendidikan	1.960.166,2	2.088.605,8	2.235.519,7	2.313.155,3	2.429.977,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	766.206,6	818.611,5	879.118,7	920.126,8	973.057,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	557.127,4	581.682,5	623.162,3	655.987,2	693.384,2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.239.557,7	21.307.763,6	22.393.012,2	23.538.101,8	24.771.530,0

Lampiran Tabel 33.

Laju Pertumbuhan Pdrb Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,09	-1,01	0,89	0,90	1,07
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	1,10	-1,07	0,87	0,89	1,06
	a. Tanaman Pangan	0,09	-1,47	1,52	0,53	-1,14
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,98	-0,64	1,32	-0,27	0,83
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,86	0,76	-0,94	-0,26	0,32
	e. Perkebunan Tahunan	1,33	0,83	-1,41	0,55	0,78
	f. Peternakan	1,10	-1,36	1,14	1,12	1,43
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,68	-0,49	0,10	1,61	1,89
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
	3 Perikanan	0,75	1,76	2,14	1,60	1,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,23	1,31	0,14	0,58	2,41
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,23	1,31	0,14	0,58	2,41
C	Industri Pengolahan	6,95	4,62	1,79	4,25	4,75
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	9,79	6,55	1,15	5,02	6,80
	3 Pengolahan Tembakau	1,32	-16,78	-5,18	3,06	7,31
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	12,58	4,58	6,01	5,31	5,46
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6,88	0,65	8,52	3,88	4,81
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	3,22	-2,23	-1,57	-2,24	1,63
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	1,44	3,72	2,16	4,71	4,93
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-2,65	4,80	5,96	4,44	4,96
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,81	-6,90	-7,99	-4,36	0,94
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	7,72	1,36	-2,58	0,32	0,85
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	4,59	1,86	-0,48	3,37	-0,16
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-1,07	6,24	6,87	2,83	2,97
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	1,45	-4,69	-2,83	3,31	4,22
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	7,01	-2,57	2,42	-0,31	6,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,64	6,52	2,16	12,01	3,75
	1 Ketenagalistrikan	5,64	6,52	2,16	12,04	3,75
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	5,63	5,89	2,10	2,77	2,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	1,81	4,07	2,61	2,22	3,21
F	Konstruksi	4,82	4,63	2,89	3,56	5,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	6,11	5,23	5,99	5,67	5,76
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	5,61	6,94	2,66	5,81	5,92
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	6,26	4,69	7,08	5,63	5,70
H	Transportasi dan Pergudangan	3,88	2,73	3,92	2,82	4,78
	1 Angkutan Rel	-1,10	19,18	7,98	3,73	16,39
	2 Angkutan Darat	4,11	0,42	3,25	1,96	3,25
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	4,76	8,37	5,41	6,47	6,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,28	5,33	5,96	5,81	6,85
	1 Penyediaan Akomodasi	8,59	4,23	7,95	8,00	11,60
	2 Penyediaan Makan Minum	5,43	5,75	5,22	4,97	4,99
J	Informasi dan Komunikasi	4,70	4,31	4,72	8,04	5,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,99	6,48	7,88	5,11	3,18
	1 Jasa Perantara Keuangan	16,85	7,72	8,99	4,73	2,27
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	2,33	7,32	3,19	4,03	3,65
	3 Jasa Keuangan Lainnya	2,42	2,58	7,74	6,88	5,49
	4 Jasa Penunjang Keuangan	-0,79	7,05	3,08	3,25	3,68
L	Real Estate	3,70	6,68	5,20	4,50	4,47
M,N	Jasa Perusahaan	3,02	5,72	7,20	2,77	6,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,86	5,54	5,60	5,86	4,63
P	Jasa Pendidikan	3,75	6,55	7,03	3,47	5,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	6,84	7,39	4,66	5,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,81	4,41	7,13	5,27	5,70
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24

Lampiran Tabel 34.
Distribusi Persentase PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,19	0,17	0,17	0,16	0,16
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	0,19	0,17	0,17	0,16	0,15
	a. Tanaman Pangan	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Peternakan	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
	3 Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	14,03	14,21	13,66	13,68	13,67
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,59	7,86	7,57	7,68	7,81
	3 Pengolahan Tembakau	0,17	0,15	0,13	0,13	0,14
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,74	0,72	0,72	0,72	0,73
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	2,81	2,78	2,58	2,51	2,42
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1,43	1,44	1,43	1,42	1,39
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,17	0,18	0,20	0,20
	1 Ketenagalistrikan	0,15	0,17	0,18	0,20	0,20
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15
F	Konstruksi	8,24	8,08	7,96	7,83	7,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7,20	7,19	7,18	7,37	7,56
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	1,80	1,81	1,82	1,87	1,94
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,40	5,38	5,36	5,50	5,61
H	Transportasi dan Pergudangan	3,99	4,10	4,09	4,00	3,97
	1 Angkutan Rel	0,26	0,32	0,36	0,36	0,37
	2 Angkutan Darat	3,08	3,11	3,05	2,94	2,89
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0,65	0,66	0,68	0,69	0,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,61	12,88	13,22	13,36	13,52
	1 Penyediaan Akomodasi	3,54	3,60	3,75	3,91	4,00
	2 Penyediaan Makan Minum	9,06	9,28	9,46	9,46	9,52
J	Informasi dan Komunikasi	11,80	10,83	10,33	10,37	10,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,42	6,54	6,68	6,72	6,59
	1 Jasa Perantara Keuangan	4,09	4,21	4,38	4,38	4,31
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,85	0,87	0,85	0,85	0,83
	3 Jasa Keuangan Lainnya	1,46	1,44	1,43	1,48	1,43
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
L	Real Estate	9,22	9,34	9,32	9,22	9,12
M,N	Jasa Perusahaan	1,09	1,10	1,11	1,08	1,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	9,59	9,77	10,01	10,12	10,06
P	Jasa Pendidikan	8,96	9,13	9,46	9,30	9,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,69	3,66	3,79	3,75	3,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,67	2,67	2,68	2,68	2,70
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran Tabel 35.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Yogyakarta Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
	3 Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	0,95	0,64	0,25	0,57	0,63
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,70	0,49	0,09	0,37	0,50
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,07	0,03	0,04	0,03	0,03
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,03	0,00	0,04	0,02	0,02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percelakar	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,14	0,05	-0,01	0,09	0,00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-0,02	0,09	0,10	0,04	0,04
	14 Industri Alat Angkutan	-	-	-	-	-
	15 Industri Furnitur	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01
	1 Ketenagalistrikan	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	0,38	0,37	0,23	0,27	0,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,42	0,36	0,42	0,40	0,41
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,09	0,12	0,05	0,10	0,10
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	0,33	0,25	0,37	0,30	0,31
H	Transportasi dan Pergudangan	0,16	0,11	0,15	0,11	0,18
	1 Angkutan Rel	0,00	0,05	0,02	0,01	0,04
	2 Angkutan Darat	0,13	0,01	0,10	0,06	0,09
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0,03	0,05	0,03	0,04	0,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,71	0,61	0,68	0,67	0,80
	1 Penyediaan Akomodasi	0,26	0,13	0,25	0,26	0,38
	2 Penyediaan Makan Minum	0,45	0,48	0,44	0,42	0,42
J	Informasi dan Komunikasi	0,65	0,59	0,64	1,09	0,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	0,38	0,47	0,31	0,20
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,56	0,29	0,34	0,19	0,09
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,03	0,04	0,10	0,09	0,08
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	0,34	0,61	0,48	0,42	0,41
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,07	0,09	0,03	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,44	0,50	0,50	0,53	0,42
P	Jasa Pendidikan	0,37	0,63	0,69	0,35	0,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,24	0,26	0,28	0,18	0,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,13	0,12	0,19	0,15	0,16
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24



PASAR BERINGHARJO
ตลาดบึงหารโจ